

**PEMBERITAAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA  
PADA SITUS TIRTO.ID  
(Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**M FIANDA RULY ANANTA**  
**NIM 16511070111005**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2021**







**PEMBERITAAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA  
PADA SITUS TIRTO.ID  
(Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Brawijaya  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar *Sarjana Pendidikan***



**OLEH  
M FIANDA RULY ANANTA  
NIM 16511070111005**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA  
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : M. Fianda Ruly Ananta

NIM : 1651 10700111005

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
 menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah benar-benar karya saya, bukan merupakan jiplakan dari karya orang lain, dan belum pernah digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi manapun;
2. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang akan diberikan.



Malang, Juli 2021



M. Fianda Ruly Ananta

NIM. 165110700111005



LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana berjudul **PEMBERITAAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA PADA SITUS TIRTO.ID (ANALISIS WACANA kRITIS NORMAN FAIRCLOUGH)** atas nama **M. FIANDA RULY ANANTA** telah disetujui oleh Dewan Penguji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar *Sarjana Pendidikan*.

Tanggal Ujian: 12 Juli 2021



Dr. Eti Setiawati, M.Pd., Ketua/ Penguji  
NIP. 196404131992032001



MILLATUZ ZAKIYAH, S.Pd., M.A., Anggota/ Pembimbing  
NIP. 2016078912262001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Hamamah, M.Pd., Ph.D.  
NIP. 19730103 200501 2 001



## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan segala puja dan puji kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa tanpa hadir-Nya, penulis hanyalah manusia yang tersesat pada jurang tanpa dasar. Di tengah segala kesulitan dan keterpurukan, akhirnya penelitian yang berjudul *Pemberitaan Omnibus Law UU Cipta Kerja Pada Situs Tirto.Id (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)* bisa diselesaikan.

Penelitian ini mencoba membedah wacana yang dihadirkan oleh sebuah media massa dalam sebuah teks berita. Bahasa merupakan faktor penting dalam mengungkap ideologi media massa, sebab melalui bahasa tercermin sebuah ideologi. Penelitian ini berusaha menyingkap ideologi Tirto.id melalui pendekatan analisis wacana kritis.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa selesainya penelitian ini tidak bisa terlepas dari peran pihak-pihak yang hadir di sisi penulis. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terus mendampingi dan mendukung penulis hingga penelitian ini bisa selesai pada waktu yang tepat. Pihak yang penulis maksud adalah sebagai berikut.

1. Ibu Millatuz Zakiyah, S.Pd., M.A. selaku dosen pembimbing serta segala kerja kerasnya dalam membimbing, mengarahkan, hingga memberi kritik dan saran untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas kesabaran dan ketelatenan beliau dalam membimbing setiap tahap demi tahap.
2. Ibu Dr. Eti Setiawati, M.Pd. selaku dosen penguji tugas akhir ini, yang memberikan masukan untuk segala kekurangan dalam penelitian, mengkritisi setiap lembar untuk menunjukkan setiap kesalahan dan memberikan saran-saran kepada penulis dalam penyempurnaan tugas akhir ini.
3. Bapak dan Ibu penulis yang tidak pernah berhenti memberikan segalanya, baik kasih sayang, dukungan, maupun kepercayaan. Mereka berdualah yang terus-menerus menempe penulis hingga menjadi pribadi yang kuat dan tak pernah lari dari segala rasa sakit dan amarah. Selain itu, dukungan material dan nonmaterial juga semangat serta pengertian yang mereka berikan, sehingga



penulis mampu menuntaskan tugas akhir ini. Tidak ada ucapan paling indah selain terima kasih yang tak terhingga penulis kepada mereka berdua atas cinta yang abadi.

4. Seluruh teman dekat penulis yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk diskusi, saling berbagi sudut pandang dan referensi, dan saling memberikan masukan serta dukungan. Terima kasih atas segala kebersamaan untuk berjuang dalam tempaan ilmu dan pengetahuan.

Penulis sadar bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan banyak kritik serta saran untuk keberlangsungan pengetahuan serta penelitian selanjutnya.

Malang, Juli 2021

M. Fianda Ruly Ananta



## ABSTRAK

Ananta, M. Fianda Ruly. 2021. **Pemberitaan Omnibus Law UU Cipta Kerja Pada Situs Tirto.Id (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)**, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Pembimbing: Millatuz Zakiyah.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, Norman Fairclough, RUU Cipta Kerja.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana media massa merepresentasikan fenomena Omnibus Law UU Cipta Kerja kepada masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penggunaan bahasa, pola hubungan produksi dan konsumsi, serta konteks sosial, politik, dan ekonomi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Data dan sumber data berasal dari teks berita yang membahas tentang UU Cipta Kerja pada situs Tirto.id. data dikumpulkan dengan teknik simak dan catat. Kemudian, data diolah, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tirto.id menggunakan pilihan kosakata seperti metafora, konjungsi, eufemisme dan disfemisme, serta repetisi. Kemudian, dari segi struktur kalimat, Tirto.id seringkali menggunakan sistem klausa yang mendahulukan aktor, sistem klausa yang mendahulukan sirkumtansi, dan sistem klausa pasif. Pada tahap analisis teks, wacana dalam teks yang mengunggulkan buruh dan memarjinalkan DPR dan Pemerintah. Pada tahap praktik kewacanaan, menunjukkan bahwa tidak ada pihak dari luar maupun dalam yang memberikan pengaruh pada keredaksian Tirto.id. Pada tahap sosiokultural, situasi politik, ekonomim dan sosial yang terjadi di Indonesia mempengaruhi Tirto.id memberitakan wacana UU Cipta Kerja. Tirto.id merupakan media massa yang tidak memihak pada semua golongan dan tidak bekerja untuk kepentingan politik.



## ABSTRACT

Ananta, M. Fianda Ruly. 2021. **Omnibus Law of the Job Creation Law News on the Tirto.Id Site (Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis)**. Indonesian Language and Literature Education Study Program. Department of Language Education, Faculty of Cultural Studies, Universitas Brawijaya. Advisor Millatuz Zakiyah.

*Keywords: Critical Discourse Analysis, Norman Fairclough, Job Creation Bill.*

This study examines how the mass media represent the Omnibus Law phenomenon of the Job Creation Law to the public. The approach used in this research is Critical Discourse Analysis developed by Norman Fairclough. The purpose of this study was to determine the use of language, patterns of production and consumption relations, as well as social, political, and economic contexts. This type of research is qualitative-descriptive. The data and data sources come from news texts that discuss the Job Creation Law on the Tirto.id website. The data were collected using the listening and note-taking technique. Then, the data is processed, analyzed, and presented in descriptive form.

The results showed that Tirto.id used vocabulary choices such as metaphors, conjunctions, euphemisms and dysphemism, as well as repetition. Then, in terms of sentence structure, Tirto.id often uses a clause system that prioritizes actors, a clause system that prioritizes circumstances, and a passive clause system. In the text analysis stage, the discourse in the text favors workers and marginalizes the DPR and the Government. At the stage of discursive practice, it shows that there are no external or internal parties that have an influence on the editorial of Tirto.id. At the sociocultural stage, the political, economic and social situation in Indonesia influenced Tirto.id to report the discourse on the Job Creation Law. Tirto.id is a mass media that does not take sides with all groups and does not work for political interests.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Definisi Istilah Kunci .....	13
<b>BAB KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>14</b>
2.1 Media Massa .....	14
2.2 Tirto.id .....	16
2.3 Analisis Wacana Kritis .....	17
2.3.1 Teks .....	17
2.3.1.1 Linguistik Sistemik Fungsional Halliday .....	20
2.3.2 Analisis Discourse Practice .....	22
2.3.3 Analisis Sociocultural Practice .....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	25
3.2 Sumber Data dan Data .....	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.4 Teknik Analisis Data .....	27
3.4.1 Analisis Teks .....	27



3.4.2 Analisis Discourse Practitice .....	29
3.4.3 Analisis Sociocultural Practice .....	29
3.5 Prosedur Penelitian .....	29
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Teks dan Struktur teks .....	31
4.1.1 Representasi Dalam Anak Kalimat .....	31
4.1.1.1 Eufemisme dan Disfemisme .....	32
4.1.1.2 Metafora .....	38
4.1.1.3 Struktur Teks .....	40
4.1.1.3.1 Sistem Klausa yang Mendahulukan Aktor .....	41
4.1.1.3.2 Sistem Klausa yang Mendahulukan Sirkumtansi .....	42
4.1.1.3.3 Sistem Klausa Pasif .....	43
4.1.2 Representasi dalam Kombinasi Anak Kalimat .....	45
4.1.3 Representasi dalam Gabungan Antarkalimat .....	51
4.1.3.1 Repetisi .....	51
4.1.3.2 Konjungsi Internal .....	54
4.1.4 Relasi .....	58
4.1.5 Identitas .....	60
4.2 Analisis <i>Discourse Practice</i> .....	62
4.3 Analisis <i>Sociocultural Practice</i> .....	67
4.2.3.1 Situasional .....	68
4.2.3.2 Instiusional .....	76
4.2.3.3 Sosial .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
5.1 Simpulan .....	86
5.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>

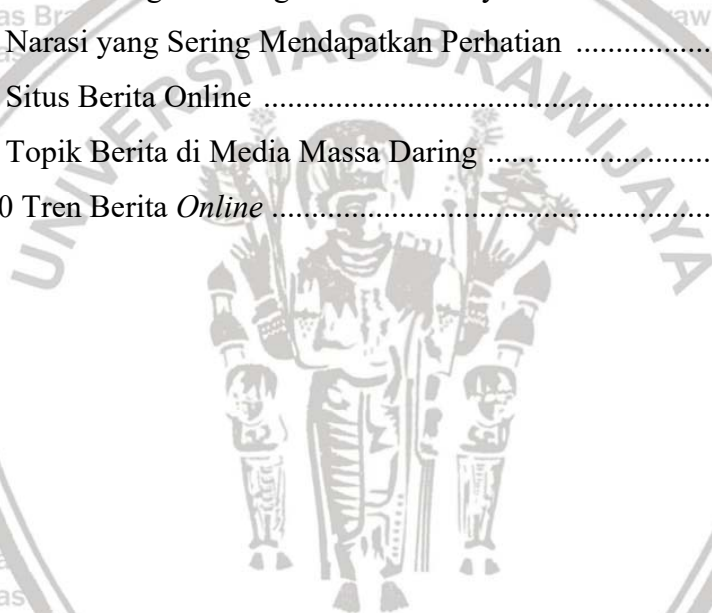
## DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Judul Berita .....	4
2.1 Uraian Aspek-aspek dalam Analisis Teks .....	20
3.1 Daftar Judul Berita dan Tanggal Terbitnya .....	26
4.1 Sampel Data Eufemisme .....	32
4.2 Sampel Data Disfemisme .....	34
4.3 Perbandingan Pilihan Kata .....	36
4.4 Metafora .....	38
4.5 Sistem Klausa yang Mendahulukan Aktor .....	41
4.6 Sistem Klausa yang Mendahulukan Sirkumtansi .....	42
4.7 Sistem Klausa Pasif .....	43
4.8 Analisis Proses Verbal .....	44
4.9 Sampel Data Konjungsi Eksternal .....	46
4.10 Jumlah Penggunaan Konjungsi Eksternal .....	50
4.11 Repetisi Leksikal 1 .....	51
4.12 Repetisi Leksikal 2 .....	52
4.13 Repetisi Leksikal 3 .....	52
4.14 Repetisi Gramatikal .....	53
4.15 Sampel Data Konjungsi Internal .....	55
4.16 Penggunaan Konjungsi Internal .....	58
4.17 Analisis Proses Material .....	60



## DAFTAR GAMBAR

3.1	Prosedur Penelitian .....	30
4.1	Uji Materi yang Disahkan pada 2020 .....	69
4.2	Tren Media Sosial pada Oktober 2020 .....	70
4.3	Sebaran percakapan di Twitter .....	71
4.4	Akun yang Mendapat <u>Engagement</u> terbanyak .....	72
4.5	Tagar yang Sering Digunakan .....	72
4.6	Akun Instagram Dengan <i>Like</i> Terbanyak .....	73
4.7	Narasi yang Sering Mendapatkan Perhatian .....	74
4.8	Situs Berita Online .....	74
4.9	Topik Berita di Media Massa Daring .....	75
4.10	Tren Berita <i>Online</i> .....	76



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel Eufemisme .....	94
2. Tabel Disfemisme .....	96
3. Tabel Konjungsi Internal .....	101
4. Tabel Konjungsi Eksternal .....	110
5. Tabel Metafora .....	123
6. Curriculum Vitae .....	125





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu penyebab perubahan kehidupan bermasyarakat ialah perkembangan teknologi yang sangat cepat, salah satunya persebaran informasi. Kebutuhan akan informasi kini dapat diakses dengan mudah hanya melalui gawai. Persebaran informasi yang cepat secara tidak langsung menuntut media jurnalistik untuk menghasilkan produk jurnalistik yang aktual, inovatif, serta tetap mempertahankan nilai-nilai jurnalistik. Oleh sebab itu, banyak media cetak yang berubah menjadi media daring untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini banyak terjadi pada media massa yang sudah eksis sejak sebelum ada internet, misalnya Majalah Tempo yang awalnya media berbentuk cetak, sekarang dikemas dalam format e-magz agar lebih memudahkan konsumennya.

Media massa, sebagai lembaga kontrol sosial, berperan sebagai pengonstruksi realitas untuk disampaikan kepada khalayak luas, baik cetak maupun digital. Dalam paradigma kritis, media pers merupakan entitas yang dapat dikuasai oleh kelompok yang lebih dominan (Eriyanto, 2001: 23). Dalam hal ini, tulisan yang ditampilkan oleh media massa adalah cerminan ideologi wartawan atau media. Bahasa tidak hanya dimaknai sebagai alat komunikasi, tetapi juga pemahaman penutur terhadap realitas sosial. Oleh sebab itu, realitas yang disajikan oleh media massa bukanlah realitas yang alamiah, tetapi hasil dari rekonstruksi yang dilakukan oleh wartawan.

Selain itu, media massa sebagai penyampai informasi kepada masyarakat dikelola

secara profesional dan bertujuan mencari keuntungan. Dalam hal ini, tidak ada pihak di luar media massa yang mengatur berita yang ditampilkan.

Salah satu topik yang diangkat menjadi berita karena adanya pro-kontra adalah Omnibus Law. Terdapat dua RUU yang menjadi pembahasan, yaitu UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Namun, dalam penelitian ini difokuskan pada UU Cipta Kerja yang memicu pro-kontra hingga pada puncaknya terjadi aksi massa di berbagai kota yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Isu pengesahan UU Cipta Kerja ramai dibahas di jagat digital, khususnya *twitter*. Sebab, di satu sisi menguntungkan pihak investor, tetapi di sisi lain merugikan buruh dan lingkungan hidup. Sehingga, hal ini menimbulkan perselisihan antara pemerintah sebagai pembuat aturan dan buruh sebagai pihak yang dirugikan oleh aturan-aturan yang telah disahkan.

RUU Cipta Kerja pertama kali dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Februari 2020, sekaligus menjadi RUU yang diprioritaskan pada tahun ini. Sebelumnya pemerintah telah mengklaim telah diadakan *roadshow* RUU Cipta Kerja ke 18 kota di Indonesia (Muhammad Idris, 2020). Bahkan, untuk mempercepat RUU Cipta Kerja, dilakukan rapat maraton oleh Baleg DPR hingga terhitung secara keseluruhan terjadi 64 rapat. Rapat menjadi semakin intens hingga dibuka pada pukul 21.00 pada hari jumat 2 oktober dan selesai pada sabtu dini hari 3 oktober 2020. Kemudian, pada tanggal 5 oktober diadakan rapat paripurna yang membahas sekaligus mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.

Hal inilah yang memicu kemarahan rakyat karena seakan-akan tergesa-gesa dan tidak memedulikan suara rakyat. Puncaknya setelah disahkan pada tanggal 5 oktober 2020, terjadi demo besar-besaran yang terjadi di hampir seluruh kota di



Indonesia. Aksi massa yang terjadi merupakan bentuk kemarahan dan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Bahkan aksi massa sempat diwarnai kericuhan antara massa aksi dengan pihak kepolisian di beberapa kota di Indonesia.

Pro-kontra yang hadir pada fenomena pengesahan UU Cipta Kerja tidak lepas dengan wacana yang dihadirkan oleh media massa. Fenomena seperti ini meletakkan peran jurnalisme sangat penting dalam menjaga nalar masyarakat.

Sebagai penyampai informasi kepada masyarakat umum, media pers memegang peran sebagai pembentuk realitas. Hamad (2001, hal.1) mengungkapkan bahwa “kemampuan yang dimiliki media massa untuk menentukan realitas di benak khalayak, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan menciptakan opini publik (*propaganda politik, promosi, public relations*)”. Wacana yang dibentuk oleh media massa dapat memicu terjadinya konflik, tergantung pada cara media menampilkan dan menyampaikan sebuah berita. Hal ini menunjukkan bahwa media massa sebagai kontrol sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini publik melalui wacana yang ditampilkan.

Wacana adalah bentuk simbolisasi yang merepresentasikan dunia sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Haryatmoko (2016: 4) menyatakan bahwa “wacana adalah praksis sosial dalam bentuk interaksi simbolis yang bisa terungkap dalam pembicaraan, tulisan, kial, gambar, diagram, film, atau musik.”, Dalam paradigma kritis, media pers merupakan entitas yang dapat dikuasai oleh kelompok yang lebih dominan (Eriyanto, 2001: 23). Oleh sebab itu, wacana yang dihadirkan oleh masing-masing media massa selalu berbeda, tergantung pada kelompok dominan yang menguasai media massa tersebut.

Ada banyak media massa yang memberitakan UU Cipta Kerja secara kontinu, salah satunya adalah *Tirto.id*. *Tirto.id* adalah salah satu media massa elektronik yang menjunjung data, fakta, serta etika jurnalistik dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui penghargaan yang didapatkan *Tirto.id* pada tahun 2018, yaitu menjadi satu-satunya media yang mendapatkan *badge* dari IFCN (Suluh dan Ade Armando, 2018).

Terdapat 13 berita mengenai UU Cipta Kerja yang disajikan oleh *Tirto.id* dalam lamannya. Jumlah tersebut terhitung sejak awal oktober tentang isu mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja yang mendadak hingga terjadi aksi massa di berbagai kota di Indonesia. Berikut disajikan judul berita yang telah dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan penelitian beserta tanggal terbitnya.

**Tabel 1.1 Daftar Judul Berita**

No	Judul	Tanggal
1.	Tok! RUU Cipta Kerja Rampung Dibahas, Tinggal disetujui Paripurna	3 Oktober 2020
2.	Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh akan Demo dan Mogok Masaal pada 6-8 Oktober	4 Oktober 2020
3.	Buruh Diabaikan, Pertanda Omnibus Law Adalah Agenda Elite Politik Belaka	5 Oktober 2020
4.	Daftar Pasal Bermasalah dan Kontroversi Omnibus Law RUU Cipta Kerja	5 Oktober 2020
5.	Masih ada waktu hentikan RUU Cipta Kerja	5 Oktober 2020
6.	Kenapa RUU Cipta Kerja Ditolak dan Rencana Demo Omnibus Law	5 Oktober 2020
7.	UU Ciptaker Longgarkan Sanksi Pidana Pelanggar Lingkungan Hidup	7 Oktober 2020



8	Fakta Omnibus Law yang Disahkan 5 Oktober	7 Oktober 2020
9	Skandal DPR dan Pemerintah Jokowi Mengesahkan RUU Cipta Kerja	14 Oktober 2020
10	Kronologi Omnibus Law Disahkan Hingga Jokowi Terima UU Cipta Kerja	15 Oktober 2020
11	Demo Tolak Omnibus Law Relawan Medis Juga korban Kebrutalan Polisi.	15 Oktober 2020
12	Soal Omnibus Law, Polri tak Bersama Rakyat, Ia Bersama Penguasa	19 Oktober 2020
13	Omong Kosong transparansi DPR dan Pemerintah Soal RUU Cipta Kerja	19 Oktober 2020

Dalam lamannya, Tirto.id memberikan kumpulan berita khusus untuk mencari berita dengan tema RUU Cipta Kerja dalam satu halaman. Dalam mengemas sebuah berita dalam satu halaman khusus, Tirto.id sudah menunjukkan adanya perhatian kepada fenomena Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Oleh sebab itu, peneliti memilih berita yang terkait dengan RUU Cipta Kerja pada laman Tirto.id sebagai bahan penelitian.

Adapun alasan dipilihnya Tirto sebagai sumber data pada penelitian kali ini, yaitu alasan praktis dan akademis. Secara praktis, dipilihnya Tirto.id menjadi sumber berita ialah kemudahan akses untuk membaca berita. Hal ini memudahkan setiap orang membaca berita pada laman Tirto.id. Selain itu, terdapat alasan akademis, yaitu teks yang disajikan oleh Tirto.id adalah teks dengan genre berita dan rekam jejak Tirto.id yang cemerlang di usia yang baru 4 tahun serta penyampaian berita yang disertai dengan statistik dan infografik membuatnya diakui akan kredibilitasnya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teks dengan

genre berita dikarenakan teks berita adalah salah satu jenis teks yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga, dalam praktiknya terjadi persebaran ideologi media massa kepada masyarakat luas.

Teks, sebagai unsur utama dalam penelitian ini, tidak hanya dianalisis dari piranti-piranti linguistik saja, akan tetapi keterkaitannya dengan konteks. Oleh sebab itu, teks berita yang disajikan oleh Tirto.id akan dikaitkan dengan konteks di luar teks yang mempengaruhi proses produksi teks. Kemudian, penelitian ini akan difokuskan pada pola-pola kebahasaan yang dibentuk dari relasi dan konteks sosial tertentu (Eriyanto, 2012, hal. 285).

Kemudian, peneliti memilih Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough sebagai pisau bedah dalam menganalisis teks berita yang disajikan oleh Tirto.id karena tahapan yang dilalui memudahkan peneliti dalam mengkaji data berupa teks berita. Selain itu, Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough digunakan untuk membuka perpektif yang lebih luas terkait sebuah fenomena yang disajikan terhadap sebuah pembertaan. Pemikiran kritis yang dikembangkan Fairclough berusaha untuk mengungkap ketidakberesan yang terjadi di lingkungan sosial.

Norman Fairclough mengklasifikasikan tahap analisisnya dalam tiga tahapan, yaitu: analisis teks, analisis *discourse practice*, dan analisis *sociocultural practice*.

Namun, sebelum masuk ke tahapan analisis yang lebih dalam, dilakukan analisis deskripsi yang mencakup kosakata, gramatikal, dan struktur teks. Dalam tahap analisis deskripsi, peneliti menggunakan teori metafungsional Halliday untuk menguraikan pola dan pilihan leksikogramatika yang digunakan. Selain itu, teori metafungsional juga digunakan untuk memetakan pilihan bahasa yang digunakan



Tirto.id dalam merepresentasikan subjek dalam berita. Berikut adalah tahapan analisis beserta contohnya menggunakan Analisis Wacana Norman Fairclough.

Pada tahap pertama dilakukan analisis teks yang terdiri dari representasi, relasi dan identitas. Pada tahap representasi Fairclough memfokuskan pada bagaimana aktor dan peristiwa ditampilkan dalam sebuah teks. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata pada judul **Skandal DPR dan Pemerintah Jokowi Mengesahkan**

**RUU Cipta Kerja**. Tirto.id merepresentasikan bahwa pengesahan UU Cipta Kerja yang dilakukan merupakan sebuah perbuatan yang memalukan. Hal ini dilakukan dengan menyematkan kata **Skandal** sebelum **DPR dan Pemerintah Jokowi** yang memiliki peran untuk mengesahkan UU Cipta Kerja. Kemudian pada tahap relasi melihat bagaimana hubungan antara partisipan dalam media dan bagaimana partisipan ditampilkan dalam teks.

*Pada Senin pekan lalu itu, tak ada yang mengira Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Ia maju dari kabar semula, yang rencananya disahkan pada 8 Oktober. Tanggal inilah yang dipegang oleh kalangan masyarakat sipil. Serikat-serikat buruh, mahasiswa, petani, dan banyak elemen masyarakat prodemokrasi lain berencana menggelar demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja ke Senayan saat DPR menggelar rapat paripurna. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bahkan merencanakan mogok nasional dari 6-8 Oktober.*

*Rencana mogok dua hari menjelang pengesahan, menurut Presiden KSPI Said Iqbal, "semacam tetap memberikan ruang kepada pemerintah dan Panitia Kerja Badan Legislasi DPR agar masukan-masukan serikat buruh itu didengar." (Tirto-4)*

Pada kutipan di atas, partisipan yang ditampilkan adalah serikat buruh, masyarakat sipil, mahasiswa dan petani. Sehingga dalam kutipan tersebut, pembaca dihubungkan dengan rakyat yang menolak UU Cipta Kerja. Kemudian pada tahap identitas melihat bagaimana identitas wartawan ditampilkan dalam sebuah berita.



Dari kutipan di atas, wartawan mengidentifikasi rakyat yang menolak UU Cipta Kerja sebagai orang yang tertipu karena tidak menyangka pengesahaan UU Cipta Kerja akan dilakukan secepat itu.

Kedua, analisis *discourse practice* melihat pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Hal ini erat kaitannya antara ideologi wartawan dan media yang menaunginya. Sebelum menjadi sebuah berita, informasi yang didapatkan mengalami beberapa proses hingga menjadi berita. Tirto.id memiliki visi Jernih, Mengalir, Mencerahkan serta berdiri di atas dan untuk semua golongan. Tirto.id juga tidak bekerja untuk kepentingan politik manapun. Selain itu, dalam situsnya, Tirto.id menyampaikan bahwa pendanaan dilakukan secara mandiri oleh Sapto Anggoro. Hal ini menunjukkan bahwa Tirto adalah media yang independen serta tidak diatur oleh lembaga lain di luar Tirto.id.

Ketiga, analisis *sociocultural practice* melihat bahwa berita yang ditampilkan memiliki pengaruh dari pihak di luar media. Fairclough membaginya ke dalam tiga tahapan, yaitu Tingkat situasional, institusional, dan sosial. Pada tahap situasional, setiap media massa akan mengangkat sebuah fenomena atau peristiwa yang mempunyai nilai berita, salah satunya adalah berita mengenai politik. Kondisi politik yang terjadi memperlihatkan kekritisn masyarakat dalam menyikapi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan demonstrasi yang dilakukan masyarakat ketika pemerintah dirasa merugikan rakyat. Pada tahap institusional, ada banyak pihak yang terlibat dalam permasalahan UU Cipta Kerja, yaitu DPR dan Pemerintah Jokowi sebagai pembuat UU Cipta Kerja dan serikat buruh, masyarakat sipil, mahasiswa dan petani sebagai pihak yang menolak UU Cipta Kerja. Dalam



pemberitaannya, Tirto lebih menunjukkan informasi dari kelompok penolak UU Cipta Kerja. Terakhir, pada tahap sosial, masyarakat memiliki pengaruh dalam hal sosial dan kultural. Dengan adanya mogok kerja dan demonstrasi besar-besaran menjadi penanda bahwa terjadi ketimpangan sosial. Tirto.id berusaha menggiring opini pembaca terkait adanya skandal dalam pengesahan UU Cipta Kerja dan berusaha untuk menyuarakan persepsi serikat buruh seperti dalam pemberitaan

### ***Skandal DPR dan Pemerintah Jokowi Mengesahkan RUU Cipta Kerja***

Dalam menyusun penelitian ini, terdapat penelitian sebelumnya sebagai rujukan dalam merancang konsep penelitian ini. Terdapat 3 penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan. Pertama, *Citra Publik Presiden Republik Indonesia Pada Pemberitaan Di Harian Suara Merdeka, Tabloid Tempo, Dan Harian Republika : Kajian Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough* karya Gallant Karunia Assidik dan B.Wahyudi Joko Santoso pada tahun 2016. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Harian Suara Merdeka dan Harian Republika juga condong ke pembentukan citra positif Presiden, sedangkan Tabloid Tempo condong ke pembentukan citra negatif bagi Presiden. Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai referensi disebabkan adanya kesamaan tujuan, yaitu mencitrakan tokoh sebagai cerminan ideologi media. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana media mencitrakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam UU Cipta Kerja.

Penelitian kedua yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah *Kasus Pembubaran Upacara Odalan di Bantul Yogyakarta: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan CNNIndonesia.com dan Solopos.com* oleh Anggun Putri Aminatul Musrichah pada tahun 2020. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa



*CNNIndonesia.com* berpihak pada kelompok penyelenggara upacara odalan, sedangkan *Solopos.com* berpihak pada kelompok warga yang menolak. Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai referensi disebabkan adanya kesamaan tokoh, yaitu kelompok dominan dan minoritas. Dalam penelitian ini terdapat kelompok penguasa yang terdiri dari pemerintah, DPR, dan pengusaha, dan kelompok tertindas yang terdiri dari buruh dan mahasiswa.

Kemudian, penelitian ketiga yang menjadi acuan dalam menyusun penelitian ini adalah *Upaya Agensi Melawan Logika Jangka Pendek Jurnalisme Daring: Studi Kasus Tirto.id* oleh Suluh Gembyeng Ciptadi & Ade Armando pada tahun 2018, hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi redaksi yang dilakukan *Tirto.id* berupa berita panjang, mendalam, *cover both sides*, dan penuh data merupakan upaya untuk membangun peradaban literasi daring di Indonesia. Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai referensi disebabkan adanya kesamaan subjek penelitian, yaitu *Tirto.id*. Namun, dalam penelitian ini, peneliti mengkaji *Tirto.id* dari segi teks yang sudah diberitakan.

Berdasarkan tiga penelitian di atas, peneliti mengambil pembentukan citra, pertentangan kelompok penguasa dan tertindas, serta *Tirto.id* sebagai rancangan penelitian yang baru. Kemudian, penelitian ini memiliki kebaruan berupa fokus pemberitaan oleh media yaitu, UU Cipta Kerja. Selain itu, untuk mengkaji teks berita tentang UU Cipta Kerja, peneliti menggunakan kajian Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Penelitian mengenai UU Cipta Kerja ini penting dilakukan karena menyangkut isu penindasan pada buruh dan kaum pekerja yang merupakan isu sensitif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.



Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan AWK Norman Fairclough sebagai pisau bedah menelaah dan mengejawantahkan temuan linguistik, *discourse practice*, dan *sociocultural practice* untuk mengungkap ideologi yang dipegang *Tirto.id* dalam menyajikan pemberitaan UU Cipta Kerja.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana teks dan struktur teks *Tirto.id* dalam menyampaikan berita?
- 2) Bagaimana pola hubungan produksi dan konsumsi yang dilakukan *Tirto.id* dalam menyampaikan berita?
- 3) Bagaimana konteks sosial, politik, dan ekonomi mempengaruhi *Tirto.id* dalam menyampaikan berita?

## 1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan teks dan struktur teks yang digunakan *Tirto.id* dalam menyampaikan berita
- 2) Mendeskripsikan pola hubungan produksi dan konsumsi yang dilakukan *Tirto.id* dalam menyampaikan berita
- 3) Mendeskripsikan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi *Tirto.id* dalam menyampaikan berita

## 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara langsung atau tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1) Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi keilmuan tentang Analisis Wacana Kritis. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu untuk memecahkan masalah dalam bidang bahasa, terutama yang berkaitan dengan analisis wacana dan teks berita.

### 2) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumber pencerahan dan acuan untuk mengkaji teks berita menggunakan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran di kelas terkait dengan analisis teks berita.

### 3) Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penelitian ini bisa menjadi gambaran penelitian Analisis Wacana Norman Fairclough secara analisis dan teoritis.

Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan pijakan pada penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough.

## 1.5. Definisi Istilah Kunci

**Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough:** Norman Fairclough (dalam Eriyanto (2001, hal.7) melihat wacana merupakan bentuk praktik sosial yang menyebabkan adanya hubungan antara peristiwa dengan konteks sosial yang membentuknya.



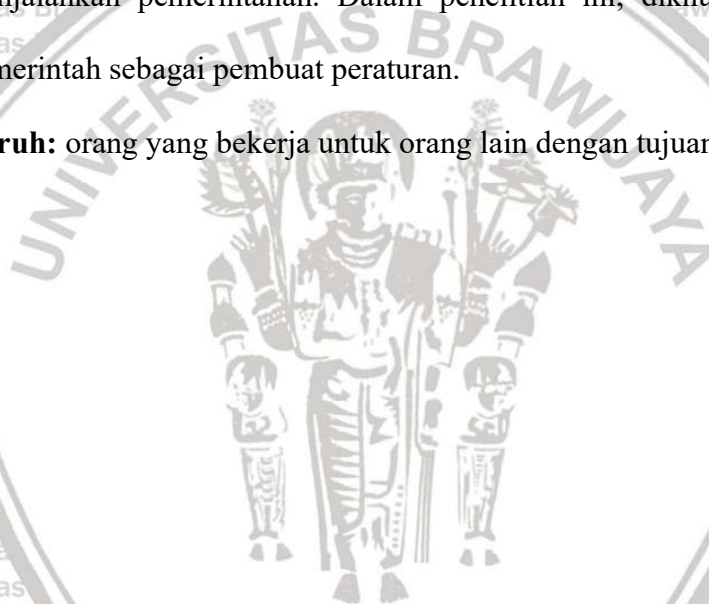
**Media Massa:** sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas;

**Tirto.id:** media pers daring yang sudah terdaftar di Dewan Pers Indonesia, serta didanai secara independen.

**UU Cipta Kerja:** Undang-undang Omnibus Law yang pertama kali disahkan, tepatnya pada tanggal 5 Oktober.

**Pemerintah:** Sistem dalam suatu negara yang memiliki tugas mengatur dan menjalankan pemerintahan. Dalam penelitian ini, dikhususkan pada wewenang pemerintah sebagai pembuat peraturan.

**Buruh:** orang yang bekerja untuk orang lain dengan tujuan mendapatkan upah.



## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### 2.1. Media Massa

Media massa merupakan jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dengan sebuah fenomena. Dalam hal ini, terjadi proses penggunaan media massa untuk mengirim informasi kepada khalayak luas dengan tujuan tertentu. Media massa memiliki peran untuk menangkap suatu fenomena dan mengemasnya menjadi sebuah teks berita kemudian disebarakan kepada khalayak. Selain itu, media massa juga memiliki peran sebagai kontrol sosial. Lebih dalam, peran kontrol sosial yang dimiliki oleh media massa diwujudkan dalam mengonstruksi realitas yang terjadi. Dengan demikian, fenomena yang terjadi dikonstruksi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada khalayak umum.

Pengonstruksian berita juga bentuk dari cerminan ideologi dalam diri wartawan. Menurut Eriyanto (2001: 23), media pers merupakan entitas yang dapat dikuasai oleh kelompok yang lebih dominan. Oleh sebab itu, informasi yang disampaikan oleh media massa merupakan bentuk penyebaran ideologi sesuai dengan kepentingannya. Namun, seringkali media massa lebih menampilkan kelompok yang lebih dominan dalam teks yang disajikan. Sebagaimana dikatakan oleh Janet Woollacoot yang dikutip oleh Eriyanto (2001, hal.37) bahwa “media bukanlah sarana yang netral yang menampilkan kekuatan dan kelompok dalam masyarakat secara apa adanya, tetapi kelompok dan ideologi yang dominan itulah yang akan tampil dalam pemberitaan.”



Seiring dengan berkembangnya jaman, media massa yang awalnya berupa cetak kini bertransformasi dalam bentuk digital. Hal ini mengubah pola masyarakat menjadi haus informasi, sebab segala sesuatu bisa didapatkan dengan mudah.

Menurut Terry Flew yang dikutip oleh Widji Agustini Sasmita (2019) mengungkapkan bahwa “media digital merupakan media yang konteknya mempunyai beberapa gabungan data, teks, suara, serta berbagai macam-macam gambar yang disimpan dalam format digital dan penyebarannya melalui jaringan berbasis kabel optic *broadband*, satelit dan sistem transmisi gelombang mikro.”

Dalam sebuah riset, di Indonesia dengan populasi 268 juta, memiliki jumlah pelanggan seluler mencapai angka 355.5 juta dan pengguna internet sebanyak 150 juta, artinya banyak orang memiliki lebih dari satu telepon seluler. We Are Social mengklaim bahwa 133 persen orang Indonesia memiliki ponsel dan 56 persen menjadi pengguna internet (Asyir dan Nurbaya, 2019). Transformasi yang terjadi pada media massa merupakan salah satu cara mendistribusikan fenomena yang telah direkam menjadi berita. Selain itu, hal ini bertujuan untuk mempertahankan posisinya agar tetap relevan dengan konsumen.

Pada kenyataannya, ada beberapa media massa cetak yang beralih menjadi media massa daring, salah satunya ialah Majalah Rolling Stone beribah menjadi media daring pada Bulan Juni 2017 (Nuran Wibisono, 2018). Media massa daring menjadi daya tarik tersendiri pada masyarakat karena lebih cepat dan ringkas. Oleh sebab itu, banyak media massa yang memutuskan untuk beralih ke media daring atau melebarkan sepak terjangnya menjadi media cetak dan daring.

## 2.2. Tirto.id

*Tirto.id* menjadi salah satu media massa jurnalistik yang berdiri pada era teknologi yang semakin gencar. Tepatnya, pada tahun 2016 *Tirto.id* didirikan oleh Sapto Anggoro yang juga merupakan Pimpinan Redaksi dan CEO. Nama Tirto diambil dari nama Bapak Pers Nasional, Tirto Adhi Soerjo, dan penggunaan kode *.id* sebagai domain Indonesia dalam jaringan internet merupakan bentuk dari semangat yang diusung Tirto Adhi Soerjo sebagai sang pemula dalam jurnalisme di Indonesia.

*Tirto.id* menyajikan konten tulisan yang meliputi *Indepht*, *Mild Report*, *Current Issue*, Periksa Data dan Mozaik. *Tirto.id* memilih untuk menyajikan berita dengan data dan fakta yang aktual dan faktual. Hal itu didukung dengan adanya karyawan yang mahir dalam bidang ilmu-ilmu sosial, penulisan jurnalistik, riset dan olah statistik. Selain dari tim riset sendiri, *Tirto.id* juga menggunakan hasil analisis dari berbagai media di Indonesia yang dipadatkan ketika membicarakan tokoh, lembaga, dan kasus dalam laporan yang mendalam

Pendanaan *Tirto.id* dilakukan secara independen oleh Sapto Anggoro (CEO), Teguh Budi Santoso (*Chief Content Officer*) dan Nur Samsi (*Chief Technology Officer*), sehingga tidak ada pihak luar yang menintimidasi kerja jurnalistik yang dilakukan oleh *Tirto.id*. Kemandirian dan etos kerja jurnalistik inilah yang membuat Tirto mampu menjadi salah satu media massa yang memiliki kredibilitas tinggi. Hal ini dibuktikan melalui penghargaan yang didapatkan *Tirto.id* pada tahun 2018, yaitu menjadi satu-satunya media yang mendapatkan *badge* dari IFCN



(International Fact Checking Network). IFCN merupakan media nirlaba yang menilai media-media yang kredibel di seluruh dunia.

### 2.3. Analisis Wacana Kritis

Haryatmoko (2016: 4) menyatakan bahwa “wacana adalah praksis sosial dalam bentuk interaksi simbolis yang bisa terungkap dalam pembicaraan, tulisan, kial, gambar, diagram, film, atau musik.” Dengan demikian, wacana dapat diartikan sebagai interaksi semiotik yang digambarkan oleh realita. Analisis Wacana Kritis membahas bagaimana wacana direpresentasikan oleh sebuah media melalui teks yang disajikan kepada khalayak. Teks dianalisis tidak hanya dari piranti-piranti keahsaannya saja, akan tetapi juga konteks yang berada di luar teks.

UU Cipta Kerja erat kaitannya dengan Buruh dan Pemerintah, Oleh sebab itu, dipilih Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough untuk mengungkapkan permasalahan ketidakadilan, ketimpangan, dan diskriminasi yang terjadi melalui wacana yang ada dalam teks berita. Perkembangan yang dilakukan oleh Norman Fairclough dalam mempertajam dimensi dan metode dalam menganalisis suatu wacana. Menurut Fairclough dalam Haryatmoko (2016, hal. 23) “Analisis Wacana Kritis harus memperhatikan tiga dimensi, yaitu: teks, praktik diskursif, dan praksis sosial.” Ketiga dimensi tersebut merupakan kesatuan yang saling berkaitan.

#### 2.3.1. Teks

Pada dimensi teks, Fairclough memfokuskan pada semua unsur yang mengacu ke pembicaraan dan semua bentuk linguistik dalam teks, dari leksikal hingga gramatikal. Dalam hal ini, teks dilihat dari penggunaan kosakata yang disematkan pada subjek atau objek dalam sebuah pemberitaan. Hal ini erat kaitannya dengan

citra yang ingin disematkan kepada publik terhadap sebuah subjek atau objek dalam sebuah berita. Begitu juga pada tingkat struktur teks secara keseluruhan. Cara media menyampaikan sebuah berita adalah bentuk bagaimana media massa menyusun argumen dalam membenarkan berita yang ditulis. Fairclough membagi analisis teks ke dalam tiga elemen dasar, yang meliputi: representasi, relasi, dan identitas.

Representasi melihat bagaimana seorang aktor dan sebuah peristiwa ditampilkan dalam sebuah teks melalui pilihan bahasa yang digunakan (Eriyanto, 2001: hal.290). Fairclough dalam Eriyanto (2001: hal.290) mengungkapkan bahwa “ketika sesuatu ditampilkan, pada dasarnya pemakai bahasa dihadapkan pada dua pilihan: yaitu pada tingkat kosakata dan pada tingkat tata bahasa.” Pada tingkat kosakata, Fairclough melihat pada pilihan kata yang digunakan untuk menggambarkan aktor dan peristiwa. Kemudian, pada tingkat tata bahasa Fairclough memusatkan pada bagaimana aktor dan peristiwa ditampilkan dalam sebuah struktur teks, baik sebagai tindakan maupun bentuk partisipan (Eriyanto, 2001: 292). Dalam hal ini, penting untuk melihat bagaimana aktor ingin ditampilkan oleh sebuah media, apakah ditampikan dalam bentuk tindakan, peristiwa, keadaan, ataukah proses mental. Struktur gramatikal yang berbeda akan mempengaruhi pemakai bahasa dalam memaknai sebuah teks.

Kemudian, representasi dalam kombinasi anak kalimat merupakan gabungan antara anak kalimat satu dengan anak kalimat yang lain juga erat kaitannya dengan makna yang ingin disampaikan. Eriyanto (2001: 294) menyatakan bahwa “gabungan antar kalimat ini akan membentuk sebuah koherensi lokal, yakni pengertian akan didapat dari gabungan anak kalimat satu dengan yang lain,



sehingga kalimat itu mempunyai arti.” Dalam praktiknya, koherensi antar kalimat ini memiliki beberapa bentuk, yaitu: (1) Elaborasi yang memiliki bentuk anak kalimat kedua menjadi penjelas bagi anak kalimat pertama; (2) Perpanjangan yang memiliki bentuk anak kalimat satu merupakan perpanjangan anak kalimat yang lain. Bentuk perpanjangan dapat ditandai dengan adanya penggunaan kata hubung “dan”, kontras yang menggunakan kata tambahan “tetapi”, “meskipun”, dan “akan tetapi”, serta (3) mempertinggi yang mana anak kalimat yang satu memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan anak kalimat yang lain. Pembentukan kalimat ini akan berpengaruh pada pemaknaan yang dilakukan oleh pembaca.

Selanjutnya, pada tahap representasi dalam rangkaian antarkalimat melihat bagaimana penyusunan dan perangkaian dua kalimat atau lebih. Dalam hal ini, penting untuk melihat bagaimana sebuah kalimat dalam sebuah teks lebih dominan dibandingkan kalimat yang lain (Eriyanto, 2001, hal. 296). Salah satunya adalah bagaimana posisi partisipan ditampilkan dalam sebuah teks. Terdapat tiga bentuk yang digunakan dalam menampilkan sebuah pernyataan, yaitu secara langsung, dengan cara meringkas, atau dengan cara dievaluasi. Perbedaan bentuk dalam penyampaian sebuah pernyataan akan berpengaruh pada pemaknaan yang dilakukan oleh pembaca.

Eriyanto (2001, hal 300) mengungkapkan bahwa “relasi berhubungan dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks”. Pola hubungan antara wartawan dengan partisipan dapat dilihat melalui peran partisipan dalam sebuah teks. Media massa merupakan ruang sosial bagi seluruh khalayak untuk menyampaikan gagasan dan pendapat. Eriyanto (2001, 301-303)

menyampaikan bahwa analisis hubungan ini penting dalam dua hal, yaitu: (1) melihat bagaimana kekuatan-kekuatan sosial yang ada di masyarakat ditampilkan dalam teks. (2) melihat bagaimana khalayak ditempatkan dalam pemberitaan.

Kemudian, identitas melihat bagaimana wartawan meosisikan dirinya dalam sebuah teks beritra (Fairclough dalam Eriyanto, 2001, hal 303). Lebih dalam, bagaimana identitas wartawan ditampilkan dapat dilihat dari keterlibatannya dalam sebuah teks pemberitaan. Pengidentifikasi ini akan menentukan bagaimana wartawan menampilkan sebuah wacana kepada khalayak umum, Secara sederhana ketiga elemen tersebut dirangkum oleh Eriyanto (2001: 289) dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1 Uraian Aspek-aspek dalam Analisis Teks**

UNSUR	YANG INGIN DILIHAT
<b>Representasi</b>	Bagaimana peristiwa orang kelompok situasi keadaan atau apapun yang ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
<b>Relasi</b>	Bagaimana hubungan antar wartawan dan khalayak dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks
<b>Identitas</b>	Bagaimana identitas wartawan khalayak dan partisipan ditampilkan dan digambarkan dalam teks.

### 2.3.1.1 Linguistik Sistemik Fungsional Halliday

Analisis wacana kritis erat kaitannya dengan aliran fungsional yang dikembangkan oleh Halliday. Hal ini dapat dilihat dari konsep dan prinsip-prinsip analisis wacana kritis yang diturunkan dari pendapat Halliday. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa analisis wacana kritis mengikutsertakan analisis deskriptif sebagai dasar dari analisis yang lebih luas. Salah satu tokoh analisis wacana kritis yang menggunakan linguistik sistemik fungsional sebagai



landasan dalam teorinya adalah Norman Fairclough. Ia beranggapan bahwa bahasa dalam bentuknya sebagai teks, yang diakuinya sama dengan pandangan Halliday, merupakan praktik sosial (Fairclough dalam Wiratno, 2018 :379).

Dalam penelitian ini, peneliti memakai teori metafungsional yang dikembangkan Halliday sebagai analisis deskriptif yang ditujukan untuk mengurai, mengelompokkan dan melihat pilihan kata yang digunakan dalam teks. Wiratno (2018: 147) mengungkapkan bahwa “makna metafungsional adalah makna yang secara simultan dibangun dari tiga fungsi bahasa, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual”.

Makna ideasional mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman lahir atau batin penutur atau penulis. Lebih dalam, Wiratno (2018, hal. 150) mengungkapkan bahwa “makna ideasional ialah makna yang tercipta sebagai hasil dari unsur-unsur leksikogramatika yang digunakan untuk memahami alam sekitar dan untuk mengorganisasi pengalaman penutur atau penulis tentang dunia nyata atau rekaan”.

Makna interpersonal mengungkapkan bentuk peran sosial yang terdapat dalam bahasa. Seperti yang diungkapkan oleh Wiratno (2018: 150) bahwa “makna interpersonal adalah makna yang tercipta sebagai hasil dari realisasi unsur-unsur leksikogramatika yang digunakan untuk melakukan aksi terhadap orang lain. Unsur tersebut berfungsi untuk menyatakan, meapankan, dan menjaga hubungan sosial di antara para pengguna bahasa”.

Makna tekstual merupakan gabungan dari makna ideasional dan makna interpersonal. Martin dalam Wiratno (2018: 150) mengungkapkan bahwa

“makna tekstual adalah makna sebagai hasil dari realisasi unsur-unsur leksikogramatika yang menjadi media terwujudnya sebuah teks, baik tulis maupun lisan, yang runtut dan yang sesuai dengan situasi tertentu pada saat bahasa itu dipakai dengan struktur yang bersifat periodik”. Dengan demikian, makna tekstual di sini menyoal bagaimana sebuah teks itu ditata dan dimediakan sehingga tercipta sebagaimana wujudnya.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada transtivitas, struktur mood, dan struktur tema-remas. Hal ini dilakukan untuk dapat menjelaskan dan menginterpretasikan teks secara ideasional, interpersonal, dan tekstual.

### 2.3.2. Analisis Discourse Practice

Pada analisis *discourse practice* (praktik diskursif) memusatkan perhatiannya pada bagaimana pola produksi dan konsumsi teks dalam sebuah media massa (Eriyanto, 2001, hal.316). dalam hal ini, strategi redaksi dalam sebuah media menentukan bagaimana teks diproduksi. Fairclough dalam Eriyanto (2001: 317). membaginya menjadi dua sisi, yaitu produksi teks dan konsumsi teks.

Pola produksi dan konsumsi erat kaitannya dengan berbagai jaringan kompleks yang melibatkan berbagai aspek dalam praktik diskursif. Eriyanto (2001, hal.317) mengungkapkan bahwa terdapat tiga aspek penting, yaitu (1) individu wartawan, (2) hubungan antara wartawan dengan struktur organisasi, (3) praktik kerja dalam sebuah media. Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan dalam membentuk praktik wacana dalam suatu media.



### 2.3.3. Analisis Sociocultural Practice

Pada sebuah wacana selalu erat kaitannya dengan berbagai tingkatan yang ada dalam sebuah masyarakat. Lebih dalam, menurut Eriyanto (2001, hal 320) analisis *sociocultural practice* melihat wacana yang muncul dalam media massa turut dipengaruhi oleh konteks sosial yang ada di luar media.

Konteks sosial tidak berkelindan secara langsung dengan proses produksi teks.

Namun, turut mempengaruhi bagaimana teks diproduksi dan dipahami. Sejalan dengan hal tersebut, Fairclough berpendapat bahwa hubungan tersebut dimediasi oleh *discourse practice*. Mediasi yang dimaksudkan oleh Fairclough meliputi dua hal, yaitu 1) bagaimana ideologi tersebut mewujud dalam ruang-ruang kerja dan menghasilkan berita dengan ideologi tertentu. 2) khalayak akan menerima dan mengkonsumsi teks tersebut dengan ideologi yang sama.

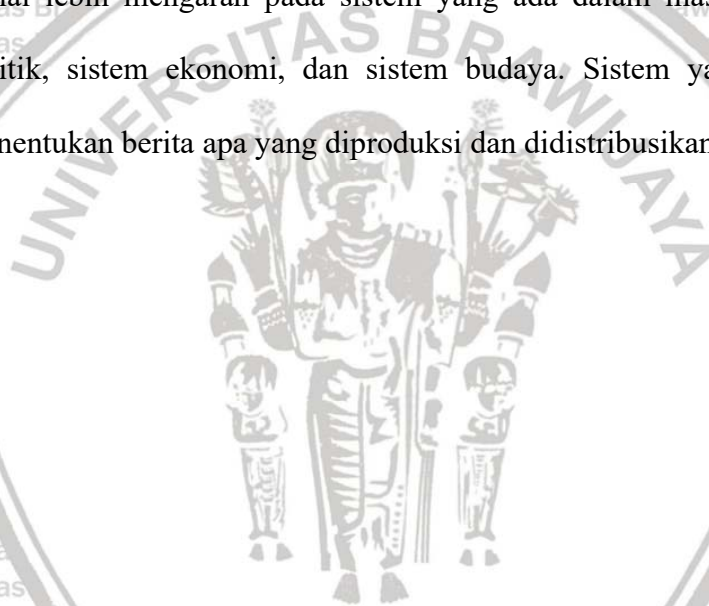
Hal inilah yang menjadikan media massa sebagai pemertahanan dan penyebaran suatu ideologi. Sebab, ideologi yang ada di masyarakat terus menerus direproduksi melalui media massa dan dikonsumsi oleh khalayak. Dalam menganalisis *sociocultural practice*, Fairclough membaginya menjadi 3 level: situasional, institusional, dan sosial.

Pada level situasional, perlu memperhatikan adanya konteks sosial ketika teks diproduksi. Sebuah teks bisa memiliki makna yang berbeda dengan teks lain dikarenakan adanya perbedaan konteks sosial yang melatar belakangi wacana tersebut.

Pada level institusional melihat bagaimana pengaruh institusi dan organisasi, baik di luar maupun di dalam media, mempengaruhi praktik pemroduksian wacana.

Salah satu institusi di luar media massa yang mempengaruhi pemroduksian berita adalah instiusi yang berhubungan dengan pendanaan sebuah media. Selanjutnya, institusi politik juga dapat mempengaruhi keredaksian dan kebijakan yang dilakukan oleh media. Oleh sebab itu, media harus menjaga kenetralannya dari campur tangan pihak di luarnya dengan mengelola keuangan secara mandiri.

Pada level sosial melihat bahwa perubahan sosial dalam tatanan masyarakat menentukan bagaimana wacana yang muncul dalam media. Dalam hal ini, aspek sosial lebih mengarah pada sistem yang ada dalam masyarakat, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya. Sistem yang ada di masyarakat menentukan berita apa yang diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat.





## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan metodologi yang telah dipilih, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang dapat diamati (Bogden dan Taylor dalam Moloeng, 2000, hal.3).

Dalam hal ini, peneliti menjadi instrumen kunci yang terlibat sebagai pengumpul data dan penganalisis data. Kemudian, peneliti mendeskripsikan data yang sudah ditemukan dan diolah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Pendekatan ini memiliki tiga dimensi, yaitu analisis teks, analisis *discourse practice* dan analisis *sociocultural practice* (Eriyanto, 2001:286). Pada dimensi teks, teks dianalisis melalui penggunaan piranti-piranti linguistik, baik leksikal maupun gramatikal, menggunakan Linguistik Sistemik Fungsional yang dikembangkan oleh Halliday. Selanjutnya, pada tahap analisis praktik kewacanaan peneliti menghubungkan apa yang ditemukan dalam analisis teks dengan latar belakang media massa. Terakhir, pada tahap analisis *sociocultural practice*, hasil interpretasi pada tahap praktik wacana dikaitkan dengan konteks sosial yang terjadi, misalnya budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga dimensi AWK Norman Fairclough ini digunakan untuk mengupas nilai ideologis yang dipegang *Tirto.id* dalam teks yang disajikan.

### 3.2. Sumber Data dan Data

Menurut Arikunto (2013:172) sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Kemudian, ditetapkan sumber data dalam penelitian ini adalah teks yang ada pada situs berita daring, tepatnya *Tirto.id*. Teks yang dipilih akan digunakan untuk melihat ideologi *Tirto.id* dalam menyajikan berita perihal UU Cipta Kerja kepada khalayak umum. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks berita yang membahas tentang UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 3 oktober 2020 hingga 19 oktober 2020.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahap pengumpulan data yang nantinya akan dianalisis. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti memilih teknik simak dan catat. Teknik simak dipilih oleh peneliti untuk melihat data kebahasaan yang akan dipilih, sementara teknik catat digunakan peneliti untuk menetapkan serta mengkodifikasi data yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Setelah dilakukan penyimakan pada sumber data, berikut disajikan data berupa teks yang telah dipilih beserta tanggal terbitnya.

**Tabel 3.1 Daftar Judul Berita dan Tanggal Terbitnya**

No	Judul	Tanggal
1.	Tok! RUU Cipta Kerja Rampung Dibahas, Tinggal disetujui Paripurna	3 Oktober 2020
2.	Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh akan Demo dan Mogok Masaal pada 6-8 Oktober	4 Oktober 2020



3.	Buruh Diabaikan, Pertanda Omnibus Law Adalah Agenda Elite Politik Belaka	5 Oktober 2020
4	Daftar Pasal Bermasalah dan Kontroversi Omnibus Law RUU Cipta Kerja	5 Oktober 2020
5.	Masih ada waktu hentikan RUU Cipta Kerja	5 Oktober 2020
6	Kenapa RUU Cipta Kerja Ditolak dan Rencana Demo Omnibus Law	5 Oktober 2020
7	UU Ciptaker Longgarkan Sanksi Pidana Pelanggar Lingkungan Hidup	7 Oktober 2020
8	Fakta Omnibus Law yang Disahkan 5 Oktober	7 Oktober 2020
9	Skandal DPR dan Pemerintah Jokowi Mengesahkan RUU Cipta Kerja	14 Oktober 2020
10	Kronologi Omnibus Law Disahkan Hingga Jokowi Terima UU Cipta Kerja	15 Oktober 2020
11	Demo Tolak Omnibus Law Relawan Medis Juga korban Kebrutalan Polisi.	15 Oktober 2020
12	Soal Omnibus Law, Polri tak Bersama Rakyat, Ia Bersama Penguasa	19 Oktober 2020
13	Omong Kosong transparansi DPR dan Pemerintah Soal RUU Cipta Kerja	19 Oktober 2020

### 3.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan Analisis Wacana Kritis, tepatnya 3 dimensi yang dikembangkan oleh

Norman Fairclough, yaitu: analisis teks, analisis *discourse practice* dan analisis *sociocultural practice*. Secara lebih mendalam, berikut disajikan uraiannya.

### 3.4.1. Analisis Teks

Pada tahap analisis teks, dilakukan analisis yang melibatkan tiga unsur yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, yaitu representasi, relasi, dan identitas.

Namun, dalam penguraian, pengelompokan, dan pendeskripsian data, peneliti memilih teori metafungsional yang dikembangkan oleh Halliday yang meliputi makna ideasional, makna interpersonal, dan makna tekstual. Dalam praktiknya, peneliti memfokuskan pada transivitas (partisipan, proses, sirkumtansi), mood-residu, dan tema-remas. Selain itu, ada juga analisis dalam bentuk penggolongan klausa, yaitu termasuk klausa indikatif atau imperatif dengan fungsi memberi atau meminta.

Menurut Eriyanto (2001: hal.290) aspek representasi melihat bagaimana penggunaan bahasa oleh media dalam menampilkan citra seseorang, kelompok, peristiwa dalam sebuah teks, dalam hal ini bahasa yang dipilih. Sehingga pemakaian kosakata, tata bahasa, dan kohesi serta koherensi dalam teks memengaruhi realitas yang dihadirkan oleh media massa.

Kemudian pada tahap relasi erat hubungannya dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Terdapat tiga partisipan utama dalam media, yaitu wartawan, khalayak media, dan partisipan publik.

Analisis relasi ini melihat hubungan di antara ketiga partisipan tersebut untuk memahami relasi antara dominasi dan kekuasaan dalam masyarakat (Eriyanto, 2001: hal.300).

Terakhir pada tahap identitas, Fairclough dalam Eriyanto (2001, hal.304) melihat bagaimana wartawan memosisikan dan merepresentasikan dirinya



dalam sebuah wacana. Pengidentifikasian posisi wartawan dalam teks berita menunjukkan bagaimana wacana ingin ditampilkan oleh media.

### 3.4.2. Analisis Discourse Practice

Menurut Eryyanto (2001: hal.216) analisis *discourse practice* ini memusatkan perhatiannya pada bagaimana produksi dan konsumsi teks serta latar belakang media massa. Teks yang sudah disajikan kepada khalayak umum telah melewati praktik diskursus yang kompleks dan rumit. Fairclough membagi menjadi tiga aspek penting, yaitu: wartawan secara individu, hubungan antara wartawan dengan struktur organisasi, dan praktik kerja dalam sebuah media. Aspek-aspek tersebut memiliki keterkaitan dalam proses produksi sebuah wacana.

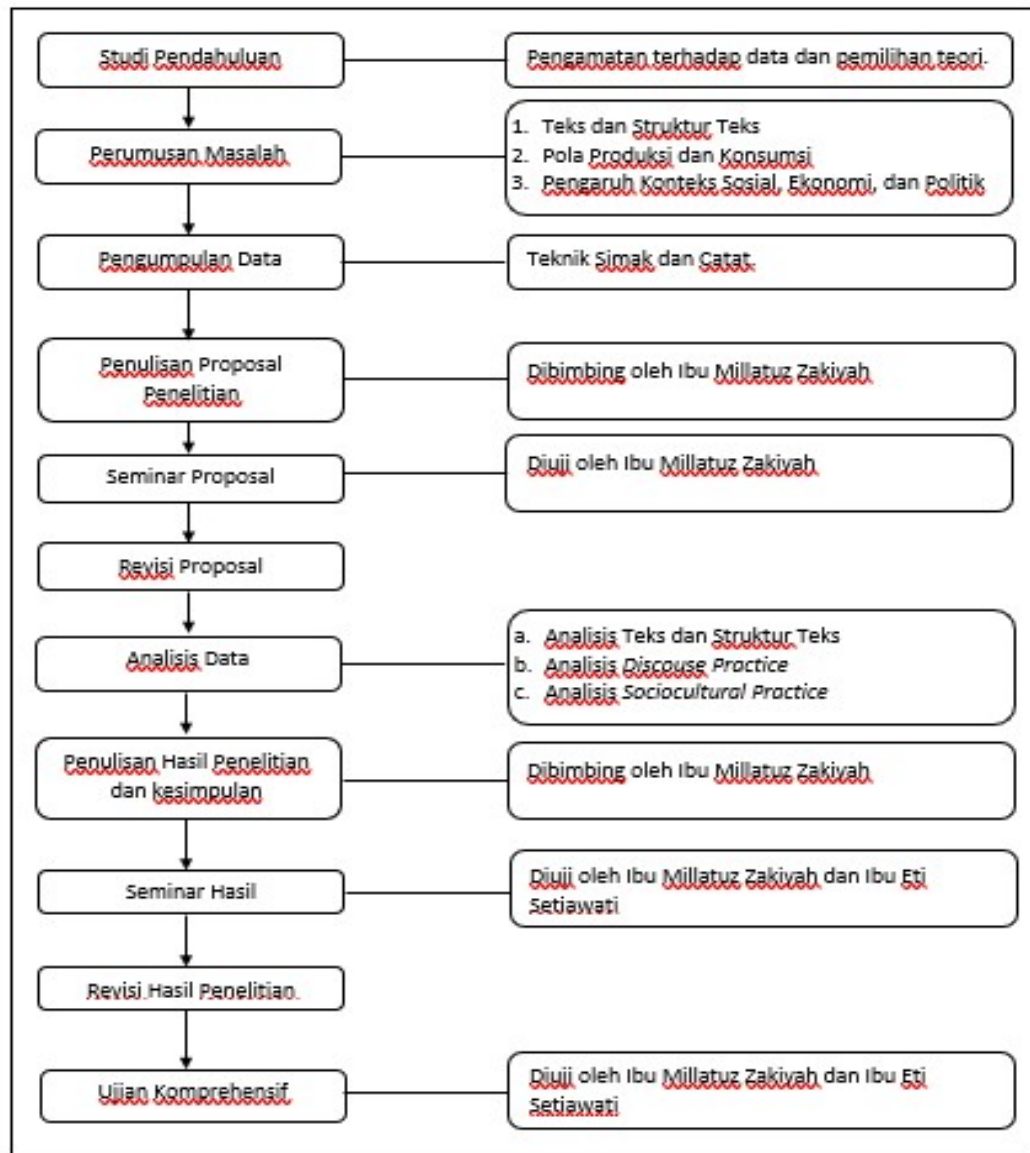
### 3.4.3. Analisis Sociocultural Practice

Analisis *sociocultural practice* melihat bahwa wacana yang muncul dalam media massa turut dipengaruhi oleh konteks sosial yang ada di luar media. (Eriyanto, 2001, hal.320). Lebih dalam, analisis ini tidak berkaitan langsung dengan produksi teks dalam sebuah media, tetapi turut mempengaruhi bagaimana teks diproduksi dan dipahami. Salah satunya adalah konteks sosial dan budaya di masyarakat menentukan bagaimana teks diproduksi. Fairclough dalam Eriyanto (2001, hal. 322) membuat tiga level analisis pada aspek *sociocultural practice*, yaitu: situasional, institusional, dan sosial.

### 3.5. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini ditetapkan prosedur penelitian agar dapat dilalui secara sistematis. Berikut disajikan bagan untuk mengetahui prosedur penelitian yang dilalui.

Gambar 3.1 Alur Prosedur Penelitian



Berdasarkan bagan yang sudah disajikan di atas, berikut dijelaskan lebih rinci terkait prosedur penelitian. Pertama, peneliti melakukan studi pendahuluan terkait data penelitian dan teori yang akan digunakan. Dalam hal ini, peneliti menentukan data penelitian, yaitu teks berita UU Cipta Kerja pada Tirto.id. Kemudian, teori



yang digunakan sebagai pisau bedah pada data adalah Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Pada tahap kedua, peneliti merumuskan permasalahan yang akan digali lebih dalam. Rumusan masalah didasarkan pada 3 dimensi yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Ketiga, peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik simak dan catat. Kemudian, peneliti menulis proposal penelitian yang dibimbing oleh Ibu Millatuz Zakiyah untuk diajukan pada Seminar Proposal. Selanjutnya, peneliti melakukan Seminar Proposal yang bertujuan untuk menguji kesesuaian teori dengan topik penelitian. Setelah dilakukan seminar proposal, peneliti merevisi beberapa kesalahan yang terdapat dalam proposal penelitian.

Pada tahap selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang meliputi: analisis teks, analisis *discourse practice*, dan analisis *sociocultural practice*. Pada tahap analisis teks, peneliti menguraikan piranti-piranti kebahasaan yang digunakan Tirto.id dalam teks berita UU Cipta Kerja. Selanjutnya, pada tahap analisis *discourse practice* peneliti menginterpretasikan teks yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudian, pada tahap analisis *sociocultural practice*, peneliti mengaitkan teks dan praktik wacana dengan konteks yang meliputi sosial, ekonomi, dan politik.

Setelah data dianalisis, peneliti menyajikan hasil penelitian secara deskriptif yang dibimbing oleh Ibu Millatuz Zakiyah. Kemudian, hasil penelitian diujikan dalam seminar hasil yang diuji oleh Ibu Eti Setiawati. Pada seminar penelitian ini, Ibu Eti Setiawati menyampaikan beberapa kesalahan yang harus diperbaiki. Selanjutnya, peneliti melakukan revisi pada beberapa kesalahan yang disampaikan

oleh Ibu Eti Setiawati. Pada tahap terakhir, hasil penelitian diujikan dalam tahap ujian skripsi yang diuji secara langsung oleh Ibu Eti Setiawati.





## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab Temuan dan Pembahasan ini terdiri dari tiga sub-bab yang terkait dengan teks dan struktur teks yang digunakan *Tirto.id* dalam menyampaikan berita, pola hubungan produksi dan konsumsi yang dilakukan *Tirto.id* dalam menyampaikan berita, dan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi *Tirto.id* dalam menyampaikan berita. Berikut disajikan secara lebih rinci.

#### 4.1. Teks dan Struktur Teks dalam Tirto.id

Pada tahap analisis teks, Fairclough dalam Eriyanto (2001, hal. 289) membaginya ke dalam tiga unsur, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Representasi dibagi menjadi 3 unsur, yaitu representasi dalam anak kalimat, representasi dalam kombinasi anak kalimat, dan representasi dalam rangkaian antarkalimat. Relasi berkaitan dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Kemudian, identitas melihat bagaimana wartawan menempatkan dan merepresentasikan dirinya dengan masalah atau kelompok terlibat. Lebih dalam diuraikan dalam sub-bab berikut.

##### 4.1.1. Representasi dalam Anak Kalimat

Pada representasi anak kalimat, peneliti menemukan beberapa penggunaan aspek kebahasaan yang digunakan *Tirto.id*. Peneliti mengklasifikasikan menjadi (1) Eufemisme dan Disfemisme, (2) Metafora (3) Struktur Teks.

Berikut disajikan secara lebih detail.

#### 4.1.1.1. Eufemisme dan Disfemisme

Eufemisme (penghalusan makna) dan Disfemisme (pengasaran makna) yang dilakukan oleh media memiliki fungsi masing-masing. Penerapan eufemisme dan disfemisme dapat dilakukan dengan menggunakan kata, frasa, ataupun klausa. Eufemisme dapat berfungsi sebagai penghalus ucapan hingga menutupi kekurangan seseorang. Sedangkan disfemisme dapat berfungsi sebagai penggambaran yang buruk terhadap tokoh maupun peristiwa. Berikut ditampilkan data Eufemisme yang telah ditemukan dalam teks berita RUU Cipta Kerja Lebih jelasnya ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.1 Data Penggunaan Eufemisme**

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan <b>menegaskan</b> , harus ada pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan.	Tir-1/Kal-28
Sedangkan berbagai elemen buruh <b>masih konsisten</b> menolak RUU Ciptaker.	Tir-1/Kal-31
Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Danamon Dannis Senior yang menjadi perwakilan dari Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur menyatakan siap untuk melakukan <b>perlawanan</b> mengerahkan massa sebanyak-banyaknya.	Tir-2/Kal-18
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati sejak awal sudah <b>gigih mendesak</b> pemerintah dan DPR menghentikan—bukan menunda—pembahasan omnibus law.	Tir-3/kal-54
Salah satu yang mengeluarkan mosi tidak percaya adalah Fraksi Rakyat Indonesia (FRI)-- <b>aliansi masyarakat sipil yang paling getol menolak RUU Ciptaker sejak ReformasiDikorupsi</b> --di berbagai kanal media sosial.	Tir-5/kal-16

Eufemisme dipilih oleh penutur atau penulis untuk memberi citra yang baik kepada seseorang atau peristiwa. Ungkapan eufemisme dilakukan dalam bentuk kata, frasa, ataupun klausa. Hal ini merupakan bentuk ideologi dalam menampilkan sebuah peristiwa atau tokoh kepada khalayak.



Pada Tir-1/Kal-28 ditemukan kata *menegaskan* yang berasal dari kata tegas yang mendapatkan konfiks me-kan. Kemudian, kata *menegaskan* memiliki makna “mengatakan sesuatu dengan tegas”. Dalam hal ini, tokoh Hinca Panjaitan ditampilkan sebagai pewarta yang memiliki sifat tegas di tengah polemik RUU Cipta Kerja.

Pada Tir-1/kal-31 yang menggunakan frasa *masih konsisten* dalam menampilkan penolakan oleh elemen buruh terhadap RUU Cipta Kerja. Konsisten merupakan kata sifat/ajektiva yang memiliki arti melakukan suatu hal secara tetap dalam waktu yang panjang. Dalam hal ini, buruh ditampilkan sebagai sosok yang tidak henti-hentinya menolak RUU Cipta Kerja.

Kemudian, pada Tir-3/kal-54 terdapat frasa verba *gigih mendesak* yang disematkan pada tokoh Asfinawati, ketua YLBHI. Penggunaan kata *gigih*, yang memiliki makna ‘tetap teguh pada pendirian’, memberikan citra positif kepada Aktor, dalam hal ini adalah Asfinawati yang mendesak Pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Selain itu, pada Tir-2/kal-18 terdapat kata *perlawanan* yang dalam konteks berita ini memiliki referen pada aksi massa atau demonstrasi. Kata *perlawanan* merupakan kata benda yang memiliki arti upaya untuk mencegah sesuatu dengan tindakan atau argumen. Penggunaan kata *perlawanan* menjadikan aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh buruh memiliki citra positif.

Terakhir, pada Tir-5/kal-16 ditemukan frasa apositif *aliansi masyarakat sipil yang paling getol menolak RUU Ciptaker sejak Reformasi Dikorupsi*

yang menjadi perluasan pada tokoh Fraksi Rakyat Indonesia (FRI). Penggunaan frasa apositif memiliki makna perluasan yang berfungsi untuk memberikan tambahan informasi yang terkait dengan referen sebelumnya. Dalam hal ini, Tirto.id memberikan tambahan informasi berupa capaian FRI sebelum adanya kasus RUU Cipta Kerja. Penggunaan frasa apositif ini memberikan citra positif karena adanya kata paling getol yang bermakna *paling sering* atau *paling rajin*.

Kemudian, berikut ditampilkan data temuan Disfemisme dalam teks berita RUU Cipta Kerja dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2 Data Penggunaan Disfemisme**

Wakil rakyat <b>mengelabui</b> publik, buruh kecolongan.	Tir-3/kal-4
Pemerintah dan DPR selangkah lagi berhasil mengesahkan <b>aturan hukum yang menuai banyak kritik</b> secara senyap dan kilat.	Tir-3/kal-22
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), sebuah peraturan yang disusun dengan metode omnibus, disebut-sebut sebagai <b>produk hukum yang melayani segelintir pihak berkuasa</b> , rampung dibahas di tingkat I pada Sabtu (3/10/2020) lalu jelang tengah malam.	Tir-5/kal-4
"Sikap keras kepala mengesahkan omnibus law Cipta Kerja tepat di saat rakyat dilanda kesusahan besar akibat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi menunjukkan <b>Pemerintah dan DPR telah menjadi antek penjajahan investor jahat dan koruptor</b> ," kata mereka.	Tir-5/kal-18
Namun Pemerintah dan DPR tak memberikan pilihan lain karena <b>mereka pun tak mendengar suara publik</b> .	Tir-5/kal-23

Disfemisme dipilih oleh penutur atau penulis untuk memberi citra yang buruk terhadap suatu hal atau seseorang. Dalam hal ini, pengungkapan secara disfemisme dapat dilakukan dengan menggunakan kata, frasa, atau klausa.



Pemilihan bahasa disfemisme merupakan bentuk ideologis Tirto.id dalam menampilkan sebuah fenomena.

Pada Tir-3/kal-4 terdapat verba *mengelabui* yang dalam konteks berita ini dilakukan oleh Wakil Rakyat kepada masyarakat luas. Kata *mengelabui* memiliki arti menyesatkan pandangan seseorang. Lebih jauh, Tirto.id menampilkan pembuatan RUU Cipta Kerja yang diinisiatif oleh pemerintah secara negatif dengan menggunakan kata *mengelabui*.

Kemudian, pada Tir-3/kal-22, terdapat frasa **aturan hukum yang menuai banyak kritik** yang dalam konteks berita mengacu kepada RUU Cipta Kerja. Dalam hal ini, Tirto.id menampilkan RUU Cipta Kerja sebagai sebuah aturan yang mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak. Selain itu, pada Tir-5/kal-4, terdapat klausa *produk hukum yang melayani segelintir pihak berkuasa* sebagai frasa apositif yang menjadi referen pada RUU Cipta Kerja. Dalam hal ini, Tirto.id menampilkan RUU Cipta Kerja sebagai aturan yang tidak adil karena melayani segelintir pihak.

Pada Tir-5/kal-18 juga ditemukan penggunaan disfemisme yang berbunyi **Pemerintah dan DPR telah menjadi antek penjajahan investor jahat dan koruptor**. Dalam konteks kalimat tersebut, penggunaan disfemisme ditampilkan melalui kutipan dari pihak di luar Tirto.id, yaitu Fraksi Rakyat Indonesia (FRI). Penggunaan kutipan turut mempengaruhi bagaimana wacana disusun dan ditampilkan menjadi sebuah teks. Hal ini dikarenakan media massa merupakan ruang sosial di mana kelompok dalam sebuah masyarakat memberikan gagasan atas sebuah peristiwa. Dalam konteks

kalimat tersebut, gagasan dari FRI disebabkan oleh sikap keras kepala Pemerintah dan DPR yang tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja yang bersamaan dengan keterpurukan rakyat akibat pandemi COVID-19. Pemerintah dan DPR ditampilkan dengan citra yang negatif, yaitu sebagai pihak yang tidak memedulikan rakyat yang kesusahan.

Pada klausa Tir-5/kal 23 juga ditemukan bentuk disfemisme melalui klausa *mereka pun tak mendengar suara publik*. Pronomina *mereka* memiliki referen kepada pemerintah dan DPR. Dalam konteks kalimat tersebut, pemerintah dan DPR ditampilkan sebagai pihak yang tidak memedulikan suara rakyat. Penggunaan polaritas *tidak* yang menunjukkan sikap penutur yang tegas dalam mengungkapkan citra negatif pada pihak DPR dan Pemerintah.

Penggunaan eufemisme dan disfemisme digunakan untuk merepresentasikan tokoh yang terlibat. Pada tokoh Aliansi Buruh dan Mahasiswa ditampilkan dengan kata yang positif, sedangkan pada tokoh DPR dan pemerintah ditampilkan dengan kata yang memiliki makna negatif. Lebih jelasnya ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.3 Perbandingan Pilihan Kata**

<b>Tokoh 1</b>	<b>Kode</b>	<b>Tokoh 2</b>	<b>Kode</b>
Sedangkan berbagai elemen buruh <b>masih konsisten</b> menolak RUU Ciptaker.	Tir-1/Kal-31	Wakil rakyat <b>mengelabui</b> publik, buruh kecolongan.	Tir-3/kal-4
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati sejak awal sudah <b>gigih</b>	Tir-3/kal-54	Mereka menganggap Pemerintah dan DPR telah <b>mengkhianati</b>	Tir-5/kal-17



mendesak pemerintah dan DPR menghentikan—bukan menunda—pembahasan omnibus law.		warga dan konstitusi.	
Salah satu yang mengeluarkan mosi tidak percaya adalah Fraksi Rakyat Indonesia (FRI)--aliansi masyarakat sipil yang paling getol menolak RUU Ciptaker sejak Reformasi--di berbagai kanal media sosial.	Tir-5/kal-16	Ia berdalih ada versi draf beda halaman karena perbedaan jenis kertas.	Tir-9/kal-105

Pada tabel di atas, buruh dan mahasiswa ditampilkan dengan kata yang positif. Penggunaan kata berupa *getol*, *gigih*, dan *konsisten* merepresentasikan bahwa buruh tidak henti-hentinya berjuang. Penggunaan kata-kata tersebut memberikan makna positif pada tokoh Buruh. Dalam konteks ini, pembaca akan menganggap bahwa buruh dan mahasiswa berjuang melawan peraturan yang merugikan bagi kaum pekerja dengan gigih dan konsisten.

Kemudian, DPR dan Pemerintah lebih sering ditampilkan dengan kata negatif. Penggunaan kata-kata seperti *mengkhianati*, *mengelabui*, dan *berdalih* digunakan untuk merepresentasikan DPR dan Pemerintah selaku penyusun dan peserta rapat yang membahas RUU Cipta Kerja secara negatif. Dengan demikian, pembaca akan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah adalah tindakan yang salah.

#### 4.1.1.2. Metafora

Menurut Gorys Keraf (2009: hal. 139), metafora tergolong dalam gaya bahasa kiasan yang dibentuk berdasarkan persamaan dan perbandingan. Metafora tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi berbahasa, tetapi merepresentasikan konsep berpikir serta pengalaman penutur. Selain itu, metafora juga digunakan sebagai strategi penyampaian berita. Penggunaan metafora bertujuan untuk mengungkapkan maksud penulis secara tidak langsung dan menambah keindahan pada teks berita. Kemudian, penggunaan metafora oleh Tirto.id juga bertujuan untuk penguatan terhadap ide dan gagasan yang ingin disampaikan. Gaya bahasa ini sering kali digunakan oleh media massa untuk menambah keindahan pada teks berita. Pada data yang sudah dianalisis, ditemukan 18 metafora yang terdapat dalam teks berita RUU Cipta Kerja. Berikut disajikan sampel data penggunaan metafora pada teks berita RUU Cipta Kerja dalam tabel berikut.

**Tabel 4.4 Data Penggunaan Metafora**

Puja-puji dari <b>Anak Buah</b> Jokowi	Tir-1/Kal-19
Aspirasi mereka hanya menjadi saran, tapi <b>jauh panggang</b> dari kebijakan.	Tir-3/kal-62
Jika tak dibatalkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, ia akan tercatat selamanya dalam sejarah sebagai <b>kepanjangan tangan</b> oligarki.	Tir-5/kal-5
Beberapa perbaikan itu patut diduga menambah perihal yang substansial, meski dokumen UU Cipta Kerja secara <b>siluman</b> sudah disahkan pada 5 Oktober.	Tir-9/kal-116
Pendeknya, pemerintahan Jokowi kini hampir tidak memiliki oposisi yang <b>"bergigi"</b> dan ia sepertinya malah berniat meniadakannya.	Tir-12/kal-60
Setelah <b>dihujani protes</b> , pengesahan RUU menjadi UU terjadi pukul 17.52 WIB.	Tir-10/kal-24



Pada Tir-1/kal-19 ditemukan metafora berupa **anak buah** yang bermakna **bawahan** dan mengacu kepada jajaran menteri yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dalam konteks kalimat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pujian yang berlebihan dari menteri atas selesainya pembahasan RUU Cipta Kerja. Bentuk ini dipilih oleh Tirto.id untuk mengungkapkan bahwa para menteri yang memberi pujian pada DPR dan Fraksi Partai hanyalah orang yang disuruh oleh Presiden Joko Widodo.

Pada Tir-3/kal-62, terdapat metafora **jauh panggang** yang memiliki makna tindakan yang tidak sesuai dengan maksudnya. Dalam konteks kalimat ini, yang dimaksud ialah aspirasi dari kelompok buruh yang memberi saran dan jalan tengah bersama kelompok pengusaha dalam Omnibus Law. Frasa jauh panggang dipilih oleh Tirto.id untuk menggambarkan keadaan bahwa aspirasi dari kelompok buruh tidak dianggap dalam penyusunan materi RUU Cipta Kerja.

Pada Tir-5/kal-5, terdapat metafora **kepanjangan tangan oligarki** yang memiliki makna penerus. Dalam konteks kalimat ini, metafora tersebut mengacu kepada tindakan Presiden Joko Widodo yang tidak memiliki tindakan yang tegas terkait polemik RUU Cipta Kerja. Penggunaan metafora **kepanjangan tangan** dalam kalimat tersebut dijadikan sebagai konsekuensi dari pemilihan tindakan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Pada Tir-9/kal-116, terdapat metafora **siluman** yang bermakna tidak terlihat atau tersembunyi. Dalam kalimat tersebut, kata siluman mengacu pada proses pengesahan RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober yang dilakukan oleh

repository.ub.ac.id

DPR, Pemerintah, dan 9 Fraksi Partai. Dalam praktiknya, rapat tersebut dilakukan secara diam-diam dan tergesa-gesa, bahkan sempat diwarnai walk out dari perwakilan Fraksi Partai Demokrat. Penggunaan kata siluman memberikan citra negatif sekaligus merepresentasikan proses pengesahan RUU Cipta Kerja yang janggal.

Pada Tir-5/kal-5, terdapat metafora *bergigi* yang bermakna memiliki kekuatan. Dalam konteks kalimat ini, metafora tersebut disematkan pada pihak oposisi pemerintahan yang kini tidak memiliki kekuatan untuk melawan pemerintahan. Penggunaan metafora dalam kalimat tersebut digunakan untuk merepresentasikan keadaan politik sekarang yang tidak seimbang antara pihak pemerintahan dan oposisi.

Pada Tir-10/kal-24, terdapat metafora *dihujani protes*. Ranah sumber pada metafora tersebut adalah dihujani protes, sedangkan ranah sasaran adalah protes yang datang bertubi-tubi. Konsep dihujani protes merepresentasikan keadaan melalui entitas yang menggambarkan keadaan objek. Sehingga, metafora *dihujani protes* dapat diartikan sebagai mendapatkan protes secara bertubi-tubi. Dalam hal ini, metafora yang digunakan membarikan citra negatif pada pengesahan RUU Cipta Kerja. Hal ini menguatkan gagasan bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja tidak hanya mendapatkan protes dari beberapa pihak saja, tetapi dari banyak pihak dan dilakukan secara terus menerus.

#### 4.1.1.3. Struktur Teks

Pada bahasan ini, peneliti menjabarkan temuan berupa sistem klausa yang ditemukan dalam data. Sistem klausa tersebut terdiri dari tiga jenis klausa, yaitu



(1) sistem klausa yang mendahulukan aktor, (2) sistem klausa yang mendahulukan sirkumtansi, dan (3) sistem klausa pasif.

#### 4.1.1.3.1. Sistem Klausa yang Mendahulukan Aktor

Pada sistem klausa yang mendahulukan aktor menempatkan aktor/pelaku sebagai tema sebuah kalimat. Dalam hal ini, penempatan aktor sebagai tema menunjukkan bahwa aktor menjadi sebuah informasi penting dalam sebuah klausa. Selain itu, penempatan aktor sebagai tema erat kaitannya dengan pemilihan verba yang digunakan untuk merepresentasikan aktor, baik secara positif maupun negatif.

Pada beberapa sampel data yang sudah dipilih, terdapat beberapa jenis verba yang meliputi proses material, proses mental, dan proses verbal. Ketiga jenis verba ini sering digunakan dalam konstruksi teks berita untuk menginformasikan sebuah peristiwa. Berikut disajikan sampel data sistem klausa yang mendahulukan aktor.

**Tabel 4.5 Data Sistem Klausa yang Mendahulukan Aktor**

No.	Kalimat	Kode	Jenis Verba
1.	Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan <b>menegaskan</b> , harus ada pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan.	Tir-1/Kal-29	Proses Verbal
2.	Wakil rakyat <b>mengelabui</b> publik, buruh kecolongan.	Tir-3/kal-4	Proses Mental
3.	Amnesty <b>menilai</b> RUU Ciptaker, baik proses legislatif maupun substansi-nya, berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia untuk melindungi HAM, terutama menyangkut hak untuk bekerja dan hak di tempat kerja.	Tir-6/kal-35	Proses Mental



4.	Pemerintah selalu <b>berdalih</b> bahwa RUU Ciptaker bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempermudah bisnis.	Tir-6/kal-40	Proses Verbal
5.	Buruh <b>melakukan</b> demo dan mogok kerja massal menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.	Tir-8/kal-53	Proses material
6.	Polisi bersepeda motor <b>menabrak</b> empat relawan yang sebetulnya pakai rompi pengenal bertuliskan Relawan Muhammadiyah.	Tir-11/kal-46	Proses Material

#### 4.1.1.3.2. Sistem Klausula yang Mendahulukan Sirkumtansi

Pada sistem klausula yang mendahulukan sirkumtansi menempatkan sirkumtansi sebagai tema dalam sebuah klausula. Hal ini menunjukkan bahwa sirkumtansi menjadi informasi yang lebih penting dalam sebuah klausula. Santosa (dalam Rahmawati, 2020: 50), merumuskan delapan jenis Sirkumtansi, yaitu: 1) Sirkumtansi Angle/sudut pandang; 2) Sirkumtansi Lokasi; 3) Sirkumtansi Eksten/durasi; 4) Sirkumtansi Cara (*manner*); 5) Sirkumtansi Sebab; 6) Sirkumtansi *Accompaniment*/menemani partisipan; 7) Sirkumtansi Hal (*matter*); dan 8) Sirkumtansi Peran. Berikut disajikan ragam klausula yang mendahulukan sirkumtansi.

**Tabel 4.6 Sistem Klausula yang Mendahulukan Sirkumtansi**

No.	Kalimat	Kode
1.	<b>Jelang tengah malam</b> , tujuh fraksi partai politik di DPR RI, DPD RI, dan pemerintah menyepakati Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) selesai dibahas di tingkat I.	Tir-1/Kal-4
2.	<b>Dalam tulisannya yang lain bertajuk "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan" (2015)</b> , Joko, sebagai tenaga ahli DPR, memandang bahwa meski sudah ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	Tir-3/kal-41



	Perundang-undangan, aspirasi masyarakat masih dipandang sebelah mata.	
3.	<b>Sebelumnya pada 12 Februari 2020</b> , Pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden, RUU Cipta Kerja, dan Naskah Akademik kepada DPR RI.	Tir-8/kal-6
4.	<b>Sampai Senin pekan ini, 12 Oktober</b> , ada empat draf UU Cipta Kerja yang beredar ke publik setelah disahkan.	Tir-9/kal-85
5.	<b>Selama delapan hari setelah pengesahan</b> , terjadi protes besar menentang omnibus law setidaknya di 18 provinsi di Indonesia.	Tir-10/kal-25
6.	<b>Dengan alasan pandemi COVID-19</b> , Polri melarang unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja Omnibus Law di semua daerah, termasuk di depan Gedung DPR/MPR di mana keputusan soal aturan itu diambil.	Tir-12/kal-11

#### 4.1.1.3.3. Sistem Klausula Pasif

Pada sistem klausula pasif menempatkan sasaran sebagai tema dalam kalimat, sehingga sasaran menjadi informasi yang diutamakan. Kemudian pada sistem klausula pasif diklasifikasikan menjadi klausula pasif disertai aktor dan klausula pasif tanpa aktor. Pada klausula pasif yang disertai aktor menunjukkan adanya pelaku yang melakukan tindakan kepada sasaran. Sebaliknya, pada klausula pasif tanpa aktor menunjukkan bahwa sasaran ditampilkan sebagai korban.

Selain itu, tidak adanya aktor dalam sebuah klausula merupakan cara media menyembunyikan pelaku dalam sebuah wacana. Berikut disajikan ragam klausula pasif dengan dua jenis yang berbeda.

**Tabel 4.7 Sistem Klausula Pasif**

No	Kalimat	Kode	Keterangan
1.	Rapat ini <b>dihadiri</b> perwakilan pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu: Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Lingkungan Hidup	Tir-1/Kal-14	Disertai Aktor



	dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.		
2.	Dalam omnibus law, kepentingan yang <b>diakomodasi</b> pemerintah dan DPR dalam pembentukan aturan ini jelas investor.	Tir-3/kal-51	Disertai Aktor
3.	RUU Cipta Kerja Omnibus Law juga <b>ditolak</b> oleh jutaan buruh di Indonesia karena dianggap akan merugikan para buruh.	Tir-6/kal-10	Disertai Aktor
4.	Kedua aturan itu <b>dianggap</b> hanya menguntungkan kelompok elite.	Tir-3/kal-7	Tanpa Aktor
5.	Selain itu, RUU Cipta Kerja juga <b>dinilai</b> merugikan pekerja karena menghapus beberapa bentuk cuti berbayar, termasuk cuti haid, cuti pribadi (seperti pernikahan, sunat, pembaptisan, atau kematian anggota keluarga), cuti melahirkan, dan hari raya keagamaan.	Tir-6/kal-58	Tanpa Aktor
6.	UU kontroversial tersebut <b>disahkan</b> pada 5 Oktober, dan sudah <b>diserahkan</b> ke Presiden Joko Widodo 14 Oktober lalu.	TIR-13/kal-5	Tanpa aktor

Berdasarkan data di atas, peneliti menemukan penggunaan sistem tata bahasa yang terdiri dari sistem klausa yang mendahulukan aktor, sistem klausa yang mendahulukan sirkumtansi, dan sistem klausa pasif. Namun, Tirto.id lebih cenderung menggunakan sistem klausa yang mendahulukan aktor. Dalam hal ini, penempatan aktor sebagai tema menjadikan aktor lebih diutamakan dalam susunan klausa. Sejalan dengan hal tersebut, Rahmawati (2020, hal. 54) mengungkapkan bahwa hal tersebut berakibat pada terbentuknya makna wacana yang mengarah pada tindakan yang dilakukan secara aktif oleh Aktor/Partisipan. Kemudian, Tirto.id dominan menggunakan jenis klausa indikatif-deklaratif dengan fungsi proposisi-memberi. Dalam hal ini, wartawan



berperan sebagai pemberi informasi dan pembaca sebagai penerima informasi.

Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut.

**Tabel 4.8 Analisis Proses Verbal**

Klausa	Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan	menegaskan,	harus ada pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan.
Ideasional	Pewart	Proses Verbal	Diwartakan
Interpersonal	Mood		Residu
Tekstual	Tema Topikal Tak Bermarkah		Rema

Pada contoh klausa di atas, *Anggota Komisi III DPR Praksi Demokrat Hinca Panjaitan* merupakan pewarta dalam klausa tersebut. Sedangkan, *harus ada pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan* merupakan unsur yang diwartakan. Kata *menegaskan* menjadi penanda verba dengan proses verbal. Dalam hal ini, verba yang digunakan adalah *menegaskan*. Menegaskan dalam KBBI berarti mengatakan dengan tegas. Pemilihan verba berimplikasi pada citra pewarta, sehingga pewarta mendapatkan citra positif. Kemudian, penempatan pewarta sebagai tema dalam klausa menunjukkan informasi yang lebih diutamakan.

#### 4.1.2. Representasi dalam Kombinasi Anak Kalimat

Pada representasi dalam kombinasi anak kalimat, peneliti menemukan penggunaan konjungsi eksternal sebagai penanda logika klausa. Konjungsi

merupakan salah satu unsur pembentuk kohesi dalam sebuah teks. Dalam hal ini, penggunaan konjungsi memperlihatkan bagaimana sebuah media menyampaikan wacana dalam sebuah kalimat. Selain itu, konjungsi juga berfungsi untuk menghubungkan beberapa peristiwa agar lebih mudah diterima oleh pembaca. Sebagaimana pendapat Wiratno (2018: hal. 259), kohesi adalah sarana penataan dalam proses yang melibatkan gramatika dan lexis yang dapat menentukan derajat pemahaman pembaca atau pendengar pada konteks sosial tempat teks berwujud. Lebih dalam, berikut disajikan sampel data konjungsi eksternal yang ditemukan dalam teks berita RUU Cipta Kerja pada laman Tirto.id.

**Tabel 4.9 Data Konjungsi Eksternal**

Hanya ada dua partai politik yang menolak RUU Ciptaker <b>yaitu:</b> Partai Demokrat dan PKS.	Tir-1/kal-27	Perluasan	Memperluas peristiwa
Dia membubarkan berbagai demonstrasi <b>atau</b> gerakan yang berseberangan dengannya <b>seperti</b> Ganti Presiden 2019.	Tir-12/kal-44	Pilihan, Perluasan	Memperluas peristiwa
Jokowi didesak untuk menghentikan pembahasan RUU Ciptaker, <b>sebagaimana</b> yang ia lakukan terhadap RKUHP tahun lalu.	Tir-5/kal-3	Persamaan	Membandingkan peristiwa
Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober 2020 <b>meski</b> mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.	Tir-8/kal-4	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
Ambulans yang mencoba meloloskan diri dari razia <b>lantas</b> ditembaki <b>kemudian</b> orang yang ada di dalamnya ditangkap.	Tir-11/kal-5	Suksesi	Menara serta mengurutkan peristiwa.



<p>Serikat kerja di tingkat perusahaan, katanya, sudah mengirimkan surat izin kepada kepolisian resor (polres) masing-masing daerah, <b>sementara</b> serikat kerja di tingkat nasional juga telah mengirimkan izin untuk berunjuk rasa di lingkungan perusahaan/pabrik masing-masing kepada Mabes Polri.</p>	Tir-6/kal-16	Simultan	Menara serta mengurutkan peristiwa.
<p>Selain itu, RUU Cipta Kerja juga dinilai merugikan pekerja <b>karena</b> menghapus beberapa bentuk cuti berbayar, termasuk cuti haid, cuti pribadi (seperti pernikahan, sunat, pembaptisan, atau kematian anggota keluarga), cuti melahirkan, dan hari raya keagamaan.</p>	Tir-6/kal-58	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
<p><b>Dengan</b> menggelar unjuk rasa dari pukul 06.00 - 18.00 WIB, kata dia, berarti tingkat produksi kerja akan secara langsung terkena dampak dari aksi mogok nasional yang akan digelar secara serentak tersebut.</p>	Tir-6/kal-17	Cara	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
<p>Saat itu Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, meminta kepada Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin selaku Pemimpin Sidang, <b>agar</b> diberikan waktu berbicara menyampaikan pandangan fraksi terkait Omnibus Law.</p>	Tir-8/kal-19	Tujuan	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
<p>Dengan syarat, <b>jika</b> ada keributan <b>atau</b> kericuhan, <b>maka</b> demonstrasi itu akan dibubarkan.</p>	Tir-12/kal-8	Kondisi, Pilihan	Menerangkan bagaimana peristiwa terjadi

Pada Tir-1-kal-27, terdapat konjungsi *yaitu* yang bermakna perluasan dan berperan memperluas peristiwa. Lebih lanjut, konjungsi *yaitu* menjelaskan



bahwa Partai Demokrat dan PKS adalah 2 partai yang menolak RUU Cipta Kerja.

Dalam hal ini, konjungsi *yaitu* memiliki fungsi untuk memerinci keterangan dalam kalimat.

Pada Tir-12/kal-44, terdapat konjungsi *atau* yang termasuk dalam konjungsi adisi yang memiliki makna pilihan dan berperan memperluas peristiwa. Lebih lanjut, konjungsi *atau* yang berfungsi sebagai penanda pilihan antara *demonstrasi* dan *gerakan yang berseberangan dengannya*. Dalam hal ini, konjungsi dengan makna pilihan berfungsi untuk menggabungkan beberapa klausa dalam sebuah kalimat yang bertujuan untuk menghadirkan pilihan.

Pada Tir-5/kal-3, terdapat konjungsi *sebagaimana* yang memiliki makna persamaan dan berperan membandingkan peristiwa dalam sebuah kalimat. Dalam konteks kalimat tersebut, terdapat dua peristiwa, yaitu Jokowi didesak untuk menghentikan RUU Cipta Kerja dan Jokowi menghentikan pembahasan RKUHP tahun lalu. Kemudian, konjungsi *sebagaimana* menjelaskan perbandingan kemiripan di antara kedua peristiwa tersebut.

Pada Tir-5/kal-3 terdapat konjungsi *lantas* dan *kemudian* yang termasuk dalam konjungsi waktu dengan makna suksesi yang berperan menata dan mengurutkan peristiwa dalam sebuah wacana. Dalam teks tersebut, terdapat dua peristiwa, yaitu ambulans yang meloloskan diri ditembaki dan orang yang ada di dalam ambulans ditangkap. Penutur menggunakan konjungsi *lantas* dan *kemudian* untuk mengurutkan kejadian yang memiliki kesamaan waktu di dalam teks. Pengurutan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kronologi sebuah peristiwa.



Pada Tir-6/kal-16, terdapat konjungsi sementara yang termasuk dalam konjungsi waktu dengan makna simultan yang berperan menata dan mengurutkan peristiwa dalam sebuah wacana. Dalam teks tersebut, penutur menggabungkan dua peristiwa yang berlangsung secara bersamaan dalam sebuah kalimat. Terdapat dua peristiwa dalam Tir-6/kal-16, yaitu Serikat Kerja mengirimkan izin demonstrasi kepada polres di masing-masing daerah dan Serikat Kerja di tingkat nasional mengirimkan izin untuk melakukan demonstrasi di lingkungan kerja kepada Mabes Polri. Dalam hal ini, penggunaan konjungsi waktu dengan makna simultan tersebut bertujuan untuk menginformasikan kejadian lain dalam waktu yang bersamaan.

Pada Tir-6/kal-58, terdapat konjungsi karena yang termasuk dalam konjungsi konsekuensi dengan makna sebab yang berperan untuk menerangkan mengapa sebuah peristiwa dapat terjadi. Lebih lanjut, konjungsi **karena** menjelaskan bahwa penghapusan cuti berbayar menjadi alasan atau sebab RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja. Dalam hal ini, konjungsi konsekuensi dengan makna sebab bertujuan untuk mengungkapkan sebab atau alasan yang melatarbelakangi terjadinya sebuah peristiwa.

Pada Tir-6/kal-17, terdapat konjungsi **dengan** yang merupakan konjungsi konsekuensi dengan makna cara yang berperan untuk menerangkan bagaimana peristiwa terjadi. Lebih dalam, konjungsi **dengan** menjelaskan bahwa menggelar aksi massa secara serentak pada jam kerja, tepatnya pada pukul 06.00-18.00, merupakan cara yang ditempuh buruh untuk mempengaruhi proses produksi.

Dalam hal ini, konjungsi konsekuensi dengan makna cara bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana cara yang ditempuh oleh aktor.

Pada Tir-8/kal-19, terdapat konjungsi **agar** yang merupakan konjungsi konsekuensi dengan makna tujuan yang berperan untuk menerangkan maksud yang diharapkan oleh penutur. Lebih lanjut, konjungsi **agar** menjelaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Fraksi Partai Golkar dengan harapan diberikan waktu untuk menyampaikan pandangan fraksi terkait Omnibus Law.

Dalam hal ini, konjungsi konsekuensi dengan makna tujuan bertujuan untuk mengungkapkan maksud atau harapan dari apa yang dilakukan oleh aktor.

Pada Tir-12/kal-8, terdapat konjungsi **jika** yang merupakan konjungsi konsekuensi dengan makna kondisi yang berperan menerangkan bagaimana peristiwa terjadi. Lebih lanjut, konjungsi **jika** menjelaskan bahwa syarat pembubaran demonstrasi adalah adanya keributan atau keributan ketika demonstrasi berlangsung. Dalam hal ini, konjungsi konsekuensi dengan makna kondisi bertujuan untuk mengungkapkan ketentuan yang harus ditempuh oleh aktor.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menemukan penggunaan konjungsi eksternal yang secara keseluruhan yang berjumlah 118 konjungsi.

Berikut populasi data penggunaan konjungsi eksternal yang terdapat dalam teks berita RUU Cipta Kerja.

**Tabel 4.10 Jumlah Penggunaan Konjungsi Eksternal**

No	Hubungan Logis	Makna	Jumlah
1	Adisi	Perluasan	43
		Pilihan	1
2	Komparasi	Persamaan	2



		Kontras	25
3	Waktu	Suksesi	4
		Simultan	2
4	Konsekuensi	Sebab	24
		Cara	4
		Tujuan	6
		Kondisi	9
		Total	118

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil bahwa Tirto.id lebih banyak menggunakan konjungsi dengan makna Adisi-Perluasan (43), Komparasi-Kontras (25), dan Konsekuensi-Sebab (24). Penggunaan konjungsi tersebut digunakan untuk merepresentasikan (1) adanya perluasan terhadap sebuah peristiwa, (2) adanya dua peristiwa yang saling bertentangan, dan (3) adanya dua peristiwa yang saling berkaitan.

#### 4.1.3. Representasi dalam Gabungan Antarkalimat

Pada representasi dalam gabungan antar kalimat, peneliti menemukan adanya penggunaan repetisi dalam beberapa teks berita. Selain itu, peneliti menemukan penggunaan konjungsi internal sebagai penanda logika antarklausula. Berikut disajikan secara lebih dalam.

##### 4.1.3.1. Repetisi

Penggunaan repetisi ini bertujuan untuk menegaskan maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Terdapat beberapa penggunaan repetisi yang meliputi repetisi leksikal dan repetisi gramatikal. Berikut disajikan analisisnya.

**Tabel 4.11 Repetisi Leksikal 1**

<i>Hanya</i> Partai Demokrat dan PKS yang menolak RUU Cipta Kerja dilanjutkan pengesahannya dalam rapat paripurna DPR RI. Sedangkan DPD RI dan pemerintah setuju.	Tir-1/Kal-3
<i>Hanya</i> ada dua partai politik yang menolak RUU Ciptaker yaitu: Partai Demokrat dan PKS.	Tir-1/Kal-27

Pada tabel di atas, pengulangan kata *hanya* menunjukkan adanya penegasan suatu makna. Dalam hal ini, dua fraksi yang menolak menjadi sesuatu yang ditegaskan. Penggunaan kata *hanya* merepresentasikan bahwa dari sekian banyak peserta rapat, yaitu 9 fraksi partai, DPR RI, dan perwakilan dari pemerintah, hanya ada dua partai yang menolak. Hal ini menampilkan partai yang menolak RUU Cipta Kerja tidak memiliki suara yang berarti dalam pengesahan RUU Cipta Kerja.

**Tabel 4.12 Repetisi Leksikal 2**

Pengambilan keputusan soal omnibus law dilakukan hari ini, Senin (5/10/2020). Wakil rakyat mengelabui publik, buruh <b>kecolongan</b> .	Tir-3/kal-3
Mahasiswa yang awalnya berniat menolak revisi tersebut merasa <b>kecolongan</b> .	Tir-3/kal-13
“Kami <b>kecolongan</b> ,” kata Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, Dinno Ardiansyah seperti dilansir Tempo.	Tir-3/kal-16
Dengan paripurna hari ini, masyarakat, terkhusus organ buruh, memang <b>kecolongan</b> .	Tir-3/kal-94

Kata **kecolongan** memiliki fungsi verba pasif yang merepresentasikan adanya proses mental. Dalam klausa di atas, menempatkan buruh, mahasiswa sebagai pihak yang terdampak atau korban dalam fenomena pengesahan RUU Cipta Kerja. Repetisi yang dilakukan menandakan adanya penegasan bahwa buruh dan mahasiswa adalah korban dalam pengesahan RUU Cipta Kerja.

**Tabel 4.13 Sampel Penggunaan Repetisi Leksikal**

Daftar Pasal Bermasalah dan Kontroversi Omnibus Law RUU Cipta Kerja	Tir-4/kal-1
<i>Pasal bermasalah dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mencakup tentang ketenagakerjaan, Pendidikan, Pers hingga Lingkungan Hidup.</i>	Tir-4/kal-2
Terkait hal ini, para buruh akan melakukan aksi demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 sampai 8 Oktober	Tir-4/kal-4



2020, menolak RUU yang dianggap memuat sejumlah <b>pasal bermasalah</b> atau kontroversial.	
Namun RUU Cipta Kerja disebut memuat sejumlah <b>pasal bermasalah</b> atau kontroversi.	Tir-4/kal-8
Berikut <b>pasal</b> yang disebut <b>bermasalah</b> mulai dari UU Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, UU Pers dan Pendidikan.	Tir-4/kal-9
<b>Pasal Bermasalah</b> Tentang Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja	Tir-4/kal-10
<b>Pasal Bermasalah</b> Tentang Lingkungan Hidup di RUU Cipta Kerja	Tir-4/kal-29
<b>Pasal Bermasalah</b> Tentang Pers di RUU Cipta Kerja	Tir-4/kal-36
<b>Pasal Bermasalah</b> Tentang Pendidikan di RUU Cipta Kerja	Tir-4/kal-48

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan frasa *pasal bermasalah* direpetisi sebanyak sembilan kali dan diletakkan di semua bagian dalam berita, yaitu judul, lead, isi, dan sub judul. Penempatan yang strategis memungkinkan pembaca menilai bahwa RUU Cipta Kerja memiliki banyak pasal yang bermasalah dan kontroversi. Selain itu, pasal bermasalah tidak hanya berada di sektor ketenagakerjaan saja, melainkan sektor Lingkungan Hidup, Pers, dan Pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya penegasan bahwa terdapat banyak pasal bermasalah dari berbagai sektor yang dicakup oleh RUU Cipta Kerja.

**Tabel 4.14 Sampel Penggunaan Repetisi Gramatikal**

Kalimat	Kode
Amnesty menilai RUU Ciptaker, baik proses legislatif maupun substansi-nya, berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan <b>bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia untuk melindungi HAM</b> , terutama menyangkut hak untuk bekerja dan hak di tempat kerja.	Tir-6/kal-35
“RUU Cipta Kerja berisi pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta <b>bertentangan dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum</b> ”	Tir-6/kal-36



<b>internasional,”</b> kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.	
Amnesty berpendapat, secara substansi, <b>RUU Ciptaker tidak sesuai dengan standar HAM internasional.</b>	Tir-6/kal-42
“Ketentuan ini otomatis akan menurunkan tingkat upah minimum. Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian mereka. Hak mereka atas standar hidup yang layak akan terdampak. <b>Situasi ini bertentangan dengan standar HAM internasional,”</b> kata Usman.	Tir-6/kal-49
Ini merupakan kemunduran dari undang-undang yang ada dan, lagi-lagi, <b>bertentangan dengan standar HAM internasional.</b>	Tir-6/kal-54

Pada repetisi gramatikal, peneliti menemukan pengulangan terhadap klausa yang menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja bertentangan dengan standar HAM Internasional. Hal ini dapat di lihat pada tabel di atas yang menunjukkan adanya pengulangan sebanyak 5 kali. Pengulangan sebanyak itu menegaskan kepada pembaca bahwa RUU Cipta Kerja merupakan produk hukum yang cacat karena bertentangan dengan HAM Internasional.

#### 4.1.3.2. Konjungsi Internal

Selain penggunaan repetisi, peneliti juga menemukan adanya penggunaan konjungsi internal yang digunakan oleh Tirto.id dalam menyajikan sebuah berita. Penggunaan konjungsi internal bertujuan untuk membentuk struktur teks. Menurut Wiratno (2018: hal. 254) struktur teks merupakan tahap-tahap yang menunjukkan cara sebuah teks diorganisasikan. Salah satu piranti yang digunakan untuk mengorganisasikan sebuah teks adalah penggunaan konjungsi. Lebih dalam, berikut disajikan data konjungsi internal yang ditemukan dalam teks berita RUU Cipta Kerja pada laman Tirto.id.

**Tabel 4.15 Data Konjungsi Internal**



Konjungsi yang Digunakan dalam Kalimat	Kodifikasi	Makna	Peran dalam kalimat
<b>Selain karena</b> minimnya pelibatan masyarakat sipil dalam merumuskan masalah, tujuan pemerintah dalam pembuatan RUU ini bisa menyimpang dari kepentingan tenaga kerja.	Tir-3/kal-56	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.
<b>Seperti déjà vu</b> , pemerintah dan DPR sepakat terhadap pembahasan RUU omnibus law pada malam hari, Sabtu (3/10/2020).	Tir-3/kal-19	Persamaan	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen dan bukti-bukti
<b>Padahal</b> Fraksi Partai Demokrat sudah mengingatkan pengesahan omnibus law terlalu buru-buru.	Tir-3/kal-83	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
<b>Dalam situasi ini</b> kata dia sudah tidak ada lagi kompromi dan negosiasi yang bisa dilakukan.	Tir-2/Kal-14	Simultan	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
<b>Lebih lanjut</b> , Hary menilai perubahan poin-poin dalam pasal ini jelas melanggar semangat UU Pers sebelumnya, yang mengatur bahwa sengketa pers lebih didorong pada upaya korektif dan edukasi.	Tir-4/kal-46	Suksesi	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
<b>Intinya</b> , perbaikan non-substansial.	Tir-9/kal-19	Penyimpulan	Menyampaikan kesimpulan, justifikasi, gagasan, tandingan, penolakan, dan pengakuan.

Pada Tir-3/kal-56, ditemukan konjungsi *selain karena* yang merupakan konjungsi yang berperan mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks. Konjungsi tersebut memperlihatkan bahwa wacana dalam teks disusun secara berkesinambungan antara kalimat sebelum konjungsi dan kalimat sesudah konjungsi. Dalam teks tersebut, konjungsi *selain karena* menghubungkan gagasan sebelumnya, yaitu beberapa organisasi buruh yang keluar dari pembahasan materi RUU Cipta Kerja, dengan gagasan setelahnya, yaitu tujuan pemerintah dalam pembuatan RUU Cipta Kerja bisa menyimpang dari kepentingan tenaga kerja.

Pada Tir-3/kal-19, terdapat konjungsi *seperti de javu* yang memiliki makna persamaan dan berperan membandingkan antara peristiwa satu dengan yang lainnya. Konjungsi tersebut memperlihatkan bahwa wacana dalam teks disusun dari beberapa peristiwa yang saling dihubungkan oleh penutur. Dalam teks tersebut, konjungsi *seperti de javu* membandingkan antara pengesahan UU KPK dan RKUHP dengan pengesahan RUU Cipta Kerja. Perbandingan ini dilakukan dengan menghadirkan bukti-bukti pada kasus sebelumnya. Terdapat beberapa bukti-bukti yang menunjukkan kesamaan di antara keduanya, seperti pengesahannya berlangsung cepat, tidak melibatkan pihak terdampak, terjadi aksi massa yang besar sebagai bentuk penolakan.

Pada Tir-3/kal-83, terdapat konjungsi *padahal* yang memiliki makna kontras dan berperan mengontraskan peristiwa satu dengan yang lainnya yang saling bertolak belakang. Dalam teks tersebut, konjungsi *padahal* mengontraskan dua



peristiwa yang saling bertolak belakang antara Pemerintah dan DPR yang tetap mengebut pembahasan RUU Cipta Kerja, dan perwakilan Fraksi Partai Demokrat yang memberi peringatan pada DPR dan Pemerintah terkait pembahasan yang lebih mendalam melihat banyaknya organisasi buruh yang menganggap RUU Cipta Kerja masih bermasalah. Dalam konteks tersebut, ditampilkan adanya ketidaksetujuan dari perwakilan Fraksi Partai Demokrat, tetapi peserta rapat lain tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Pada Tir-2/Kal-14 terdapat konjungsi *dalam situasi ini* yang bermakna simultan dan berperan menata sebuah gagasan dan argumentasi dalam teks. Dalam teks tersebut, konjungsi *dalam situasi ini* menghubungkan argumen dalam sebuah peristiwa. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah gerakan aksi massa yang akan dilakukan dan penyebabnya yang mana tidak adanya kompromi dan negosiasi yang bisa dilakukan untuk menunda atau menghentikan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Pada tir-4/kal-46 terdapat konjungsi *lebih lanjut* yang bermakna suksesi dan berperan mengurutkan sebuah gagasan atau argumen dalam teks. Dalam teks tersebut, konjungsi *lebih lanjut* menjadikan gagasan dan argumen yang dilontarkan menjadi lebih urut. Penggunaan konjungsi tersebut dilakukan agar tidak membingungkan pembaca. Dalam hal ini, konjungsi tersebut mengurutkan gagasan Harry Siswoyo selaku ketua AJI Bengkulu terkait dampak RUU Cipta Kerja terhadap Pers.

Pada Tir-9/kal-19, terdapat konjungsi *intinya* yang memiliki makna penyimpulan dan berperan menyampaikan kesimpulan, justifikasi, dan gagasan terhadap sebuah peristiwa. Dalam teks tersebut, konjungsi *intinya* menunjukkan bahwa tahap perbaikan RUU setelah disepakati Baleg DPR yang meliputi pengecekan tanda baca maupun susunan kalimat merupakan perbaikan non-substansial.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menemukan penggunaan 86 konjungsi internal pada seluruh data. Berikut disajikan populasi data penggunaan konjungsi internal yang terdapat dalam teks berita RUU Cipta Kerja.

**Tabel 4.16 Jumlah Data Penggunaan Konjungsi Internal**

No	Konjungsi	jumlah
1.	Adisi-Pengembangan	13
2.	Komparasi-Persamaan	3
3.	Komparasi-kontras	36
4.	Waktu-Suksesi	11
5.	Waktu-Simultan	12
6.	Konsekuensi-Penyimpulan	11
	Total	86

Berdasarkan hasil yang sudah ditampilkan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan konjungsi internal merepresentasikan (1) pengembangan terhadap sebuah peristiwa, (2) adanya dua peristiwa yang saling bertentangan, (3) urutan peristiwa, dan (4) penyimpulan terhadap suatu



fenomena. Penggunaan konjungsi memungkinkan beberapa peristiwa yang disejajarkan dapat diterima oleh pembaca

#### 4.1.4. Relasi

Pada tahap relasi ini berhubungan dengan bagaimana partisipan ditampilkan dalam teks. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana kekuatan sosial hendak ditampilkan dalam sebuah teks pemberitaan. Pada teks berita RUU Cipta Kerja, wacana yang lebih digambarkan adalah pertentangan antara pihak pro (Pemerintah, DPR, dan Partai) dan pihak kontra (Buruh, Mahasiswa, dan beberapa ahli).

Pertentangan ini disebabkan oleh RUU Cipta Kerja sebagai produk hukum yang diinisiatif dan dibuat oleh pemerintah dan DPR dianggap merugikan bagi pihak buruh menurut organisasi buruh, beberapa ahli, dan mahasiswa. Hadirnya organisasi buruh menunjukkan bahwa buruh sebagai pihak yang terdampak aturan dalam RUU Cipta Kerja menganggap bahwa ada ketidakadilan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, baik proses pembuatan maupun pengesahan. Buruh mengungkapkan bahwa RUU Cipta Kerja tidak berpihak kepada rakyat dan kaum pekerja. Mereka juga mendesak agar RUU ini segera dibatalkan.

Kemudian adanya beberapa ahli seperti Usman Wahid pada bidang ketenagakerjaan, Wahyu A. Perdana pada bidang Lingkungan Hidup, Harry Siswoyo pada bidang Pers, dan Hidayat Nur Wahid pada bidang pendidikan, mengamplifikasi wacana bahwa RUU Cipta Kerja memberi dampak yang

terkait dengan banyak bidang. Hadirnya pendapat ahli dalam sebuah bidang dapat meyakinkan pembaca bahwa RUU Cipta Kerja memang bermasalah.

Selanjutnya, hadirnya pihak yang mendukung RUU Cipta Kerja menunjukkan langkah baik dari pemerintah dalam memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia. Pemerintah dan DPR meyakini bahwa dengan hadirnya RUU Cipta Kerja akan mempermudah investasi dan memperbanyak lapangan pekerjaan.

Antara pihak pro dan pihak kontra digambarkan dengan cara yang berbeda.

Pihak pro yang meliputi pemerintah, DPR, dan beberapa Fraksi Partai digambarkan sebagai pihak yang mengkhianati dan tidak memiliki kepedulian terhadap rakyat. Sementara itu, Buruh ditampilkan sebagai korban dari RUU Cipta Kerja dan sebagai pihak yang berjuang untuk menghentikan ketidakadilan terhadap buruh.

#### 4.1.5. Identitas

Pada tahap identitas, peneliti melihat bagaimana wartawan mengidentifikasi dirinya dalam sebuah teks. Tirto.id sebagai media massa yang memproduksi teks berita RUU Cipta Kerja cenderung mengidentifikasi dirinya pada pihak yang kontra dengan adanya RUU Cipta Kerja. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan frasa maupun klausa yang digunakan untuk menyajikan teks berita. Berikut disajikan analisisnya.

Dalam artikel Tir-2 yang berjudul *Tolak RUU Ciptaker, Buruh akan Demo & Mogok Massal pada 6-8 Oktober*, penulis menggunakan klausa indikatif-deklaratif dengan fungsi tutur proposisi-memberi. Lebih dalam, judul tersebut



dianalisis menggunakan teori transivitas Halliday yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.18 Analisis Proses Material**

Tolak RUU Ciptaker,	Buruh akan	Demo & Mogok Massal	pada 6-8 Oktober
Sirkumtansi	Aktor Finit	Proses Material	Sirkumtansi
	Mood		residu
Tema topikal bermarkah		Rema	

Pada judul artikel Tir-2, demo dan mogok massal menjadi penanda proses material. Dalam hal ini, wartawan menginformasikan bahwa Buruh sebagai aktor yang menolak RUU Cipta Kerja memiliki sikap dengan melakukan demonstrasi dan mogok massal. Kemudian, penempatan sikap buruh terkait penolakan mereka terhadap RUU Ciptaker pada awal judul menempatkannya sebagai topik yang ingin disampaikan kepada khalayak.

Kemudian, pada teks Tir-5, wartawan cenderung mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari rakyat yang menolak RUU Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini.

*“RUU Ciptaker menghapus regulasi itu dan menjadikan satu dengan izin berusaha—**padahal** itu dua ranah yang berbeda.” (Tir-5/kal-48)*

Penggunaan konjungsi *padahal* mengisyaratkan bahwa penulis mengungkapkan argumennya sendiri terkait dengan penghapusan regulasi dan menjadikan satu dalam izin berusaha. Konjungsi *padahal* menunjukkan adanya pertentangan antara klausa pertama dan klausa kedua. Selain itu, bentuk ungkapannya menggunakan tanda das (—) yang mengisyaratkan bentuk frasa

apositif. Dalam hal ini, penulis mengungkapkan keheranannya terhadap fenomena tersebut dengan ungkapan *padahal itu dua ranah yang berbeda*.

Selain itu, identifikasi wartawan juga dapat dilihat dalam kutipan berikut.

*Ketentuan baru ini akan memberikan kekuasaan pada pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu tak terbatas. (Tir-4/kal-14)*

Pada kutipan di atas, wartawan mengidentifikasi dirinya sebagai ahli Ketenagakerjaan dengan memberi informasi terkait ancaman dan akibat dari pasal dalam RUU Cipta Kerja pada pekerja kontrak. Dalam hal ini, wartawan menyatakan bahwa adanya perubahan pada pasal 77A memungkinkan pengusaha memperlakukan pekerja kontrak secara semena-mena.

Seperti halnya dalam Tir-3, wartawan cenderung mengidentifikasi dirinya sebagai pihak yang kontra dengan RUU Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

*Yang sulit dijawab adalah seberapa besar dan signifikan sesungguhnya aspirasi serta partisipasi masyarakat berpengaruh dalam proses pembahasan substansi rancangan undang-undang yang sedang dibahas? (Tir-3/kal-46)*

Pada kutipan di atas, wartawan mengidentifikasi dirinya dengan Joko Riskiyono yang mempertanyakan pengaruh dari aspirasi buruh pada pengambilan keputusan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, wartawan menghadirkan pertanyaan retorik kepada pembaca mengenai hal tersebut.

Berdasarkan teks dan struktur teks yang telah ditemukan, dapat disimpulkan bahwa Tirtoid cenderung berpihak kepada pihak yang kontra dengan Omnibus



Law RUU Cipta Kerja. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosiana Diah Rahmawati pada tahun 2020. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Mahasiswa dan Masyarakat sipil dilekati verba dengan konotasi positif, sedangkan Aparat dan Pemerintah dilekati dengan verba berkonotasi negatif. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa peristiwa Reformasi Dikorupsi Tempo memiliki kecenderungan mengambil posisi di samping mahasiswa dan masyarakat sipil (Rahmawati: 2020, hal. 63).

#### **4.2. Pola Produksi dan Konsumsi Tirto.id**

Analisis praktik kewacanaan ini memfokuskan kepada pola produksi dan konsumsi teks. Kemudian hal ini menjadi pertimbangan dalam menganalisis wacana yang dihadirkan Tirto.id dalam kasus berita RUU Cipta Kerja. Sejalan dengan hal tersebut, Eriyanto mengungkapkan bahwa proses produksi berhubungan dengan pola dan rutinitas pembentukan berita di meja redaksi. Rutinitas inilah yang memberikan pengaruh dalam proses produksi sebuah teks berita. Oleh sebab itu, praktik kewacanaan merupakan unsur yang penting dalam melihat sebuah wacana yang dihadirkan media massa.

Pada era sebelum reformasi, media massa dikekang oleh pemerintah dengan memilah berita apa saja yang layak ditampilkan ke masyarakat. Tidak sedikit berita yang dicekal oleh pemerintah karena mengkritisi pemerintah, salah satunya ialah Tempo. Kemudian, sejak jatuhnya era Orde Baru, media massa bebas untuk menyatakan pendapat. Hal ini menjadi tantangan bagi media untuk menghadirkan berita yang tidak menyudutkan pihak atau golongan tertentu.

Tirto.id dalam *website*-nya menerjemahkan visi Jernih, Mengalir, Mencerahkan sebagai keharusan menyajikan tulisan-tulisan yang jernih, mencerahkan, berwawasan, memiliki konteks, mendalam, investigatif, dan faktual. Hal ini merepresentasikan praktik jurnalisme presisi yang ditempuh oleh Tirto.id. Produk-produk jurnalistik yang dihasilkan oleh Tirto.id dilengkapi dengan data statistik yang dikemas dalam infografik dan video infografik, serta hasil analisis ratusan media massa di seluruh Indonesia yang disajikan dalam bentuk TiMeter atas tokoh Lembaga serta kasus yang dibicarakan dalam tiap laporan mendalam.

Dengan mengusung ideologi jurnalisme presisi, Tirto.id menjadi salah satu media yang menerapkan praktik *Cover Both Side*. Hal ini bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip jurnalisme. Dalam hal ini, dalam sebuah berita tidak boleh menampilkan hanya satu narasumber untuk menjaga keberimbangan data. Kemudian, kecepatan bukan sebuah hal yang diutamakan oleh Tirto.id. Perlu adanya data yang lengkap sebelum berita diunggah di website. Hal ini bertujuan untuk menjaga prinsip *cover both side*.

Berdasarkan pengamatan peneliti, berikut adalah konten yang dihadirkan oleh Tirto. *Indepth* merupakan laporan investigatif tentang objek yang bersangkutan dengan kepentingan publik, *Mild Report* merupakan laporan yang berisi data primer dan sekunder yang disertai infografik, *Current Issue* laporan tentang isu yang aktual dengan minimal dua narasumber, Mozaik merupakan artikel sejarah, baik tokoh maupun peristiwa, yang dikemas dengan menarik, dan Periksa Data merupakan analisis terkait isu-isu yang penting bagi masyarakat yang disertai



verifikasi data resmi. Berbagai proses yang dilakukan Tirto.id untuk menghasilkan sebuah teks berita yang akan dipublikasi. Setidaknya ada 9 tahapan yang dilalui Tirto.id dalam menyajikan berita.

*Planning Content* menjadi tahap pertama yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu, tepatnya pada hari senin dan Jumat. Tahap ini merupakan rapat yang membahas tentang konten yang akan disajikan. Kemudian, setelah hasil rapat didapatkan, reporter bertugas mencari data primer di lapangan. Selain data primer, tim redaksi juga membutuhkan data sekunder agar data yang didapatkan lebih kritis dan ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan penafsiran yang lebih baik terhadap sebuah fenomena yang akan diberitakan. Pada tahap selanjutnya, setelah semua data primer dan sekunder terkumpul, dilakukan analisis pada data yang telah didapatkan. Kemudian, pada tahap selanjutnya, Tirto melakukan sidang redaksi untuk memilih mana berita yang akan ditulis dan dimuat dalam *website*. Setelah melakukan sidang redaksi, penulis dan editor melakukan tugasnya. Pada tahap ini dibutuhkan ketelitian dalam menulis dan merangkai data-data yang didapat menjadi sebuah teks berita utuh. Setelah teks berita ditulis dan layak untuk ditampilkan dan dibaca, tahapan selanjutnya adalah pengunggahan ke *website*. Kemudian, berita yang sudah diunggah ke *website*, disebar melalui media social yang dimiliki oleh Tirto.id.

Proses produksi yang diterapkan merupakan representasi dari visi Tirto.id serta tertera dalam *website*-nya yang menyatakan bahwa “laporan-laporan yang tercipta dari kekuatan data, disampaikan secara baik, namun tak abai pada kecepatan adalah sumber informasi yang layak diperoleh oleh masyarakat Indonesia hari ini,

terutama para pengambil keputusan, dan pengendali perubahan.” Hal tersebut mencerminkan visi Sapto Anggoro selaku CEO Tirto.id yang berupaya membangun peradaban baru jurnalisme daring Indonesia. Tidak hanya cepat dan *clickbait*, melainkan berita yang mencerdaskan pembaca.

Selain itu, hadirnya infografik dalam setiap berita dan artikel menjadi daya tarik tersendiri di era sosial media. Infografik merupakan ilustrasi data yang bertujuan untuk mendukung penulisan artikel. Selain desain infografik yang menarik juga merangkum data dan fakta sehingga mudah dipahami. Hal ini merupakan inovasi dalam jurnalisme daring di Indonesia.

Kemudian, dengan adanya media sosial, hal ini memudahkan khalayak untuk mengakses langsung ke berita yang diinginkan. Tirto.id, yang sejak awal merupakan media massa daring, menggunakan media sosial sebagai medium penyampaian berita. Hadirnya media sosial memudahkan penggunanya untuk memilih berita yang ingin dibaca. Artikel dan berita yang ditulis oleh redaksi Tirto.id dapat diakses secara langsung melalui fitur *swipe up* di Instagram. Selain itu, Tirto.id juga menggunakan media *Twitter* dan *Facebook* untuk menyebarkan tautan yang langsung menuju ke artikel atau berita. Serta *Youtube* untuk membagi informasi dalam format video. Hal ini sesuai dengan target pasar Tirto.id yaitu generasi milenial.

Jurnalisme presisi yang diterapkan oleh Tirto.id tidak bisa dilakukan tanpa adanya kemandirian dalam mengelola media massa. Pendanaan Tirto.id dilakukan secara mandiri oleh Sapto Anggoro selaku Pimpinan Redaksi, Teguh Budi Santoso selaku *Chief Content Officer*, dan Nur Samsi selaku *Chief Technology*



*Officer*. Selain itu, pendanaan didapatkan dari iklan yang masuk. Kemandirian Tirto.id dalam mengelola keuangan membuatnya terbebas dari kepentingan pihak manapun. Seperti yang tertulis dalam *website*-nya bahwa “Tirto.id berdiri di atas dan untuk semua golongan, serta non-partisan. Tirto.id tidak bekerja untuk kepentingan politik mana pun.”

Selain ideologi yang diusung oleh Sapto Anggoro, jurnalis juga mengambil peran penting dalam proses produksi sebuah teks berita. Zen RS (2017, para. 23) mengungkapkan bahwa “jurnalis di Tirto.id memiliki latar belakang penulis, baik esai, novel, puisi, maupun cerita pendek. Selain itu, mereka juga memiliki sejarah membaca buku yang baik, terutama keterlibatan dengan diskusi terhadap wacana.” Oleh sebab itu, setiap peristiwa memiliki sudut pandang yang berbeda. Selain itu, hal tersebut berguna untuk menarasikan data dengan baik kepada khalayak pembaca. Zen RS (2017, para 30) mengungkapkan bahwa jurnalisme data tidak hanya sekadar kedalaman data, tetapi juga kecakapan dalam menarasikan data.

Ketersediaan data merupakan pendukung kerja jurnalistik. Zen RS (2017, para 39) mengungkapkan bahwa Tirto.id berlangganan riset-riset dari lembaga-lembaga statistik besar di dunia untuk dimanfaatkan untuk sumber tulisan. Selain dari lembaga statistik, Tirto.id juga memiliki tim litbang yang melakukan riset di lapangan untuk mengumpulkan data. Kemudian, ada juga tim litbang yang mengumpulkan data ke institusi pemerintah untuk informasi dan anggaran terkait dengan pemerintah yang tidak bisa diakses.



Data-data yang diperoleh inilah yang dijadikan sebagai sumber data dalam menulis sebuah berita atau artikel. Selain data yang dioleh menjadi sebuah berita, Tirto juga menghadirkan konten Periksa Data yang terkait dengan isu tertentu. Hal ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan antara peristiwa dan data yang didapatkan. Media massa, dengan infrastruktur yang mumpuni, memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan data yang didapatkan agar tidak terjadi perdebatan di khalayak.

Dalam mewujudkan ideologinya, jurnalisme presisi, Tirto.id memiliki beberapa keunggulan, yaitu berpegang teguh pada prinsip jurnalisme, memiliki jurnalis yang berpengalaman dan terampil, riset dan sumber data yang lengkap, serta independensi yang dimiliki oleh Tirto.id. Sejalan dengan hal tersebut, Ciptadi dan Armando (2018), mengungkapkan bahwa “berita panjang, mendalam, *cover both sides*, dan penuh data merupakan bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan *Tirto* dengan upaya untuk mewujudkan visi membangun peradaban baru literasi daring di Indonesia.”

#### 4.3. Pengaruh Konteks terhadap Teks Berita Tirto.id

Eriyanto (2001, hal. 320) mengungkapkan bahwa analisis *sociocultural practice* melihat bahwa wacana yang muncul dalam media massa turut dipengaruhi oleh konteks sosial yang ada di luar media. Pada tahap ini, Fairclough membuat tiga tahap analisis yang meliputi situasional, institusional, dan sosial.

##### 4.3.1. Situasional

Pada tahap ini memperlihatkan bagaimana kondisi dan situasi ketika sebuah teks berita diproduksi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebuah teks tidak bisa



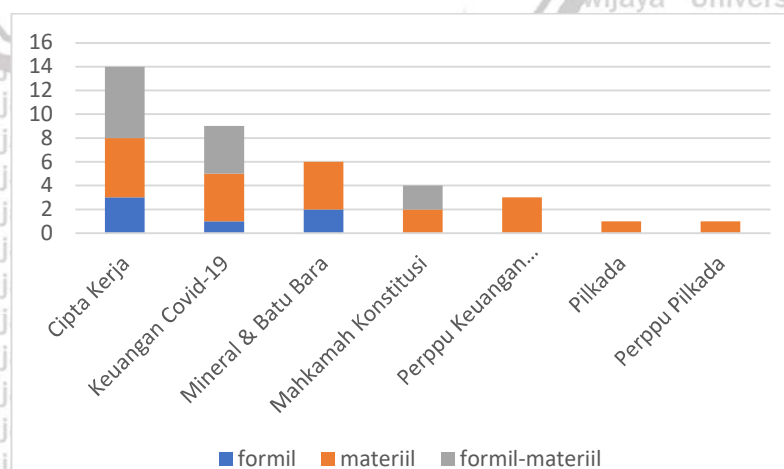
dipisahkan dari konteks. Sama halnya dengan teks berita tentang RUU Cipta Kerja yang ditulis oleh Tirto.id. Peneliti melihat bahwa teks berita yang dihadirkan oleh Tirto.id mengikuti wacana yang berkembang di masyarakat.

Salah satu wacana ada di masyarakat yang berkaitan dengan RUU Cipta Kerja adalah penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja yang berimbas pada kesejahteraan buruh. Sejak awal disusun, RUU Cipta Kerja mendapatkan banyak kritik dari masyarakat. Penyebabnya adalah penyusunan regulasi yang tidak transparan dan kepentingannya hanya mengakomodasi pengusaha. Penolakan dilakukan oleh berbagai pihak, dari buruh, masyarakat sipil, hingga pemuka agama.

Kemudian, survey dari katadata menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja merupakan aturan yang paling sering diajukan banding ke Mahkamah Agung.

Dari 38 perkara gugatan uji materi UU sepanjang tahun 2020, UU Cipta Kerja merupakan UU yang paling banyak diajukan, yaitu sebanyak 14 perkara. Berikut disajikan rinciannya dalam bentuk diagram.

**Gambar 4.1 Uji Materi UU yang Disahkan pada 2020**



Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat perbandingan yang signifikan antara UU Cipta Kerja dengan UU yang lain terkait jumlah pengajuan ke Mahkamah Agung. UU Cipta Kerja mendapat gugatan sebanyak 14 perkara, sementara UU keuangan negara untuk Covid-19 sebanyak 9 perkara, UU Minerba sebanyak 6 perkara, UU MK sebanyak 4 perkara, Perppu keuangan Covid19 sebanyak 3 perkara, dan UU Pilkada dan Perppu Pilkada mendapat masing-masing satu gugatan. Dari hasil tersebut, menunjukkan banyaknya permasalahan dari UU Cipta Kerja, mulai dari menghilangkan jaminan, perlindungan, dan kesejahteraan buruh hingga potensi perusakan lingkungan.

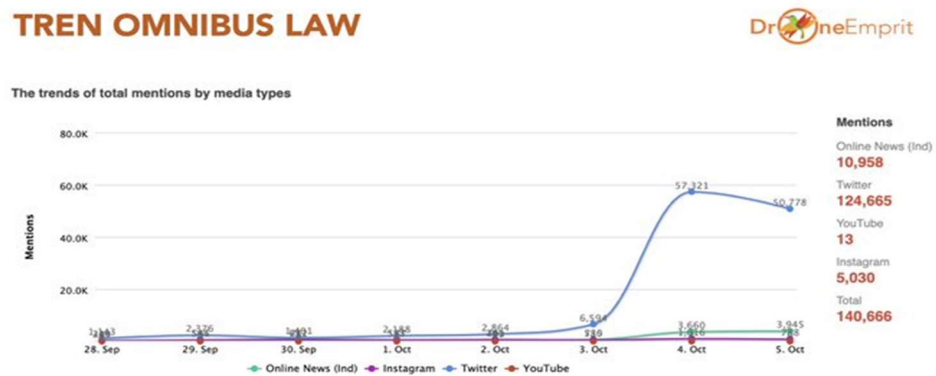
Sejak RUU Cipta Kerja dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo saat pelantikan dirinya sebagai presiden pada 20 Oktober 2020, banyak penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Hingga disahkan secara mendadak pada tanggal 5 Oktober 2020, masih belum ada draft final yang disahkan. Hal tersebut memicu elemen-elemen dalam masyarakat untuk melakukan aksi massa menolak RUU Cipta Kerja. Selain penolakan lewat aksi massa, penolakan juga dilakukan dengan mengolah informasi dan disebar melalui sosial media.

Media sosial merupakan wahana di mana setiap orang dapat berinteraksi dalam cakupan yang luas. Interaksi di media sosial turut memberikan pengaruh yang signifikan pada isu RUU Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna media sosial yang ikut membahas serta tagar yang sering *trending* di media sosial. Merujuk pada survey yang dilakukan oleh Drone Emprit, bahwa



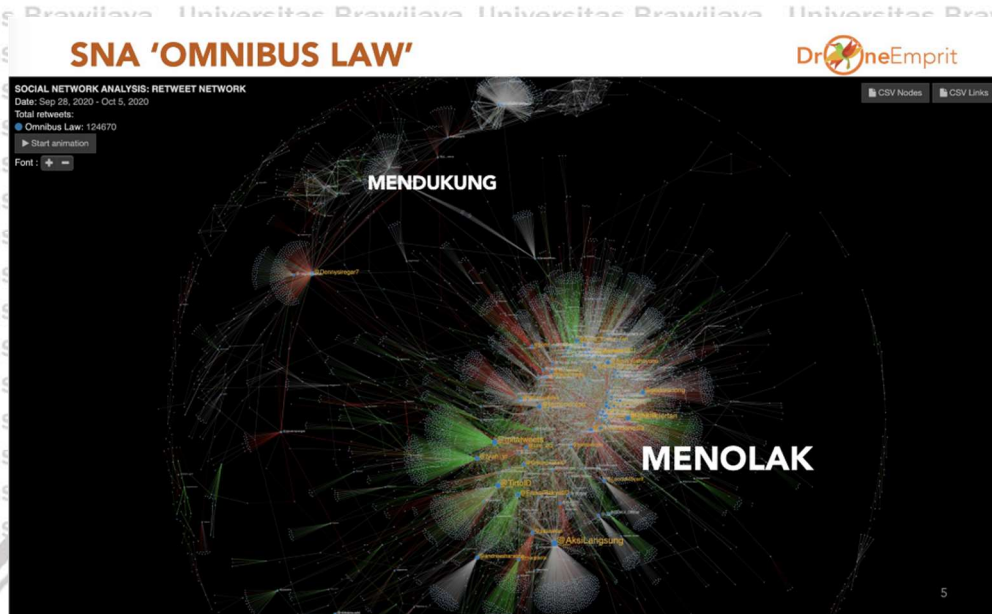
terdapat penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja di banyak media sosial. Berikut disajikan interaksi di media sosial.

**Gambar 4.2 Tren Media Sosial pada 4 Oktober 2020**



Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa sebelum tanggal 4 oktober 2020 percakapan di media sosial hanya berada di kisaran dua ribu percakapan di twitter. Namun, interaksi di media sosial melonjak pesat pada tanggal 4 Oktober 2020. Hal ini dipengaruhi oleh rapat pengesahan RUU Cipta Kerja yang diadakan secara mendadak oleh DPR pada Sabtu malam. Selain itu, terdapat *stop press* dari Tirto.id pada tanggal 5 Oktober 2020 jam 18.12 yang menyatakan bahwa omnibus RUU Cipta Kerja sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang. Ketergesa-gesaan DPR dalam mengesahkan RUU Cipta Kerja memicu penolakan dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peta percakapan yang dibuat oleh Drone Emprit.

Gambar 4.3 Sebaran Percakapan di Twitter



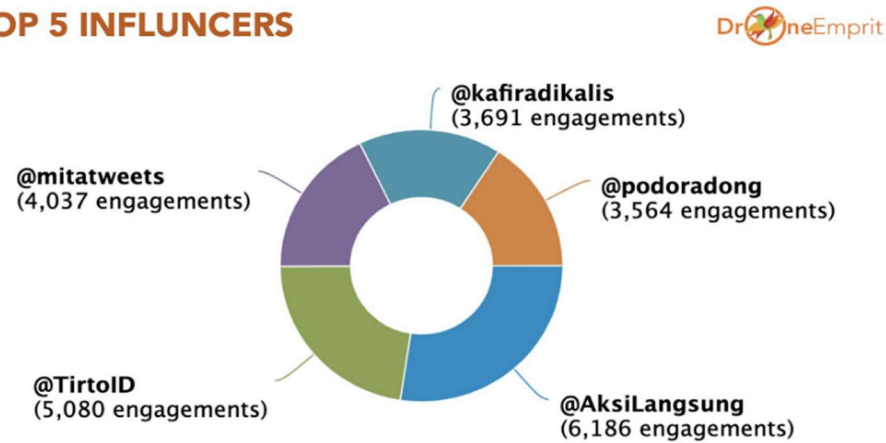
Dari *Social Network Analisis* yang dilakukan oleh Drone Emprit terkait percakapan UU Cipta Kerja, dapat dilihat bahwa *cluster* menolak mendominasi percakapan di media sosial, sedangkan *cluster* mendukung sangat sedikit dan berada di pinggiran. *Cluster* menolak didominasi oleh berbagai elemen yang meliputi Media Massa, Aktivis, Serikat Pekerja, dan Oposisi. Lebih lanjut,

Dalam percakapan di Teitter terdapat akun yang dapat mempengaruhi linimasa dikenal sebagai *influencer*. *Influencer* berperan untuk menarik perhatian warganet pada isu penolakan RUU Cipta Kerja. Drone Emprit mengelompokkan beberapa influencer yang memengaruhi isu RUU Cipta Kerja. Berikut 5 akun yang mendapat interaksi paling banyak.



Gambar 4.4 Akun yang Mendapatkan *engagements* Terbanyak

### TOP 5 INFLUNCERS



Percakapan di media sosial dapat dilihat dari tagar atau *hashtag* yang digunakan oleh warganet. Tagar berperan sebagai identifikasi terhadap isu yang sedang dibahas. Dalam percakapannya, pembahasan di media sosial didominasi oleh tagar yang menolak RUU Cipta Kerja. Secara lebih rinci, berikut disajikan tagar yang sering digunakan dalam percakapan di sosial media terkait RUU Cipta Kerja.

Gambar 4.5 Tagar yang Sering Digunakan

### TOP HASHTAGS



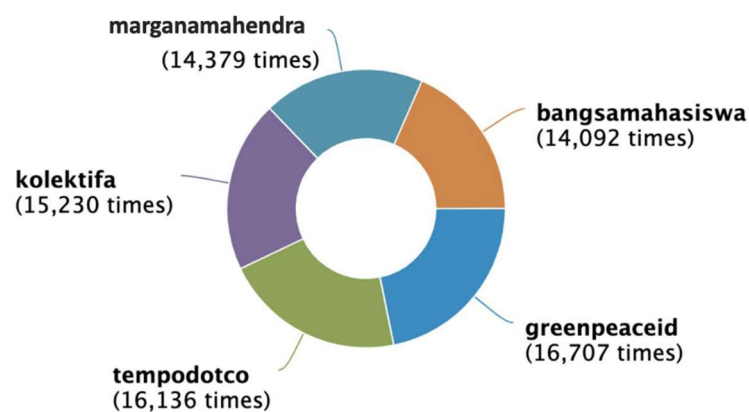
Dalam gambar di atas, tagar-tagar yang dominan cenderung menunjukkan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat dari kata dan frasa yang digunakan, seperti *MosiTidakPercaya*, *GagalkanOmnibusLaw*, hingga *DPR KhianatiRakyat*. Besarnya massa di sosial media yang menolak RUU Cipta Kerja menunjukkan bahwa media sosial menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi.

Selain di Twitter, di Instagram juga mengalami hal yang sama. Instagram merupakan media sosial yang paling sering digunakan oleh generasi milenial. Kemudian, dalam melakukan penolakan, warganet menggunakan konten yang berisi penolakan dan sindiran kepada pemerintah. Berikut konten dari *Influencer* yang mendapatkan likes terbanyak.

**Gambar 4.6 Akun Instagram Dengan *Like* Terbanyak**

#### MOST LIKED ACCOUNTS (INSTAGRAM)

DroneEmprit

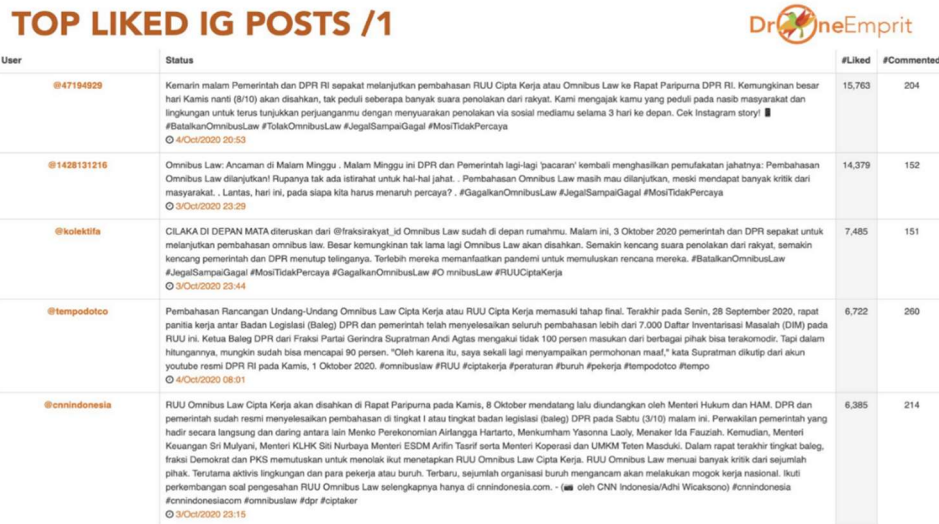


Selain itu, ada juga narasi yang mendapatkan perhatian dari warganet. Beberapa narasi tersebut merupakan kekecewaan, kritikan, hingga ajakan untuk menolak RUU Cipta Kerja. Narasi tersebut dapat dilihat di takarir gambar yang



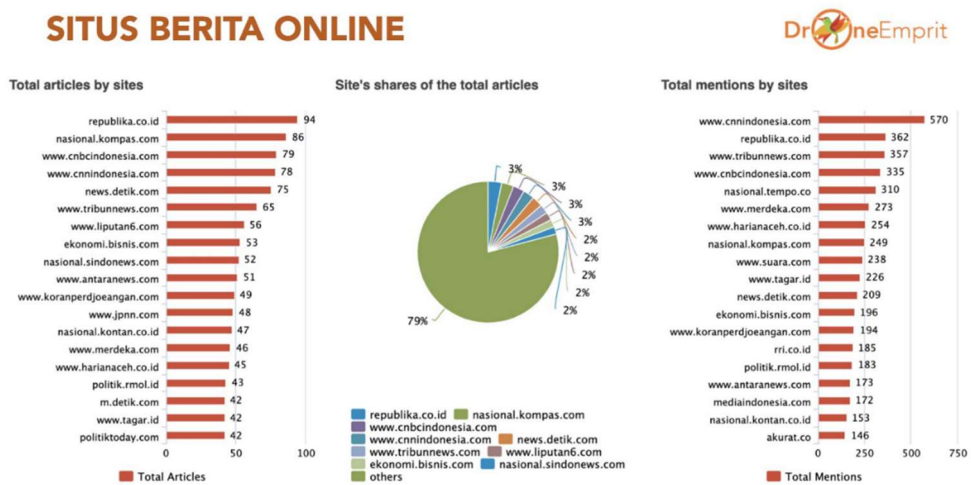
berada di bawah gambar. Berikut adalah narasi-narasi yang paling banyak mendapatkan perhatian dari warganet.

Gambar 4.7 Narasi yang Sering Mendapatkan Perhatian



Ramainya media sosial memiliki imbas kepada media massa daring. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya portal media massa daring yang menurunkan artikel mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Berikut adalah data terkait portal berita yang paling banyak menurunkan berita terkait RUU Cipta Kerja.

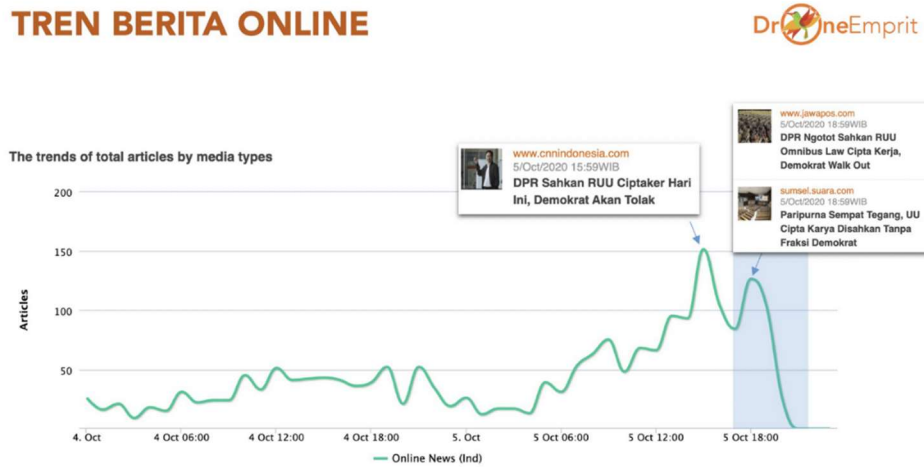
Gambar 4.8 Situs Berita Online







Gambar 4.10 Tren Berita Online



. Berdasarkan data-data diatas, penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi fenomena yang paling banyak diekspos oleh media massa. Selain itu, perhatian publik lebih dominan tertuju kepada isu penolakan RUU Cipta Kerja. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Tirto.id memberitakan fenomena tersebut. Dalam pemberitaannya, objektivitas Tirto.id lebih kepada buruh yang menjadi korban dalam pengesahan RUU Cipta Kerja. Konstruksi berita tersebut memberikan informasi kepada pembaca agar menolak RUU Cipta Kerja yang memberi menghilangkan jaminan, perlindungan, dan kesejahteraan buruh.

#### 4.3.2. Institusional

Pada tahap analisis institusional melihat bagaimana institusi organisasi media massa, baik internal maupun eksternal, memiliki pengaruh terhadap media massa. Dalam hal ini, pihak tersebut memiliki kekuasaan yang mengatur redaksional hingga manajerial. Institusi ini bisa berupa pemilik modal ataupun institusi politik. Habermas (dalam Supriadi: 2017, hal.16) mengungkapkan

bahwa “komodifikasi yang dilakukan oleh kalangan pengusaha terhadap berita dan pers menjadikan ruang-ruang kritis masyarakat semakin berkurang.”

Tirto.id, secara institusi, tidak memiliki afiliasi dengan pihak manapun. Hal ini berpengaruh terhadap proses produksi berita, baik secara redaksi maupun managerial. Sehingga, tidak ada intervensi dari pihak lain dalam produksi berita. Hal inilah yang mempengaruhi gaya bahasa Tirto.id yang cenderung terbuka, hiperbola dan sarkasik.

Sejak awal berdiri, pendanaan Tirto.id dilakukan secara mandiri oleh Sapto Anggoro, Teguh Budi Santosa, dan Nur Samsi. Selain menjalankan media massa, mereka diketahui menjalankan perusahaan bernama Binokular Media Utama yang bergerak dibidang media monitoring. Sapto mengungkapkan bahwa nilai perusahaan ini diproyeksikan bernilai lebih dari Rp. 400 miliar. Selain itu, pendanaan juga diperoleh dari iklan yang masuk. Setiap iklan yang masuk bernilai hingga 50 juta rupiah. Pengelolaan secara mandiri mewujudkan media massa yang independen dalam menentukan berita yang layak dipublikasi. Hal ini menjaga media massa tidak menjadi sekadar perdagangan, tetapi sebagai ruang publik kritis

Hubungan antara Tirto.id dengan latar belakang Sapto Anggoro selaku Pimpinan Redaksi tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari keputusan, pemikiran dan latar belakang yang dimilikinya dalam membangun peradaban media massa daring di Indonesia. Selain itu, ideologi Sapto Anggoro tercermin secara tidak langsung dalam teks berita yang diproduksi Tirto.id. Teks yang



dihasilkan oleh sebuah media massa pada dasarnya tidak hanya realita yang digambarkan oleh media tetapi hasil dari negosiasi dalam ruang kerja.

Secara ideologi, Tirto.id merepresentasikan ideologi jurnalisme presisi melalui teks yang dimuat. Data yang dikemas dalam bentuk infografik merupakan wujud ideologi jurnalisme presisi yang dijalankan oleh Tirto.id. Selain itu, kedalaman data dan narasi yang panjang menunjukkan bahwa Tirto membangun peradaban baru jurnalisme daring di Indonesia. Media massa sebagai lembaga publik semestinya berperan aktif dalam membentuk ruang sosial yang kritis. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan mengenai RUU Cipta Kerja yang melibatkan berbagai elemen yang ada di masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa, ahli, DPR, hingga Fraksi Partai.

Dalam konteks berita RUU Cipta Kerja, Tirto cenderung membela buruh yang notabene adalah korban dari RUU Cipta Kerja. Hal ini dibuktikan oleh pilihan bahasa yang digunakan oleh Tirto.id dalam sebuah teks berita. Selain itu, Tirto.id membingkai wacana tersebut dengan menampilkan kekurangan dan dampak negatif dari pasal-pasal yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja.

Dalam hal ini, Tirto.id sebagai media yang independen memiliki agenda untuk menjalankan fungsi kontrol sosial yang menyangkut kepentingan publik.

#### **4.3.3. Sosial**

Wacana dalam teks berita dipengaruhi oleh faktor sosial yang berada dalam masyarakat. Faktor sosial ini meliputi sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem budaya masyarakat dalam sebuah negara. Tindakan individu dipengaruhi oleh nilai, aturan, norma, dan keyakinan yang melingkupi suatu

kelompok dalam tataran masyarakat.. Pada era Soeharto menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, media menjadi alat propaganda untuk melanggengkan kekuasaan. Sementara itu, media yang melakukan kritik terhadap pemerintah mendapatkan tindak represif berupa pemberedelan.

Namun, hal itu berubah semenjak era reformasi, khususnya industri jurnalistik dan media. Akhirnya, negara Indonesia, sebagai penganut sistem demokrasi, memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini dapat dilihat dari sub-bab sebelumnya mengenai penolakan masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja melalui sosial media.

Salah satu sektor yang mengalami perkembangan secara masif ialah teknologi dan informasi. Hal ini dilihat dari survey yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia) yang menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada 2019-2020 mencapai 197,71 jiwa dari total 266,91 jiwa penduduk Indonesia. Dengan adanya internet memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan memenuhi kebutuhan lainnya.

Adanya teknologi, khususnya sosial media, juga berperan dalam menciptakan ruang-ruang publik yang lebih luas. Friedland, Hove, dan Rojas (dalam Rahmawan, dkk: 2020, 127) mengungkapkan bahwa pemahaman terkait hal-hal ini akan secara fundamental mengungkap bagaimana teknologi digital, alam hal ini, misalnya, dianggap dapat menciptakan ruang-ruang publik baru untuk proses komunikasi, dan interaksi yang terjadi secara demokratis dan organik, untuk memecahkan berbagai permasalahan publik, serta menyuarakan dan mengamplifikasi kepentingan publik yang riil di masyarakat. Dengan



adanya ruang publik ini, masyarakat memanfaatkan internet untuk menciptakan gerakan sosial melalui sosial media.

Penggunaan sosial media sebagai penyampai aspirasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap kondisi politik yang sedang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari survey yang dilakukan oleh DroneEmprit bahwa opini publik didominasi oleh penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Selain itu, penolakan yang terjadi dilakukan oleh kelompok yang beragam, karena RUU Cipta Kerja mencakup banyak sektor mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat turut mengubah bagaimana aktivisme beralih ke digital. Dengan adanya informasi yang lengkap seiring berkembangnya teknologi dan informasi memudahkan pendistribusian informasi, forum diskusi, ruang konsolidasi, hingga mengkoordinasi gerakan sosial. Hal ini dapat dilihat dari petisi penolakan RUU Cipta Kerja di Change.org yang mencapai lebih dari satu juta tanda tangan. Salah satu gerakan massa yang dilakukan melalui sosial media adalah #GejayanMemanggil pada kasus UU KPK, RKUHP, hingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Dengan adanya informasi di internet yang beragam, membuat masyarakat dapat melihat media massa mana yang berpihak kepada masyarakat dan penguasa. Media massa semestinya menjadikan berita tidak hanya sebagai komoditi, tetapi juga mencerdaskan pembacanya. Media massa sudah seharusnya menjadi jembatan untuk masyarakat menyampaikan aspirasi, ekspresi dan opini publik ke dalam sektor yang lebih luas. Selain itu, media

massa di negara demokrasi harus menjadi *the fourth estate*.. Yadi Supriadi (2017, hal.7) mengungkapkan bahwa istilah “kekuatan keempat” atau “the fourth estate” di dalam setiap literatur jurnalisme, kini diartikan sebagai kekuatan penyeimbang dari tiga kekuatan lain, yakni; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada sistem negara demokrasi, partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan.

Teks berita RUU Cipta Kerja diproduksi ketika jurnalisme daring mengalami penurunan dari segi kualitas. Suluh dan Ade (2018, hal. 69) mengungkapkan bahwa di era sekarang berita mementingkan cepat, ringkas, sensasional, dan dramatis. Hal ini justru seringkali mengabaikan prinsip dan etika jurnalisme. Media massa yang seharusnya mementingkan kepentingan publik dan melancarkan praktik demokrasi menjadi komoditas yang hanya menguntungkan satu pihak saja.

Ayatullah (2014, hal.14) mengungkapkan bahwa kini sistem pers mengalami perubahan menjadi bentuk konglomerasi media atau pemusatan kepemilikan perusahaan media. Tidak terlibatnya aktor politik dalam kepemilikan media Tirto.id membuat berita tidak ditanggapi oleh kepentingan di luar media. Bersamaan dengan hal tersebut, fungsi kontrol sosial dapat dijalankan sepenuhnya oleh sebuah media massa. Sebab, hal ini menjadi bentuk tanggung jawab pers dalam memberi pemahaman kepada pembaca terkait apa yang sedang terjadi.

Berita mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada website Tirto.id menggambarkan RUU Omnibus Law dan aktor dibalik pengesahannya secara



negatif. Sementara itu, pihak yang menolak sejak awal, seperti organisasi buruh, mahasiswa, aktivis, hingga Fraksi Partai Demokrat dan PKS digambarkan secara positif. Tirto.id memberikan porsi yang besar terhadap fenomena pengesahan RUU Cipta Kerja karena tidak adanya pengaruh nama besar dalam keredaksian Tirto.id. Hal ini menunjukkan bahwa Tirto.id tidak hanya menjadi media yang kritis, tetapi juga mencerdaskan pembacanya.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5. 1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap teks berita Omnibus Law UU Cipta Kerja dapat disimpulkan menjadi tiga poin, yaitu:

1. Dari segi teks, Tirto.id menggunakan aspek-aspek kebahasaan yang khas.

Dari segi kosakata, Tirto.id menggunakan pilihan bahasa seperti metafora, konjungsi, eufemisme dan disfemisme, serta repetisi. Sedangkan dari segi struktur kalimat, Tirto.id seringkali menggunakan sistem klausa yang mendahulukan aktor, sistem klausa yang mendahulukan sirkumtansi, dan sistem klausa pasif. Pilihan bahasa yang digunakan oleh sebuah media massa mencerminkan ideologi serta keberpihakan dalam sebuah fenomena.

Selanjutnya, pada tahap relasi teks berita RUU Cipta Kerja, wacana yang lebih digambarkan adalah pertentangan antara pihak pro (Pemerintah, DPR, dan Partai) dan pihak kontra (Buruh, Mahasiswa, dan beberapa ahli).

Kemudian pada tahap identitas, Tirto.id cenderung mengidentifikasi dirinya dengan pihak yang menolak RUU dibanding pihak yang menudukung. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang cenderung menggunakan kata dengan makna positif kepada pihak yang menolak RUU Cipta Kerja. Sebaliknya, pada pihak yang mendukung RUU Cipta Kerja cenderung menggunakan pilihan bahasa yang bermakna negatif.

2. Dari segi proses produksi teks, terdapat 9 alur produksi yang ditempuh oleh Tirto.id untuk menghasilkan sebuah artikel atau berita. Hal tersebut dilakukan



untuk mewujudkan ideologinya, yaitu jurnalisme presisi. Dalam mewujudkan ideologinya, Tirto.id memiliki beberapa keunggulan, yaitu memegang prinsip jurnalisme, adanya jurnalis yang berpengalaman dan terampil, riset dan sumber data yang lengkap, serta independensi yang dimiliki oleh Tirto.id.

3. Pada praktik sosiokultural melihat konteks sosial yang ada di masyarakat menentukan bagaimana wacana muncul dalam teks berita. Pada tahap situasi, peneliti melihat bahwa wacana yang berkembang di masyarakat turut mempengaruhi sebuah teks berita. Hal ini dapat dilihat dari survey di sosial media yang menunjukkan bahwa wacana penolakan terhadap UU Cipta Kerja lebih dominan. Selanjutnya pada tahap institusional, peneliti melihat bahwa tidak adanya pihak di luar media yang terlibat dalam ruang redaksi dan pihak internal yang tidak berafiliasi dengan pihak manapun membuat Tirto.id mampu menjalankan fungsi kontrol sosial yang menyangkut kepentingan publik. Kemudian, pada tahap sosial, peneliti melihat bahwa perubahan pola konsumsi informasi turut mengubah bagaimana wacana berkembang. Terjadi perubahan pada media massa daring yang hanya mementingkan kecepatan, ringkas, sensasional, dan dramatis. Hal tersebut tidak menjadi jalan yang ditempuh oleh Tirto.id karena media massa tidak hanya kritis, tetapi juga mencerdaskan pembacanya.

### 5. 2. Saran

Penulis sadar bahwa penelitian dengan judul “Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pemberitaan Omnibus Law UU Cipta Kerja Pada Situs Tirto.Id” masih

banyak kekurangan. Namun, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait tindak lanjut dari hasil penelitian ini.

1. Kepada Praktisi di Bidang Pendidikan.

Analisis wacana kritis dapat digunakan oleh guru untuk mengajarkan bagaimana hubungan antara bahasa dengan penggunaannya. Selain itu, Analisis wacana Kritis dapat membantu siswa berpikir kritis terhadap sebuah informasi atau peristiwa.

2. Kepada Penggiat Bahasa

Penelitian mengenai analisis wacana kritis harus terus dikembangkan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan budaya berpikir kritis terhadap sebuah fenomena terus lestari.

3. Kepada Media Massa

Tirto.id sebagai media massa yang kritis terhadap sebuah fenomena harus tetap meningkatkan kualitas dan kredibilitas agar dapat menjadi acuan bagi media massa baru. Dengan adanya peningkatan kualitas dan kredibilitas diharapkan Tirto.id menjadi referensi berita di tengah banjirnya informasi.

4. Kepada Mahasiswa/Peneliti.

Diharapkan tidak hanya fokus pada isu-isu yang sedang aktual saja, melainkan isu-isu yang terpinggirkan seperti gender, kekerasan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selain itu, masih banyak yang perlu diperhatikan, antara lain intensitas pengamatan terhadap objek kajian, wawancara mendalam, dan penggalian informasi yang berhubungan dengan objek kajian.



## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII]. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Assidik, Gallant Karunia dan B. Wahyudi Joko Santoso. 2016. *Citra Publik Presiden Republik Indonesia Pada Pemberitaan Di Harian Suara Merdeka, Tabloid*

*Tempo, Dan Harian Republika : Kajian Analisis Wacana Kritis Model*

Norman Fairclough. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5 (2), 201-215.

Asyir, Alfiah Khoiri dan Siti Nurbaya, 2019. *Konvergensi Media dan Mediamorfosis: Strategi Digitalisasi Majalah Moeslim Choice Dalam Proses Transformasi Basis Kerja*. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 1 (1). 52-67.

Ayatullah, A. L. 2014. *Korupsi dalam Wacana Pers Lokal: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap Teks Berita Kasus Hambalang Tahun 2013* pada Surat Kabar Malang Post. *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 3(1):1-16.

Ciptadi, Suluh Gembyong dan Ade Armando. 2018. *Upaya agensi melawan logika jangka pendek jurnalisme daring: studi kasus Tirto.id*. *Jurnal Komunikasi Indonesia*. Vol. VII No.1. Hal. 62-72.

Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Fahmi, I. (2016). Drone Emprit: Software for media monitoring and analytics.

Available at <http://pers.droneemprit.id>.

Haryatmoko. 2016. Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan

Teori, Metodologi, dan Penerapan. Jakarta: Rajawali Pers.

Idris, Muhammad. 2020. "Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU

Cipta Kerja". Moneykompas.com, 6 Oktober 2020. [Online].

Tersedia: <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulk>

[an-jokowi-ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all](https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all)

Keraf, Gorys. 2010. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Lexy. J. Moleong, (2000) Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja.

Posdayakarya.

Musrichah, Anggun Putri Aminatul. 2020. "Kasus Pembubaran Upacara Odalan di

Bantul Yogyakarta: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan

CNNIndonesia.com dan Solopos.com". Jalabahasa, Vol. 16, No. 1, Mei

2020, hlm. 25—42

Nuran Wibisono. 2018. "Ujung Perjalanan Rolling Stone Indonesia". Tirto.id, 4

Januari 2018. [Online]. Tersedia: [https://tirto.id/ujung-perjalanan-rolling-](https://tirto.id/ujung-perjalanan-rolling-stone-Indonesia-cCHX)

[stone-Indonesia-cCHX](https://tirto.id/ujung-perjalanan-rolling-stone-Indonesia-cCHX)



Pusparisa, Yoshepa. 2021. UU Cipta Kerja Mendominasi Pengujian di Mahkamah Konstitusi pada 2020. Databoks. [Online] Tersedia: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/21/uu-cipta-kerja-mendominasi-pengujian-di-mahkamah-konstitusi-pada-2020>

Rahmawan, Detta, Jimi Narotama Mahameruaji, dan Preciosa Alnashava Janitra. 2020. "Strategi Aktivisme Digital di Indonesia: Aksesibilitas, Visibilitas, Popularitas dan Ekosistem Aktivisme". Jurnal Manajemen Komunikasi. Vol.4, No. 2. Hal. 123-144.

Rahmawati, Rosiana Diah. 2020. Penggunaan Verba Material Sebagai Upaya Framing Tokoh Dalam Majalah Tempo Edisi Khusus Tokoh 2019: Massa Aksi (Kajian Linguistik Sistemik Fungsional). (Skripsi). Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.

Redaksi. 2017. "Zan RS: Kami Ingin Membangun Kultur Riset di Media". Remotivi.or.id, 8 Mei 2017. [Online]. Tersedia: <https://www.remotivi.or.id/wawancara/434/zen-rs-kami-ingin-membangun-kultur-riset-di-media>

Supriadi, Yadi. 2017. Relasi ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas. Kajian Jurnalisme, Vol. 1 No. 1. 1-20.

Suryadi, erisrawati. 2011. "peran media massa dalam membentuk realitas sosial" Jurnal ACADEMICA VOL.03 No. 02 Fisip Untad. Sulawesi Tengah.

Widji Agustin Sasmita. 2018. Strategi Redaksi Tirto.Id Dalam Penyajian Berita Di Media Online. (Skripsi). Tersedia:

[http://digilib.uinsby.ac.id/31544/3/Wiji%20Agustin%20Sasmita\\_B06215034.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/31544/3/Wiji%20Agustin%20Sasmita_B06215034.pdf)

Wiratno, Tri. 2018. Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.





### LAMPIRAN 1: TABEL EUFEMISME

1.	Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan <b>menegaskan</b> , harus ada pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan.	Tir-1/Kal-28
2.	Sedangkan berbagai elemen buruh <b>masih konsisten</b> menolak RUU Ciptaker.	Tir-1/Kal-31
3.	Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Danamon Dannis Senior yang menjadi perwakilan dari Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur menyatakan siap untuk melakukan <b>perlawanan</b> mengerahkan massa sebanyak-banyaknya.	Tir-2/Kal-18
4.	Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati sejak awal sudah <b>gigih mendesak</b> pemerintah dan DPR menghentikan—bukan menunda—pembahasan omnibus law.	Tir-3/kal-54
5.	<b>Desakan publik datang dari berbagai penjur</b> bahkan sejak tahun lalu.	Tir-5/kal-14
6.	Salah satu yang mengeluarkan mosi tidak percaya adalah Fraksi Rakyat Indonesia (FRI)--aliansi masyarakat sipil yang <b>paling getol</b> menolak RUU Ciptaker sejak Reformasi Dikorupsi--di berbagai kanal media sosial.	Tir-5/kal-16
7.	Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), kelompok mahasiswa, juga berencana melakukan " <b>perlawanan terbesar</b> aksi langsung batalkan omnibus law serentak nasional" dalam keterangan tertulis.	Tir-5/kal-25
8.	Aksi dilakukan sebagai <b>bentuk protes</b> atas rencana pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh dan diadakan di lingkungan kerja masing-masing, <b>sebagai upaya untuk menghindari penyebaran penularan wabah COVID-19</b> .	Tir-6/kal-15
9.	Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober 2020 meski mendapat penolakan dari <b>berbagai elemen masyarakat</b> .	Tir-8/kal-4
10.	Ketua SPPB Bandung Raya, Slamet Priatno mengatakan aksinya turun ke jalan itu <b>merupakan bentuk secara tegas</b> menolak UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah pada Senin sore, 5 Oktober 2020.	Tir-8/kal-54
11.	Serikat-serikat buruh, mahasiswa, petani, dan <b>banyak elemen masyarakat prodemokrasi</b> lain berencana menggelar demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja ke Senayan saat DPR menggelar rapat paripurna.	Tir-9/kal-11
12.	Selama delapan hari setelah pengesahan, terjadi <b>protes besar menentang omnibus law</b> setidaknya di 18 provinsi di Indonesia.	Tir-10/kal-25
13.	Terjadi kekerasan terhadap <b>jurnalis hingga paramedis yang menjalankan tugas sesuai undang-undang dan panggilan kemanusiaan</b> .	Tir-10/kal-27

14.	<b>Sebuah perkumpulan relawan kemanusiaan</b> yang biasa memberikan bantuan kepada setiap orang yang membutuhkan jasa ambulans.	Tir-11/kal-7
15.	Dengan disepakatinya UU Cipta Kerja Omnibus Law oleh mayoritas fraksi di DPR yang bertentangan dengan sebagian suara rakyat, <b>maka demonstrasi tampak menjadi upaya paling mungkin</b> , meski bukan paling baik.	Tir-12/kal-64
16.	Ita adalah bentuk <b>ikhtiar masyarakat</b> sebelum UU itu diteken Presiden.	Tir-12/kal-65



## LAMPIRAN 2: TABEL DISFEMISME

1.	Di tengah pandemi COVID-19 ini kata Nining <b>para wakil rakyat disebutnya tak punya empati.</b>	Tir-2/Kal-8
2.	‘Wakil rakyat dan pemerintah sudah tidak lagi peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat.	Tir-2/Kal-10
3.	Wakil rakyat <b>mengelabui publik</b> , buruh kecolongan.	Tir-3/kal-4
4.	Pemerintah dan DPR selangkah lagi berhasil mengesahkan <b>aturan hukum yang menuai banyak kritik</b> secara senyap dan kilat.	Tir-3/kal-23
5.	Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan alasan mereka keluar lantaran <b>tidak ada itikad baik</b> dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ataupun Kamar Dagang Industri (Kadin) mencari titik temu kesepakatan.	Tir-3/kal-31
6.	Namun sering kali partisipasi itu <b>sekadar untuk memenuhi tahapan pembuatan undang-undang</b> atau menunjukkan maksud baik.	Tir-3/kal-39
7.	Joko paham betul kendati partisipasi masyarakat sudah diberikan jalan, DPR sebagai perwakilan rakyat dari partai politik <b>“tentu memiliki kepentingan”</b> sebagai bagian lembaga legislatif.	Tir-3/kal-47
8.	Keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat lebih sebagai <b>pencitraan belaka.</b>	Tir-3/kal-48
9.	Dalam omnibus law, kepentingan yang diakomodasi pemerintah dan DPR dalam pembentukan aturan ini <b>jelas investor.</b>	Tir-3/kal-50
10.	Bagaimanapun, mereka, para pengusaha dan investor, adalah pelaku utama yang diakomodasi pemerintah dalam omnibus law.	Tir-3/kal-65
11.	Kenihilan masalah cuti haid dan hamil dalam omnibus law bisa menjadi perkara lain ke depan karena bentroknnya aturan hukum.	Tir-3/kal-75
12.	Jika ditelaah satu per satu pasal dalam omnibus law, <b>banyak ketentuan yang belum jelas</b> tapi dilempar penyelesaiannya ke Peraturan Pemerintah daripada omnibus law.	Tir-3/kal-83
13.	Sekeras apapun protes dan usaha buruh menolak omnibus law, jika pemerintah dan DPR sudah satu suara, omnibus law <b>dengan segala polemiknya</b> tetap akan berlaku.	Tir-3/kal-97
14.	Terkait hal ini, para buruh akan melakukan aksi demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 sampai 8 Oktober 2020, menolak RUU yang dianggap memuat sejumlah <b>pasal bermasalah atau kontroversial.</b>	Tir-4/kal-4
15.	Ketentuan baru ini akan <b>memberikan kekuasaan pada pengusaha</b> untuk mempertahankan status pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu tak terbatas.	Tir-4/kal-14
16.	“Ini adalah <b>hal yang paling konyol.</b> RUU ini pantas disebut sebagai RUU Cilaka, karena <b>pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan bisnis,</b> ” ucap Manajer	Tir-4/kal-35

	Kampanye Pangan Air dan Ekosistem Esensial Nasional Walhi Wahyu A. Perdana dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2020).	
17.	Ketua AJI Bengkulu, Harry Siswoyo mengatakan RUU Cipta Kerja <b>berpotensi mengancam</b> nilai-nilai kebebasan pers bagi jurnalis, karena akan terjadi perubahan isi dari Pasal 11 UU Pers.	Tir-4/kal-37
18.	Lebih lanjut, Hary menilai <b>perubahan poin-poin dalam pasal ini jelas melanggar semangat UU Pers</b> sebelumnya, yang mengatur bahwa sengketa pers lebih didorong pada upaya korektif dan edukasi.	Tir-4/kal-46
19.	HNW menilai <b>ketentuan umum ini sangat berbahaya</b> dan perlu menjadi perhatian bersama.	Tir-4/kal-55
20.	Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), sebuah peraturan yang disusun dengan metode omnibus, <b>disebut-sebut sebagai produk hukum yang melayani segelintir pihak berkuasa</b> , rampung dibahas di tingkat I pada Sabtu (3/10/2020) lalu jelang tengah malam.	Tir-5/kal-4
21.	"Sikap keras kepala mengesahkan omnibus law Cipta Kerja tepat di saat rakyat dilanda kesusahan besar akibat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi menunjukkan Pemerintah dan DPR telah menjadi <b>antek penjajahan investor jahat dan koruptor</b> ," kata mereka.	Tir-5/kal-18
22.	Namun Pemerintah dan DPR tak memberikan pilihan lain karena <b>mereka pun tak mendengar suara publik</b> .	Tir-5/kal-23
23.	Alasan serupa bisa dipakai oleh Jokowi mengingat <b>pasal-pasal dalam RUU Ciptaker juga bermasalah dan merugikan pekerja</b>	Tir-5/kal-36
24.	RUU Cipta Kerja Omnibus Law juga ditolak oleh jutaan buruh di Indonesia <b>karena dianggap akan merugikan para buruh</b> .	Tir-6/kal-10
25.	"Nah, hal-hal lain adalah tentang cuti atau cuti bagi pekerja perempuan khususnya, kemudian juga kita minta jangan ada yang hilang jaminan sosial buat karyawan kontrak dan 'outsourcing'. Kemudian, jangan ada juga <b>waktu kerja yang eksploitatif karena itu adalah salah satu bentuk perbudakan</b> ," ujar Said Iqbal.	Tir-6/kal-32
26.	RUU Cipta Kerja Dinilai Ancam Hak Asasi Manusia	Tir-6/kal-33
27.	Amnesty menilai RUU Ciptaker, baik proses legislatif maupun substansi-nya, berpotensi <b>melanggar hak asasi manusia (HAM) dan bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia untuk melindungi HAM</b> , terutama menyangkut hak untuk bekerja dan hak di tempat kerja.	Tir-6/kal-35
28.	Pemerintah <b>selalu berdalih</b> bahwa RUU Ciptaker bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempermudah bisnis.	Tir-6/kal-40
29.	RUU tersebut dapat <b>merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan</b> yang dijamin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).	Tir-6/kal-43



30.	Ketentuan baru ini akan <b>memberikan kekuasaan pada pengusaha</b> untuk mempertahankan status pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu tak terbatas.	Tir-6/kal-51
31.	Sementara dalam prosesnya, penyusunan Omnibus Ciptaker <b>tidak terbuka dan tidak transparan.</b>	Tir-6/kal-61
32.	tirto.id - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai UU Cipta Kerja telah <b>melonggarkan sanksi bagi korporasi pelanggar ketentuan lingkungan hidup.</b>	Tir-7/kal-4
33.	“Skema sanksi berubah, sekarang administratif dulu. Dulu pidana-perdata. Sekarang hanya administratif. <b>Itu jahat sekali dalam UU Cipta Kerja.</b> Dibiarkan beberapa hal,” ucap Wahyu dihubungi, Selasa (6/10/2020).	Tir-7/kal-6
34.	Dalam proses pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU ini, terdapat beberapa fakta mulai dari <b>257 anggota DPR yang bolos saat pengesahan</b> , hingga Partai Demokrat yang walk out dari Paripurna.	Tir-8/kal-5
35.	Ketua DPR RI Puan Maharani <b>mematikan mikrofon</b> Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman yang meminta diberikan waktu berbicara menyampaikan pandangan fraksi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja.	Tir-8/kal-22
36.	Azis terlihat <b>tak mempedulikan</b> desakan dari Benny.	Tir-8/kal-31
37.	<b>Suaranya tak didengar</b> sembari memberikan kesempatan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk bicara.	Tir-8/kal-32
38.	RUU yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR ini akan <b>merusak iklim investasi dan melanggar standar praktik terbaik internasional</b> yang ditujukan untuk mencegah konsekuensi berbahaya dari aktivitas bisnis.	Tir-8/kal-39
39.	<b>Skandal DPR dan Pemerintah Jokowi Mengesahkan RUU Cipta Kerja</b>	Tir-9/kal-1
40.	Beginilah jalannya pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober: <b>Prosedur membuat regulasi ditabrak dan mekanisme dibolak-balik.</b>	Tir-9/kal-4
41.	<b>Sebaliknya, publik diminta percaya</b> bahwa undang-undang ini dibuat untuk kemaslahatan bersama.	Tir-9/kal-6
42.	Di sisi lain, <b>pemerintahan Joko Widodo menuduh tanpa bukti</b> bahwa publik yang memprotes regulasi ini terhasut hoaks.	Tir-9/kal-7
43.	<b>Tanpa Naskah Final, Tetap Disahkan DPR</b>	Tir-9/kal-75
44.	Amin AK dari Fraksi PKS mengatakan pengesahan UU Cipta Kerja <b>sangat tak lazim.</b>	Tir-9/kal-76
45.	Ia <b>berdalih</b> ada versi draf beda halaman karena perbedaan jenis kertas.	Tir-9/kal-105
46.	Beberapa perbaikan itu <b>patut diduga menambah perihal yang substansial</b> , meski dokumen UU Cipta Kerja secara siluman sudah disahkan pada 5 Oktober.	Tir-9/kal-119

47.	Terhitung delapan hari kerja sejak disahkan, salinan resmi <b>undang-undang kontroversial</b> tersebut diserahkan.	Tir-10/kal-5
48.	Sebelum akhirnya Jokowi menerima undang-undang Cipta Kerja, <b>pengesahannya di tangan legislatif tampak tergesa-gesa.</b>	Tir-10/kal-10
49.	Ribuan pendemo <b>ditangkap, terluka dan ditahan.</b>	Tir-10/kal-26
50.	Menurut Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen, I Made Leo, perubahan tersebut <b>menabrak aturan DPR sendiri</b> yakni nomor 2 tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.	Tir-10/kal-41
51.	Ambulans yang mencoba meloloskan diri dari razia lantas <b>ditembaki kemudian orang yang ada di dalamnya ditangkap.</b>	Tir-11/kal-5
52.	"Operator [ambulans] yang depan <b>diturunkan secara paksa dengan dibanting.</b> Jadi driver yang belakang panik. Akhirnya mundur, Dia takutnya kalau tetap berhenti akan seperti itu juga [dibanting polisi]," kata Kahfi.	Tir-11/kal-15
53.	Para relawan tersebut juga <b>dipukul sampai jatuh dan "diseret ke mobil [polisi] sambil dipukul dengan tongkat dan ditendang."</b>	Tir-11/kal-47
54.	Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan tindakan polisi yang <b>merazia bahkan menembaki ambulans dan menangkap relawan keliru.</b>	Tir-11/kal-50
55.	Kendati UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat dan Presiden juga mengamplifikasinya, saat itu, pada Oktober 2019, <b>polisi melakukan diskresi yang membingungkan.</b>	Tir-12/kal-5
56.	<b>Polri mungkin agak trauma</b> dengan demonstrasi tanggal 21-23 Mei 2019 di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berujung ricuh.	Tir-12/kal-9
57.	Selain bertentangan dengan hak menyampaikan pendapat, <b>Polri juga melangkahi aturannya sendiri.</b>	Tir-12/kal-15
58.	<b>Slogan klise ala Polri</b> yang kerap digembar-gemborkan di mana-mana seperti 'Polri bersama rakyat' memang hanya jargon.	Tir-12/kal-41
59.	<b>Dalam konteks Omnibus Law, Polri bersama penguasa.</b>	Tir-12/kal-42
60.	Thomas P. Power, peneliti dari Universitas Nasional Australia, mencatat bahwa menjelang Pilpres 2019 <b>Presiden Joko Widodo menggunakan polisi untuk menindak kritik-kritik yang mengarah pada dirinya.</b>	Tir-12/kal-43
61.	Sedangkan peneliti dari Lowy Institute, Ben Bland, menyatakan harapan orang-orang bahwa <b>penggunaan polisi sebagai alat represi akan berhenti setelah Jokowi menang ternyata keliru.</b>	Tir-12/kal-49
62.	<b>Tindakan semena-mena dari polisi</b> seperti diuraikan sebelumnya tidak banyak diprotes oleh pimpinan partai.	Tir-12/kal-57



63.	<b>UU kontroversial tersebut</b> disahkan pada 5 Oktober, dan sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo 14 Oktober lalu.	TIR-13/kal-5
64.	Belum lagi mengenai <b>klaim-klaim</b> yang sempat diucapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin.	TIR-13/kal-11
65.	<b>Ketidakterbukaan draf UU yang memantik banyak kemarahan publik</b> itu pun akhirnya sampai merespons Komisi Informasi Pusat (KIP), yang menilai produk pembuatan legislasi ini <b>jauh dari praktik transparan.</b>	TIR-13/kal-15
66.	Fajri menilai <b>DPR RI tak berupaya membuat kejernihan informasi.</b>	TIR-13/kal-23

### LAMPIRAN 3: TABEL KONJUNGSI INTERNAL

No	Konjungsi yang Digunakan dalam Kalimat	Kodifikasi	Makna	Peran dalam kalimat
1.	<b>Sedangkan</b> perwakilan pemerintah dan DPD RI tak ada yang menolaknya.	Tir-1/Kal-8	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
2.	<b>Lantas</b> politikus Partai Gerindra tersebut segera meminta persetujuan forum.	Tir-1/Kal-9	Suksesi	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
3.	<b>Sedangkan</b> berbagai elemen buruh masih konsisten menolak RUU Ciptaker.	Tir-1/Kal-32	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
4.	<b>Dalam situasi ini</b> kata dia sudah tidak ada lagi kompromi dan negosiasi yang bisa dilakukan.	Tir-2/Kal-14	Simultan	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
5.	<b>Demikian</b> pernyataan kami kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan dukungan atas aksi nasional yang akan kami selenggarakan.	Tir-2/Kal-25	Penyimpulan	Menyampaikan kesimpulan, justifikasi, gagasan, tandingan, penolakan, dan pengakuan.
6.	<b>Seperti déjà vu</b> , pemerintah dan DPR sepakat terhadap pembahasan RUU omnibus law pada malam hari, Sabtu (3/10/2020).	Tir-3/kal-19	Persamaan	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen dan bukti-bukti
7.	<b>Tidak biasanya</b> , pembahasan undang-undang dilakukan pada akhir pekan dan lebih dari batas waktu aktivitas yang ditentukan di Gedung DPR/MPR.	Tir-3/kal-20	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
8.	<b>Namun</b> KSPSI AGN, KSPI, dan FSP Kahutindo keluar dari tim teknis omnibus law di tengah pembahasan pada medio 2020.	Tir-3/kal-30	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
9.	<b>Dari situ</b> barulah buruh mendapat manfaat.	Tir-3/kal-53	Simultan	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
10.	<b>Selain karena</b> minimnya pelibatan masyarakat sipil dalam merumuskan masalah, tujuan pemerintah dalam pembuatan RUU ini bisa menyimpang dari kepentingan tenaga kerja.	Tir-3/kal-56	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.
11.	<b>Sedangkan</b> Serikat buruh seperti KSPI dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) merasa kepentingan mereka tidak terwakili dalam omnibus	Tir-3/kal-60	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.



	law yang bakal disahkan DPR dalam rapat paripurna hari ini, Senin (5/10/2020).			
12.	<b>Jadi</b> memang sudah setengah hati dan nggak niat,” kata Mirah seperti dicatat Tempo.	Tir-3/kal-64	Penyimpulan	Menyampaikan kesimpulan, justifikasi, gagasan, tandingan, penolakan, dan pengakuan.
13.	<b>Bagaimanapun</b> , mereka, para pengusaha dan investor, adalah pelaku utama yang diakomodasi pemerintah dalam omnibus law.	Tir-3/kal-66	Penyimpulan	Menyampaikan kesimpulan, justifikasi, gagasan, tandingan, penolakan, dan pengakuan.
14.	<b>Namun</b> ini tidak bisa jadi jaminan.	Tir-3/kal-72	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
15.	<b>Sebelumnya</b> , pemerintah dan DPR menetapkan besaran maksimal uang penghargaan adalah 8 kali upah dalam omnibus law.	Tir-3/kal-73	Suksesi	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
16.	<b>Tapi ternyata</b> , pembahasannya tidak sesulit itu bagi pemerintah dan DPR.	Tir-3/kal-80	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
17.	<b>Padahal</b> Fraksi Partai Demokrat sudah mengingatkan pengesahan omnibus law terlalu buru-buru.	Tir-3/kal-83	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
18.	<b>Dengan paripurna hari ini</b> , masyarakat, terkhusus organ buruh, memang kecolongan.	Tir-3/kal-95	Simultan	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
19.	<b>Terkait hal ini</b> , para buruh akan melakukan aksi demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 sampai 8 Oktober 2020, menolak RUU yang dianggap memuat sejumlah pasal bermasalah atau kontroversial.	Tir-4/kal-4	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.
20.	<b>Sebelumnya</b> , pemerintah menyerahkan Surat Presiden, RUU Cipta Kerja, dan Naskah Akademik kepada DPR RI, pada tanggal 12 Februari 2020.	Tir-4/kal-6	Suksesi	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
21.	<b>Namun</b> RUU Cipta Kerja disebut memuat sejumlah pasal bermasalah atau kontroversi.	Tir-4/kal-8	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
22.	<b>Konsekuensinya</b> , banyak pekerja yang tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian mereka.	Tir-4/kal-20	Penyimpulan	Menyampaikan kesimpulan, justifikasi, gagasan, tandingan, penolakan, dan pengakuan.
23.	<b>Namun</b> pemerintah menghapus ketentuan “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” sehingga pasal 88	Tir-4/kal-32	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.

	tersisa, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.”			
24.	<b>Namun</b> , pada RUU Cilaka hanya ditulis, “Pasal 93 Dihapus.”	Tir-4/kal-34	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
25.	<b>Kemudian</b> , point ketiga perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta, berubah menjadi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.	Tir-4/kal-44	Suksesi	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
26.	<b>Lebih lanjut</b> , Hary menilai perubahan poin-poin dalam pasal ini jelas melanggar semangat UU Pers sebelumnya, yang mengatur bahwa sengketa pers lebih didorong pada upaya korektif dan edukasi.	Tir-4/kal-46	Suksesi	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
27.	<b>Apalagi</b> , khusus untuk Pesantren sudah ada UU tersendiri, yakni UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang sama sekali tidak mencantumkan sanksi pidana, melainkan pembinaan dan sanksi administratif.	Tir-4/kal-56	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.
28.	<b>Namun</b> Pemerintah dan DPR tak memberikan pilihan lain karena mereka pun tak mendengar suara publik.	Tir-5/kal-23	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
29.	<b>Salah satu contohnya</b> saat aksi penolakan hasil Pilpres 2019 di Bawaslu pada 21-22 Mei.	Tir-5/kal-28	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.
30.	<b>Selain itu</b> , kelompok rentan seperti gelandangan dan pengemis, serta kelompok minoritas gender juga berpotensi dihukum.	Tir-5/kal-35	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.



31.	<b>Salah satunya</b> penghapusan pasal soal upah minimum sektoral yang dihapus.	Tir-5/kal-37	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.
32.	<b>Sebelumnya</b> , pembuatan Amdal harus melibatkan warga terdampak, pemerhati lingkungan, dan siapa pun yang terpengaruh. RUU Ciptaker mengubah aturan itu.	Tir-5/kal-45	Suksesi	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
33.	<b>Dari 10 poin tuntutan tersebut</b> , Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR, kata Said, memang menyepakati agar tiga isu, yaitu isu tentang PHK, sanksi dan TKA, dapat kembali kepada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.	Tir-6/kal-25	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.
34.	<b>Namun demikian</b> , menurut Said, tujuh isu lainnya juga sangat penting karena menyangkut kesejahteraan dan upah para buruh.	Tir-6/kal-26	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
35.	“Ketentuan ini otomatis akan menurunkan tingkat upah minimum. <b>Konsekuensinya</b> , banyak pekerja yang tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian mereka. Hak mereka atas standar hidup yang layak akan terdampak. Situasi ini bertentangan dengan standar HAM internasional,” kata Usman.	Tir-6/kal-49	Penyimpulan	Menyampaikan kesimpulan, justifikasi, gagasan, tandingan, penolakan, dan pengakuan.
36.	<b>Selain itu</b> , RUU Cipta Kerja juga dinilai merugikan pekerja karena menghapus beberapa bentuk cuti berbayar, termasuk cuti haid, cuti pribadi (seperti pernikahan, sunat, pembaptisan, atau kematian anggota keluarga), cuti melahirkan, dan hari raya keagamaan.	Tir-6/kal-58	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.
37.	<b>Sementara dalam prosesnya</b> , penyusunan Omnibus Ciptaker tidak terbuka dan tidak transparan.	Tir-6/kal-61	Simultan	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
38.	<b>Namun</b> , seluruh serikat pekerja tersebut membantah klaim pemerintah dan menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan sejak awal proses penyusunan.	Tir-6/kal-63	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.

39.	<b>Dengan kata lain</b> , tidak menunggu jatuhnya korban dulu.	Tir-7/kal-13	Penyimpulan	Menyampaikan kesimpulan, justifikasi, gagasan, tandingan, penolakan, dan pengakuan.
40.	<b>Sayangnya</b> , aturan ini dihapus dalam UU Cipta Kerja. Pemerintah dan DPR justru membuat Pasal 82B.	Tir-7/kal-15	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
41.	<b>Namun</b> , dalam UU Cipta Kerja ketentuan ini diubah dari pidana menjadi denda.	Tir-7/kal-19	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
42.	<b>Sebelumnya</b> pada 12 Februari 2020, Pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden, RUU Cipta Kerja, dan Naskah Akademik kepada DPR RI.	Tir-8/kal-6	Suksesi	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
43.	<b>Saat penyerahan</b> , pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.	Tir-8/kal-7	Simultan	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
44.	<b>Selanjutnya</b> Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.	Tir-8/kal-8	Suksesi	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
45.	<b>Sementara</b> yang hadir hanya 318 anggota DPR.	Tir-8/kal-12	Simultan	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
46.	<b>Meski demikian</b> , rapat paripurna tetap digelar.	Tir-8/kal-13	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
47.	<b>Namun</b> Azis mengatakan pandangan Fraksi Partai Demokrat akan diberikan kesempatan setelah perwakilan pemerintah menyampaikan pandangannya.	Tir-8/kal-20	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
48.	<b>Namun</b> , Benny ngotot ingin tetap berbicara.	Tir-8/kal-25	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
49.	<b>Namun</b> lagi-lagi Benny mendesak ingin bicara.	Tir-8/kal-34	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
50.	<b>Ternyata</b> mikrofon Benny dimatikan oleh Puan dari depan meja pimpinan sidang.	Tir-8/kal-36	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.



51.	<b>Akibatnya</b> , pengendara jalan sempat tersendat oleh aksi long march itu.	Tir-8/kal-56	Penyimpulan	Menyampaikan kesimpulan, justifikasi, gagasan, tandingan, penolakan, dan pengakuan.
52.	<b>Sebaliknya</b> , publik diminta percaya bahwa undang-undang ini dibuat untuk kemaslahatan bersama.	Tir-9/kal-6	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
53.	<b>Di sisi lain</b> , pemerintahan Joko Widodo menuduh tanpa bukti bahwa publik yang memprotes regulasi ini terhasut hoaks.	Tir-9/kal-7	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
54.	<b>Intinya</b> , perbaikan non-substansial.	Tir-9/kal-19	Penyimpulan	Menyampaikan kesimpulan, justifikasi, gagasan, tandingan, penolakan, dan pengakuan.
55.	<b>Biasanya</b> , mereka mendapatkan salinan saat menandatangani daftar hadir sebelum memasuki ruang paripurna.	Tir-9/kal-26	Persamaan	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
56.	<b>Namun</b> , pukul 15.52, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dari Fraksi Golkar, yang memimpin rapat paripurna, meminta persetujuan agar dibahas di urutan ke-2.	Tir-9/kal-47	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
57.	<b>Sementara</b> Demokrat dan PKS belum menerima hasil Panja dan menolak RUU Cipta Kerja.	Tir-9/kal-54	Simultan	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
58.	<b>Akhirnya</b> , mulai pukul 16.28, seluruh fraksi membacakan pandangannya.	Tir-9/kal-61	Sukses	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks
59.	<b>Namun</b> , dokumen tak kunjung diperoleh dengan alasan masih dirapikan.	Tir-9/kal-80	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
60.	<b>Sementara</b> Achmad Baidowi berkata draf UU Cipta Kerja di luar kewenangan Bamus, yang menurutnya tugas Bamus membahas surat dari Baleg mengenai agenda dipercepat pengesahan RUU Cipta Kerja.	Tir-9/kal-82	Simultan	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
61.	<b>Namun</b> , dengan membandingkan draf 905 halaman dan draf 812 halaman, artinya selama sepekan "diperbaiki", ada sejumlah penambahan ayat dan kata.	Tir-9/kal-107	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.

62.	<b>Salah satunya</b> penambahan 1 ayat dalam pasal 79 UU 13/2003 versi 812 halaman.	Tir-9/kal-108	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.
63.	<b>Selain itu</b> , pasal 88A memuat 8 ayat, sebelumnya hanya 5 ayat.	Tir-9/kal-110	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.
64.	<b>Singkatnya</b> , perubahan itu tak cuma memperbaiki titik-koma atau salah ketik atau dalam bahasa DPR "perbaikan non-substansial."	Tir-9/kal-117	Penyimpulan	Menyampaikan kesimpulan, justifikasi, gagasan, tandingan, penolakan, dan pengakuan.
65.	<b>Di waktu sama</b> , pemerintah pusat sedang menyiapkan 40 aturan turunan.	Tir-10/kal-9	Simultan	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
66.	<b>Sebelum akhirnya</b> Jokowi menerima undang-undang Cipta Kerja, pengesahannya di tangan legislatif tampak tergesa-gesa.	Tir-10/kal-10	Simultan	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
67.	<b>Bersamaan dengan itu</b> muncul empat versi draf undang-undang Cipta Kerja.	Tir-10/kal-28	Simultan	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
68.	<b>Pada kenyataannya</b> , terindikasi perubahan substansi.	Tir-10/kal-32	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
69.	<b>Selain itu</b> , pasal 88A memuat 8 ayat, sebelumnya hanya 5 ayat. Versi yang terbaru ini juga menambahkan peran pemerintah daerah, sebelumnya cuma pemerintah pusat.	Tir-10/kal-36	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.
70.	<b>Namun</b> , belum sampai lokasi dan mengevakuasi korban mereka dihentikan polisi.	Tir-11/kal-13	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
71.	<b>Pun demikian</b> saat tancap gas.	Tir-11/kal-37	Persamaan	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
72.	<b>Di sisi lain</b> , Polri menyatakan tidak melarang unjuk rasa.	Tir-12/kal-7	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
73.	<b>Pertama</b> , memberikan pemberitahuan unjuk rasa terlebih dahulu.	Tir-12/kal-17	Suksesi	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
74.	<b>Kedua</b> , bila dilakukan di tempat terbuka, maka kegiatan hanya boleh berlangsung hingga pukul 18.00.	Tir-12/kal-18	Suksesi	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.



75.	<b>Namun</b> , sampai sekarang tidak ada aturan hukum jelas untuk melarang demonstrasi semasa pandemi.	Tir-12/kal-20	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
76.	<b>Secara bersamaan</b> , Polri juga meminta jajarannya untuk memperbanyak sosialisasi protokol kesehatan.	Tir-12/kal-29	Simultan	Menata serta mengurutkan gagasan dan argumentasi dalam teks.
77.	<b>Hasilnya</b> , Pilkada 2020 menghasilkan banyak pelanggaran protokol kesehatan.	Tir-12/kal-31	Penyimpulan	Menyampaikan kesimpulan, justifikasi, gagasan, tandingan, penolakan, dan pengakuan.
78.	<b>Namun</b> pemerintah menegaskan proses Pilkada 2020 tetap harus berjalan untuk menjaga marwah demokrasi.	Tir-12/kal-34	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
79.	<b>Sedangkan</b> peneliti dari Lowy Institute, Ben Bland, menyatakan harapan orang-orang bahwa penggunaan polisi sebagai alat represi akan berhenti setelah Jokowi menang ternyata keliru.	Tir-12/kal-49	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
80.	<b>Pendeknya</b> , pemerintahan Jokowi kini hampir tidak memiliki oposisi yang "bergigi" dan ia sepertinya malah berniat meniadakannya.	Tir-12/kal-60	Penyimpulan	Menyampaikan kesimpulan, justifikasi, gagasan, tandingan, penolakan, dan pengakuan.
81.	<b>Padahal</b> peran oposisi penting sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam pemerintahan.	Tir-12/kal-62	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
82.	<b>Padahal</b> , memberikan jalan lebar bagi publik untuk mengakses draf resmi bisa menjadi upaya kesimpang siuran dokumen sudah memakan banyak korban warga sipil yang ditangkap karena menyebarkan hoaks pasal-pasal Omnibus Law.	TIR-13/kal-6	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.
83.	<b>Bahkan</b> tak hanya draf, rapat-rapat pun tak lengkap.	TIR-13/kal-8	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.
84.	<b>Semisal</b> dari rapat tanggal 25 September, langsung melompat ke rapat pembahasan tingkat I DPR RI pada 3 Oktober.	TIR-13/kal-9	Pengembangan	Mengembangkan gagasan atau argumentasi, memberikan alternatif, dan merangkakan gagasan dalam teks.
85.	<b>Padahal</b> , temuan Tirto menjelaskan bahwa sepanjang 26 September sampai 2 Oktober terdapat rapat-rapat	TIR-13/kal-10	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.

	penting membahas UU Cipta Kerja, yang tak pernah dirilis di laman resmi DPR RI.			
86.	<b>Di sisi lain</b> , kata dia, setelah pengesahan UU pada 5 Oktober, banyak beredar draf UU yang membingungkan publik: mana draf yang asli dan mana yang palsu.	TIR-13/kal-22	Kontras	Membandingkan dan mengontraskan gagasan, argumen, dan bukti-bukti.



## LAMPIRAN 4: TABEL KONJUNGSI EKSTERNAL

No	Kalimat	Kodifikasi	Makna	Peran dalam kalimat
1.	"Panja berpendapat bahwa RUU Ciptaker dapat dilanjutkan pembahasannya dalam pembahasan tingkat II <b>yakni</b> , pengambilan keputusan agar RUU Ciptaker ditetapkan sebagai Undang-Undang," kata Willy.	Tir-1/Kal-16	Perluasan	Memperluas peristiwa
2.	"Ini menjadi suatu perangkat pemerintah untuk mampu memenangkan persaingan di era semua negara menghadapi masalah penanganan pandemi <b>dan</b> pemulihan ekonomi," kata Sturman	Tir-1/Kal-18	Perluasan	Memperluas peristiwa
3.	Hanya ada dua partai politik yang menolak RUU Ciptaker <b>yaitu</b> : Partai Demokrat dan PKS.	Tir-1/Kal-27	Perluasan	Memperluas peristiwa
4.	Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, harus ada pembahasan yang lebih utuh <b>dan</b> melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan.	Tir-1/Kal-28	Perluasan	Memperluas peristiwa
5.	tujuannya, kata Hinca, agar RUU Ciptaker ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, <b>serta</b> mampu mendorong pertumbuhan ekonomi <b>dan</b> penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya.	Tir-1/Kal-29	Perluasan	Memperluas peristiwa
6.	<i>Aliansi buruh terpaksa akan aksi turun ke jalan di tengah pandemi <b>karena</b> menilai DPR tak punya itikad baik membatalkan RUU Cipta Kerja.</i>	Tir-2/Kal-3	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
7.	Hal ini membuat banyak elemen masyarakat yang selama ini menolak RUU tersebut kecewa <b>dan</b> menyatakan akan melakukan aksi penolakan.	Tir-2/Kal-6	Perluasan	Memperluas peristiwa
8.	Berkali-kali rakyat menyampaikan aspirasi, menolak RUU Omnibus Law Ciptaker <b>tetapi</b> tak digubris, <b>bahkan</b> mereka terus melakukan pembahasan dan telah menyepakatinya.	Tir-2/Kal-9	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
9.	Mau tidak mau di masa pandemi, saat rakyat khawatir masalah kesehatan dan keselamatan <b>tetapi</b> kita dipaksakan untuk turun ke jalan.	Tir-2/Kal-11	Kontras	Mengkontraskan peristiwa

10.	Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah mengatakan meski situasi pandemi ini menyulitkan <b>namun</b> menurutnya tak ada lagi cara lain yang bisa dilakukan selain melakukan perlawanan turun ke jalan.	Tir-2/Kal-21	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
11.	Dalam konferensi pers tersebut GEBRAK menyerukan pemogokan umum nasional sebagai sikap penolakan <b>agar</b> RUU Omnibus Law Ciptaker dibatalkan seluruhnya.	Tir-2/Kal-24	Tujuan	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
12.	Mereka tidak menyangka bahwa pemerintah dan DPR benar-benar mengebut pembahasan <b>dan</b> tetap mengesahkan UU KPK yang baru tanpa mempertimbangkan aspirasi mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat sipil.	Tir-3/kal-16	Perluasan	Memperluas peristiwa
13.	Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan alasan mereka keluar <b>lantaran</b> tidak ada itikad baik dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ataupun Kamar Dagang Industri (Kadin) mencari titik temu kesepakatan.	Tir-3/kal-31	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi. Memperluas peristiwa
14.	“KSPI menolak sikap Apindo/Kadin dan pemerintah yang diwakili Kemenaker, <b>karena</b> tidak sesuai semangat yang diamanatkan Presiden Jokowi dan keinginan para buruh <b>agar</b> RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan tidak merugikan dan mengeksploitasi buruh,” <b>jelas</b> KSPI dalam rilis tertulisnya.	Tir-3/kal-32	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
15.	Tim ini, menurut Said, lebih bagus daripada tim teknis pemerintah <b>karena</b> berisikan buruh yang bisa dengan bebas menyampaikan keberatan.	Tir-3/kal-35	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
16.	Dalam tulisannya yang lain <b>bertajuk</b> "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan" (2015), Joko, sebagai tenaga ahli DPR, memandang bahwa <b>meski</b> sudah ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, aspirasi masyarakat masih dipandang sebelah mata.	Tir-3/kal-41	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
17.	Masyarakat bisa menyampaikan masukan, saran, keluhan, bahkan kepentingan mereka, <b>tapi</b> toh pengetok palunya adalah DPR.	Tir-3/kal-46	Kontras	Mengkontraskan peristiwa



18.	Aspirasi mereka hanya menjadi saran, <b>tapi</b> jauh panggang dari kebijakan.	Tir-3/kal-62	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
19.	Ada beberapa aturan yang menurut KSPI tak layak disahkan, <a href="#">antara lain</a> : pesangon yang jumlahnya berkurang dari 32 kali menjadi 25 kali, dibayarkan oleh perusahaan dan pemerintah; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak diatur batas waktunya dalam omnibus law; dan penjabaran bidang-bidang kerja untuk outsourcing yang belum jelas—sebelumnya outsourcing hanya berlaku di 5 bidang pekerjaan, <b>tapi</b> omnibus law tidak tegas menyebut demikian.	Tir-3/kal-68	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
20.	<b>Jika</b> merunut pada UU Ketenagakerjaan, maka seharusnya maksimal 10 kali upah.	Tir-3/kal-74	Kondisi	Menerangkan bagaimana peristiwa terjadi
21.	Kenihilan masalah cuti haid dan hamil dalam omnibus law bisa menjadi perkara lain ke depan <b>karena</b> bencananya aturan hukum.	Tir-3/kal-76	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
22.	<b>Meski</b> menurut buruh masih banyak masalah, toh sebagian besar fraksi di DPR tak keberatan.	Tir-3/kal-82	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
23.	<b>Jika</b> ditelaah satu per satu pasal dalam omnibus law, banyak ketentuan yang belum jelas <b>tapi</b> dilempar penyelesaiannya ke Peraturan Pemerintah daripada omnibus law.	Tir-3/kal-84	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
24.	Pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan <b>sebagaimana</b> dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu.	Tir-4/kal-12	Perluasan	Memperluas peristiwa
25.	Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dapat menjerat pelaku pembakar hutan dan lahan (karhutla) <b>tetapi</b> pemerintah menghapusnya di RUU Cipta Kerja.	Tir-4/kal-30	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
26.	Namun pemerintah menghapus ketentuan “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” <b>sehingga</b> pasal 88 tersisa, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman	Tir-4/kal-32	Tujuan	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi

	serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.”			
27.	“Ini adalah hal yang paling konyol. RUU ini pantas disebut sebagai RUU Cilaka, <b>karena</b> pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan bisnis,” ucap Manajer Kampanye Pangan Air dan Ekosistem Esensial Nasional Walhi Wahyu A. Perdana dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2020).	Tir-4/kal-35	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
28.	Ketua AJI Bengkulu, Harry Siswoyo mengatakan RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam nilai-nilai kebebasan pers bagi jurnalis, <b>karena</b> akan terjadi perubahan isi dari Pasal 11 UU Pers.	Tir-4/kal-37	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
29.	<b>Jika</b> pun berkaitan dengan denda, maka itu dibuat seprofesional mungkin, dengan kata lain tidak bermaksud untuk membangkrutkan perusahaan pers.	Tir-4/kal-47	Kondisi	Menerangkan bagaimana peristiwa terjadi
30.	<b>Apabila</b> , satuan pendidikan tersebut didirikan tanpa Perizinan Berusaha, maka penyelenggara dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.	Tir-4/kal-54	Kondisi	Menerangkan bagaimana peristiwa terjadi, Memperluas peristiwa.
31.	Jokowi didesak untuk menghentikan pembahasan RUU Ciptaker, <b>sebagaimana</b> yang ia lakukan terhadap RKUHP tahun lalu.	Tir-5/kal-3	Persamaan	Membandingkan peristiwa
32.	<b>Jika</b> tak dibatalkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, ia akan tercatat selamanya dalam sejarah sebagai kepanjangan tangan oligarki.	Tir-5/kal-5	Kondisi	Menerangkan bagaimana peristiwa terjadi
33.	Asfin bilang Jokowi dapat mendengar dan mengakomodasi desakan publik <b>dengan</b> menghentikan pembahasan di tingkat II DPR RI dengan mengeluarkan nota penundaan pembahasan sebelum atau saat sidang, sebagaimana pernah ia lakukan tahun lalu.	Tir-5/kal-10	Cara	Menerangkan bagaimana peristiwa terjadi
34.	"Sikap keras kepala mengesahkan omnibus law Cipta Kerja tepat di saat rakyat dilanda kesusahan besar <b>akibat</b> pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi menunjukkan Pemerintah dan	Tir-5/kal-18	Sebab	Menerangkan bagaimana peristiwa terjadi



	DPR telah menjadi antek penjajahan investor jahat dan koruptor," kata mereka.			
35.	"Kami mengajak masyarakat untuk semakin menyuarakan <b>dan</b> memperluas mosi tidak percaya ini," tambah mereka dalam keterangan tertulis.	Tir-5/kal-19	Perluasan	Memperluas peristiwa
36.	Alasan serupa bisa dipakai oleh Jokowi <b>mengingat</b> pasal-pasal dalam RUU Ciptaker juga bermasalah <b>dan</b> merugikan pekerja	Tir-5/kal-36	Perluasan	Memperluas peristiwa
37.	Belum lagi di sektor lingkungan, <b>khususnya</b> mengenai analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 26 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Tir-5/kal-44	Perluasan	Memperluas peristiwa
38.	RUU Ciptaker menghapus regulasi itu <b>dan</b> menjadikan satu dengan izin berusaha-- <b>padahal</b> itu dua ranah yang berbeda.	Tir-5/kal-48	Kontras	Mengontraskan peristiwa
39.	Kenapa RUU Cipta Kerja Ditolak <b>dan</b> Rencana Demo Omnibus Law	Tir-6/kal-1	Perluasan	Memperluas peristiwa
40.	Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hinca Pandjaitan mengatakan fraksinya, Demokrat, menolak RUU Ciptaker disetujui menjadi UU <b>karena</b> banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif.	Tir-6/kal-7	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
41.	FPKS menyebut substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Ciptaker memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan <b>dan</b> pemerintahan di Indonesia.	Tir-6/kal-9	Perluasan	Memperluas peristiwa
42.	RUU Cipta Kerja Omnibus Law juga ditolak oleh jutaan buruh di Indonesia <b>karena</b> dianggap akan merugikan para buruh.	Tir-6/kal-10	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
43.	Aksi dilakukan sebagai bentuk protes atas rencana pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh <b>dan</b> diadakan di lingkungan kerja masing-masing, <b>sebagai</b> upaya untuk menghindari penyebaran penularan wabah COVID-19.	Tir-6/kal-15	Perluasan	Memperluas peristiwa
44.	Serikat kerja di tingkat perusahaan, katanya, sudah mengirimkan surat izin kepada kepolisian resor (polres) masing-masing daerah, <b>sementara</b> serikat kerja di tingkat nasional juga telah mengirimkan izin untuk berunjuk rasa di	Tir-6/kal-16	Simultan	Menara serta mengurutkan peristiwa.

	lingkungan perusahaan/pabrik masing-masing kepada Mabes Polri.			
45.	<b>Dengan</b> menggelar unjuk rasa dari pukul 06.00 - 18.00 WIB, kata dia, berarti tingkat produksi kerja akan secara langsung terkena dampak dari aksi mogok nasional yang akan digelar secara serentak tersebut.	Tir-6/kal-17	Cara	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
46.	Namun demikian, menurut Said, tujuh isu lainnya juga sangat penting <b>karena</b> menyangkut kesejahteraan dan upah para buruh.	Tir-6/kal-26	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
47.	"Nah, hal-hal lain adalah tentang cuti atau cuti bagi pekerja perempuan khususnya, kemudian juga kita minta jangan ada yang hilang jaminan sosial buat karyawan kontrak dan 'outsourcing'. Kemudian, jangan ada juga waktu kerja yang eksploitatif <b>karena</b> itu adalah salah satu bentuk perbudakan," ujar Said Iqbal.	Tir-6/kal-32	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
48.	Amnesty menilai RUU Ciptaker, baik proses legislatif maupun substansi-nya, berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) <b>dan</b> bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia untuk melindungi HAM, terutama menyangkut hak untuk bekerja dan hak di tempat kerja.	Tir-6/kal-35	Perluasan	Memperluas peristiwa
49.	"Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, <b>karena</b> akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, RUU ini bisa membahayakan hak-hak pekerja," tambah Usman.	Tir-6/kal-37	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
50.	Aturan seperti ini berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para pekerja <b>karena</b> mereka akan terus-menerus menjadi pegawai tidak tetap, <b>sehingga</b> seterusnya mereka tidak mendapat perlindungan yang memadai, termasuk pensiun, cuti tahunan selama 12 hari (untuk pekerja sementara yang bekerja di bawah satu tahun), dan kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja.	Tir-6/kal-53	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi



51.	Ini merupakan kemunduran dari undang-undang yang ada <b>dan</b> , lagi-lagi, bertentangan dengan standar HAM internasional.	Tir-6/kal-54	Perluasan	Memperluas peristiwa
52.	Di pasal lain, ada pula ketentuan yang dapat membuat pekerja untuk bekerja lebih lama, <b>dengan</b> meningkatkan batas waktu lembur dari tiga jam per hari <b>seperti</b> yang ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan, menjadi empat jam per hari, serta dari 14 jam menjadi 18 jam per minggu.	Tir-6/kal-55	Cara	Menerangkan bagaimana peristiwa terjadi
53.	Selain itu, RUU Cipta Kerja juga dinilai merugikan pekerja <b>karena</b> menghapus beberapa bentuk cuti berbayar, termasuk cuti haid, cuti pribadi (seperti pernikahan, sunat, pembaptisan, atau kematian anggota keluarga), cuti melahirkan, dan hari raya keagamaan.	Tir-6/kal-58	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
54.	Sementara dalam prosesnya, penyusunan Omnibus Ciptaker tidak terbuka <b>dan</b> tidak transparan.	Tir-6/kal-61	Perluasan	Memperluas peristiwa
55.	“Seharusnya para serikat pekerja dilibatkan dalam proses penyusunannya sejak awal, <b>karena</b> anggota merekalah yang akan terdampak langsung oleh RUU tersebut. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, dan itu dijamin dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Suara dan aspirasi kelompok buruh dan pekerja harusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah dan DPR,” pungkas Usman.	Tir-6/kal-65	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
56.	“Skema sanksi berubah, sekarang administratif dulu. <b>Dulu</b> pidana-perdata. <b>Sekarang</b> hanya administratif. Itu jahat sekali dalam UU Cipta Kerja. Dibiarkan beberapa hal,” ucap Wahyu dihubung, Selasa (6/10/2020).	Tir-7/kal-6	Suksesi	Menara serta mengurutkan peristiwa.
57.	<b>Bila</b> seseorang tidak mengantongi persetujuan lingkungan yang salah satunya hanya bisa diperoleh dengan Amdal, baru dapat dipidana bila kegiatan usaha seseorang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.	Tir-7/kal-11	Kondisi	Menerangkan bagaimana peristiwa terjadi

58.	Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober 2020 <b>meski</b> mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.	Tir-8/kal-4	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
59.	Dalam proses pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU ini, terdapat beberapa fakta mulai dari 257 anggota DPR yang bolos saat pengesahan, <b>hingga</b> Partai Demokrat yang walk out dari Paripurna.	Tir-8/kal-5	Perluasan	Memperluas peristiwa
60.	Fraksi Partai Demokrat walk out dari rapat paripurna saat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja <b>karena</b> menganggap tak diberikan kesempatan berbicara mengenai pandangan mini fraksi.	Tir-8/kal-18	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
61.	Saat itu Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, meminta kepada Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin selaku Pemimpin Sidang, <b>agar</b> diberikan waktu berbicara menyampaikan pandangan fraksi terkait Omnibus Law.	Tir-8/kal-19	Tujuan	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
62.	Suaranya tak didengar <b>sembari</b> memberikan kesempatan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk bicara.	Tir-8/kal-32	Simultan	Menara serta mengurutkan peristiwa.
63.	RUU yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR ini akan merusak iklim investasi <b>dan</b> melanggar standar praktik terbaik internasional yang ditujukan untuk mencegah konsekuensi berbahaya dari aktivitas bisnis.	Tir-8/kal-39	Perluasan	Memperluas peristiwa
64.	Beginilah jalannya pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober: Prosedur membuat regulasi ditabrak <b>dan</b> mekanisme dibolak-balik.	Tir-9/kal-4	Perluasan	Memperluas peristiwa
65.	Pada 5 Oktober, sekitar pukul 10 pagi, kalangan internal DPR mendengar selentingan <b>bahwa</b> RUU Cipta Kerja akan disahkan.	Tir-9/kal-15	Perluasan	Memperluas peristiwa
66.	Kabar ini sempat dianggap angin lalu <b>lantaran</b> secara prosedur tidak masuk akal, ujar seorang sumber Tirto yang mengikuti rapat-rapat pembahasan RUU Cipta Kerja.	Tir-9/kal-16	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi



67.	Biasanya pengecekan non-substansial untuk satu undang-undang saja membutuhkan waktu dua pekan sampai satu bulan; tergantung seberapa tebal <b>dan</b> kompleks regulasi tersebut.	Tir-9/kal-19	Perluasan	Memperluas peristiwa
68.	Waktu untuk merampungkan UU Cipta Kerja semestinya lebih panjang <b>karena</b> ia memengaruhi 79 undang-undang sekaligus.	Tir-9/kal-20	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
69.	Di kalangan wartawan, beredar undangan rapat paripurna, <b>tapi</b> belum menyisipkan agenda mengesahkan RUU Cipta Kerja.	Tir-9/kal-33	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
70.	Tiga menit kemudian, pesan baru yang beredar lebih eksplisit: “Rapat paripurna penutupan masa sidang dimajukan tanggal 5 Oktober 2020 pukul 15.00” <b>dan</b> “masa reses 6 Oktober-8 November 2020.”	Tir-9/kal-36	Perluasan	Memperluas peristiwa
71.	Saat itu ia di Serang, Banten, <b>sehingga</b> menugaskan koleganya, Amin AK dari Komisi VI yang juga anggota badan legislasi.	Tir-9/kal-38	Tujuan	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
72.	Amin menolak rapat paripurna dimajukan dalam rapat Bamus, <b>tetapi</b> usulannya ditolak.	Tir-9/kal-41	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
73.	Pukul 16.20, anggota Komisi II Fraksi Demokrat Benny K. Harman sempat memprotes pimpinan DPR <b>lantaran</b> Azis Syamsuddin menawarkan agar pandangan fraksi dibacakan setelah pemerintah.	Tir-9/kal-55	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
74.	Menurut Benny, fraksi memang boleh membacakan pandangannya <b>sebagaimana</b> kesepakatan dalam Bamus hari itu.	Tir-9/kal-56	Persamaan	Membandingkan peristiwa
75.	Ini memicu protes dari fraksi lain, terutama PAN yang menyatakan <b>jika</b> satu fraksi diberi kesempatan, seluruh fraksi juga semestinya mendapat kesempatan yang sama.	Tir-9/kal-59	Kondisi	Menerangkan bagaimana peristiwa terjadi
76.	Pukul 17.24, anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat Didi Irawardi Syamsuddin juga meminta kesempatan berbicara <b>dan</b> menyampaikan dampak buruk RUU Cipta Kerja <b>serta</b> meminta keputusan diambil secara voting atau ditunda.	Tir-9/kal-63	Perluasan	Memperluas peristiwa
77.	Pukul 17.27, Benny K. Harman kembali meminta kesempatan berbicara <b>tetapi</b> tak diizinkan oleh pimpinan sidang.	Tir-9/kal-65	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
78.	Benny bersikeras tetap ingin berbicara <b>hingga</b> berdebat dengan Azis.	Tir-9/kal-66	Perluasan	Memperluas peristiwa

79.	Kalimatnya tidak selesai <b>karena</b> mikrofon dimatikan ke-4 kalinya oleh Ketua DPR Puan Maharani.	Tir-9/kal-71	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
80.	Amin berkata ia tak mempertanyakan draf fisik saat menghadiri rapat paripurna, <b>tapi</b> berfokus mengapa jadwal paripurna dimajukan.	Tir-9/kal-80	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
81.	Elen Setiadi tidak merespons pesan tertulis <b>maupun</b> panggilan telepon dari Tirto.	Tir-9/kal-90	Perluasan	Memperluas peristiwa
82.	Ia berdalih ada versi draf beda halaman <b>karena</b> perbedaan jenis kertas.	Tir-9/kal-103	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
83.	Namun, dengan membandingkan draf 905 halaman dan draf 812 halaman, <b>artinya</b> selama sepekan "diperbaiki", ada sejumlah penambahan ayat dan kata.	Tir-9/kal-106	Perluasan	Memperluas peristiwa
84.	Jumlah ayat dalam pasal 79 UU 13/2003 menjadi 6 ayat, <b>padahal</b> dalam draf versi 905 halaman hanya 5 ayat.	Tir-9/kal-109	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
85.	Beberapa perbaikan itu patut diduga menambah perihal yang substansial, <b>meski</b> dokumen UU Cipta Kerja secara siluman sudah disahkan pada 5 Oktober.	Tir-9/kal-117	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
86.	Pengesahan UU Cipta Kerja berlangsung kilat <b>dan</b> menyisakan masalah <b>yakni</b> dugaan perubahan substansi yang melanggar aturan.	Tir-10/kal-3	Perluasan	Memperluas peristiwa
87.	Mendadaknya agenda sidang membuat anggota dewan bertanya-tanya, <b>apalagi</b> menurut Amin AK dari Fraksi Partai Keadilan dan Sejahtera, tak dibagikan draf final RUU Cipta Kerja kepada anggota yang hadir.	Tir-10/kal-17	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
88.	Terhitung empat kali mikrofon dimatikan yang memicunya untuk meninggalkan rapat (walk out) <b>dan</b> menyatakan tak bertanggung jawab terhadap UU Cipta Kerja.	Tir-10/kal-23	Perluasan	Memperluas peristiwa
89.	Terjadi kekerasan terhadap jurnalis <b>hingga</b> paramedis yang menjalankan tugas sesuai undang-undang <b>dan</b> panggilan kemanusiaan.	Tir-10/kal-27	Perluasan	Memperluas peristiwa
90.	Selama mengubah draf, diklaim hanya redaksional <b>dan</b> format kertas.	Tir-10/kal-31	Perluasan	Memperluas peristiwa



91.	Jumlah ayat dalam pasal 79 UU 13/2003 menjadi 6 ayat, <b>padahal</b> dalam draf versi 905 halaman hanya 5 ayat.	Tir-10/kal-35	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
92.	Menurut Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen, I Made Leo, perubahan tersebut menabrak aturan DPR sendiri <b>yakni</b> nomor 2 tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.	Tir-10/kal-41	Perluasan	Memperluas peristiwa
93.	Ambulans yang mencoba meloloskan diri dari razia <b>lantas</b> ditembaki <b>kemudian</b> orang yang ada di dalamnya ditangkap.	Tir-11/kal-5	Suksesi	Menara serta mengurutkan peristiwa.
94.	Ambulans relawan medis yang dirazia <b>dan kemudian</b> ditangkap itu merupakan bagian dari Team Rescue Ambulance Indonesia (TRAI) Korwil Jakarta Raya.	Tir-11/kal-6	Suksesi	Menara serta mengurutkan peristiwa.
95.	Satu ambulans merupakan milik Yayasan Al Akhyar berada di depan dioperatori oleh relawan TRAI, <b>kemudian</b> satu ambulans di belakang merupakan milik TRAI.	Tir-11/kal-11	Suksesi	Menara serta mengurutkan peristiwa.
96.	Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Rabu (14/10/2020), mengatakan mereka merazia <b>karena</b> curiga.	Tir-11/kal-32	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
97.	Polisi kemudian melakukan pencarian <b>dan</b> menemukan ambulans tersebut di Taman Ismail Marzuki.	Tir-11/kal-41	Perluasan	Memperluas peristiwa
98.	Para relawan tersebut juga dipukul sampai jatuh <b>dan</b> “diseret ke mobil [polisi] sambil dipukul dengan tongkat dan ditendang.”	Tir-11/kal-47	Perluasan	Memperluas peristiwa
99.	Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan tindakan polisi yang merazia <b>bahkan</b> menembaki ambulans <b>dan</b> menangkap relawan keliru.	Tir-11/kal-50	Perluasan	Memperluas peristiwa
100.	Mereka tidak perlu sampai melakukan tindakan penangkapan <b>sampai</b> menembaki ambulans <b>dengan</b> gas air mata.	Tir-11/kal-56	Perluasan	Memperluas peristiwa
101.	“Yang paling sederhana adalah petugas kepolisian dapat mengikuti ke mana ambulans itu pergi. Memotret, merekam video, dan kemudian melakukan penyidikan berupa pemanggilan, pemeriksaan, <b>bahkan</b> penyitaan <b>jika</b> memang itu untuk keperluan pengumpulan bukti ilmiah dan bukti yuridis,” katanya.	Tir-11/kal-57	Kondisi	Menerangkan bagaimana peristiwa terjadi

102.	Kendati UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat <b>dan</b> Presiden juga mengamplifikasinya, saat itu, pada Oktober 2019, polisi <b>melakukan</b> diskresi yang membingungkan.	Tir-12/kal-5	Perluasan	Memperluas peristiwa
103.	Dengan syarat, <b>jika</b> ada keributan atau kericuhan, <b>maka</b> demonstrasi itu akan dibubarkan.	Tir-12/kal-8	Kondisi	Menerangkan bagaimana peristiwa terjadi
104.	Kedua, <b>bila</b> dilakukan di tempat terbuka, <b>maka</b> kegiatan hanya boleh berlangsung hingga pukul 18.00.	Tir-12/kal-18	Kondisi	Menerangkan bagaimana peristiwa terjadi
105.	Polri tidak melarang adanya peserta kampanye, <b>tapi</b> membatasi sesuai aturan KPU sampai 100 orang saja di ruang terbuka.	Tir-12/kal-27	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
106.	<b>Tapi</b> penanganan Polri ini berbeda <b>jika</b> dihadapkan pada demonstrasi anti-Omnibus Law.	Tir-12/kal-35	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
107.	Selain itu patroli siber Polri dilakukan demi menguatkan Pilkada, <b>sedangkan</b> jelang demonstrasi anti-Omnibus Law, patroli siber justru “untuk membangun opini publik” <b>dengan</b> “melakukan kontra narasi terhadap isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.”	Tir-12/kal-39	Kontras Dan Cara	Mengkontraskan peristiwa dan menerangkan peristiwa
108.	Dia membubarkan berbagai demonstrasi <b>atau</b> gerakan yang berseberangan dengannya <b>seperti</b> Ganti Presiden 2019.	Tir-12/kal-44	Perluasan, Pilihan	Memperluas peristiwa
109.	“Kebijakan ini merupakan upaya yang disengaja <b>dan</b> semakin sistematis untuk melemahkan oposisi yang justru penting dalam sistem demokrasi,” <b>catat</b> Power dalam makalah bertajuk "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline" (2018).	Tir-12/kal-48	Perluasan	Memperluas peristiwa
110.	Di tengah wabah COVID-19, polisi bukan saja menindak mereka yang menyebarkan informasi keliru soal pandemi, <b>tetapi juga</b> mereka yang menghina presiden atau pejabat pemerintahan lainnya.	Tir-12/kal-51	Kontras,	Mengkontraskan peristiwa
111.	Pendeknya, pemerintahan Jokowi kini hampir tidak memiliki oposisi yang "bergigi" <b>dan</b> ia sepertinya malah berniat meniadakannya.	Tir-12/kal-60	Perluasan	Memperluas peristiwa
112.	Dengan absennya oposisi yang kuat, checks and balances secara alamiah akan bertumpu pada kekuatan sosial	Tir-12/kal-63	Perluasan	Memperluas peristiwa



	ekstraparlementer <b>seperti</b> gerakan mahasiswa, buruh, dan rakyat kebanyakan.			
113.	Dengan disepakatinya UU Cipta Kerja Omnibus Law oleh mayoritas fraksi di DPR yang bertentangan dengan sebagian suara rakyat, <b>maka</b> demonstrasi tampak menjadi upaya paling mungkin, <b>meski</b> bukan paling baik.	Tir-12/kal-64	Kontras	Mengkontraskan peristiwa
114.	UU kontroversial tersebut <b>disahkan</b> pada 5 Oktober, <b>dan</b> sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo 14 Oktober lalu.	Tir-13/Kal-5	Perluasan	Memperluas peristiwa
115.	Padahal, memberikan jalan lebar bagi publik untuk mengakses draf resmi bisa menjadi upaya kesimpang siuran dokumen sudah memakan banyak korban warga sipil yang ditangkap <b>karena</b> menyebarkan hoaks pasal-pasal Omnibus Law.	Tir-13/Kal-6	Sebab	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
116.	Ia menyebut dokumen draf setebal 812 halaman tersebut dibahas sebanyak 88 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) <b>dan</b> pertemuan dengan ragam tokoh masyarakat sebanyak 89 kali	Tir-13/Kal-12	Perluasan	Memperluas peristiwa
117.	Ketidakterbukaan draf UU yang memantik banyak kemarahan publik itu pun <b>akhirnya</b> sampai merespons Komisi Informasi Pusat (KIP), yang menilai produk pembuatan legislasi ini jauh dari praktik transparan.	Tir-13/Kal-15	Tujuan	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi
118.	Ia mendesak <b>agar</b> pihak eksekutif dan legislatif harus berinisiatif untuk menambah kanal-kanal haluan informasi <b>agar</b> publik tak hanya mengandalkan laman resmi.	Tir-13/Kal-17	Tujuan	Menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi

### LAMPIRAN 5: TABEL METAFORA

1.	Puja-puji dari <b>Anak Buah</b> Jokowi	Tir-1/Kal-19
2.	“Di Jawa Timur saya mewakili 50 organisasi dari buruh, petani, mahasiswa dan seluruh <b>elemen perjuangan rakyat</b> .	Tir-2/Kal-19
3.	Pemerintah dan DPR selangkah lagi berhasil mengesahkan aturan hukum yang menuai banyak kritik secara <b>senyap dan kilat</b> .	Tir-3/kal-23
4.	<b>Suara Elite Partai, Suara Investor</b>	Tir-3/kal-27
5.	Dalam tulisannya yang lain bertajuk "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan" (2015), Joko, sebagai tenaga ahli DPR, memandang bahwa meski sudah ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, aspirasi masyarakat masih dipandang <b>sebelah mata</b> .	Tir-3/kal-41
6.	Sebagian orang memang menganggap partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang hanyalah <b>jargon</b> .	Tir-3/kal-45
7.	Aspirasi mereka hanya menjadi saran, tapi <b>jauh panggang</b> dari kebijakan.	Tir-3/kal-62
8.	Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang <b>dipukul rata</b> di semua kota dan kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah.	Tir-4/kal-16
9.	Jika tak dibatalkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, ia akan tercatat selamanya dalam sejarah sebagai <b>kepanjangan tangan oligarki</b> .	Tir-5/kal-5
10.	“ <b>Sikap keras kepala</b> mengesahkan omnibus law Cipta Kerja tepat di saat rakyat dilanda kesusahan besar akibat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi menunjukkan Pemerintah dan DPR telah menjadi antek penjajahan investor jahat dan koruptor," kata mereka.	Tir-5/kal-18
11.	Tapi, <b>jalan ngebut</b> DPR dan pemerintah membuyarkan rencana tersebut.	Tir-9/kal-13
12.	Kabar ini sempat dianggap <b>angin lalu</b> lantaran secara prosedur tidak masuk akal, ujar seorang sumber Tirto yang mengikuti rapat-rapat pembahasan RUU Cipta Kerja.	Tir-9/kal-17
13.	Beberapa perbaikan itu patut diduga menambah perihal yang substansial, meski dokumen UU Cipta Kerja secara <b>siluman</b> sudah disahkan pada 5 Oktober.	Tir-9/kal-116
14.	Setelah <b>dihujani protes</b> , pengesahan RUU menjadi UU terjadi pukul 17.52 WIB.	Tir-10/kal-24
15.	Menurut Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen, I Made Leo, perubahan tersebut <b>menabrak aturan</b> DPR sendiri yakni nomor 2 tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.	Tir-10/kal-39



16.	Polri menjadi <b>garda depan</b> pembela pemerintah dalam isu Omnibus Law. <b>Alat negara yang tergelincir jadi alat penguasa.</b>	Tir-12/kal-3
17.	Namun pemerintah menegaskan proses Pilkada 2020 tetap harus berjalan untuk menjaga <b>marwah demokrasi.</b>	Tir-12/kal-34
18.	Pendeknya, pemerintahan Jokowi kini hampir tidak memiliki <b>oposisi yang "bergigi"</b> dan ia sepertinya malah berniat meniadakannya.	Tir-12/kal-60
19.	Ia adalah bentuk <b>ikhtiar masyarakat</b> sebelum UU itu diteken Presiden.	Tir-12/kal-65

**LAMPIRAN 6: CURRICULUM VITAE**

Nama : M. Fianda Ruly Ananta  
NIM : 165110700111005  
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 20 Juli 1997  
Alamat Asli : Jln. Singonggolo RT. 01 RW. 01 Desa Kedaton Kec. Kapas Kab  
Bojonegoro  
Alamat di Malang : MT. Haryono Gg. 10 No. 1104a, Lowokwaru, Malang  
Nomor HP : 08979390599  
Surat Elektronik : rulyananta@student.ub.ac.id  
Riwayat Pendidikan : TK Dharna Wanita Kedaton (2002-2003)  
SDN Kedaton (2003-2009)  
SMPN 1 Balen (2009-2012)  
SMA 2 Bojonegoro (2012-2015)  
Universitas Brawijaya (2016-2021)

**Pengalaman Organisasi**

1. Unit Kegiatan Mahasiswa 'Teater Lingkar' (2016-Sekarang)
2. Unit Kegiatan Mahasiswa 'MUSICS' (2016-2018)
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Budaya Komisariat Brawijaya  
(Ketua Rayon 2018)